

**ANALISIS RELASI ANTARA INDUSTRI KECIL
MENENGAH (IKM), PEMERINTAH DAERAH,
DAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN IKM**

(Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

GALIH SATRIO PAMBUDI

125030100111043



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah diperbuatnya”

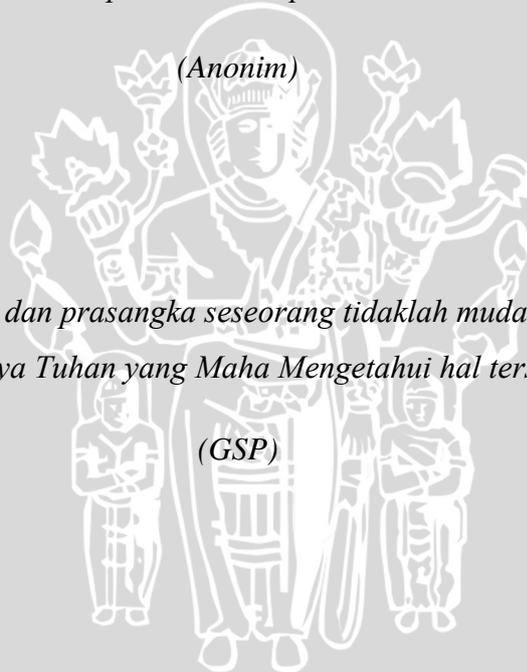
(Ali Bin Abi Thalib)

”The big or small the problem is, depends on how we handle it”

(Anonim)

*“Menilai tentang hati dan prasangka seseorang tidaklah mudah untuk diketahui,
karna hanya Tuhan yang Maha Mengetahui hal tersebut”*

(GSP)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Relasi Antara Industri Kecil Menengah (IKM),
Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan
IKM (Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota
Malang)

Disusun oleh : Galih Satrio Pambudi

NIM : 125030100111043

Fakultas : Ilmu Administrasi

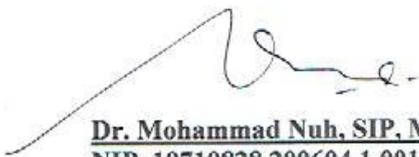
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 4 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Mohammad Nuh, SIP, M.Si
NIP. 19710828 200604 1 001



Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

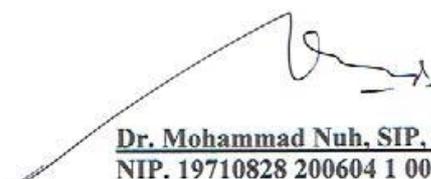
Hari : Selasa
 Tanggal : 17 Januari 2017
 Jam : 13.00 – 14.00 WIB
 Skripsi Atas nama : Galih Satrio Pambudi
 Judu : Analisis Relasi Antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan MAsyarakat dalam Pengembangan IKM (Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Mohammad Nuh, SIP, M.Si
 NIP. 19710828 200604 1 001



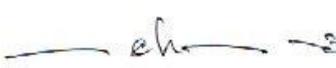
Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
 NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota

Anggota



Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D
 NIP. 19691205 200501 1 003



M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
 NIP. 19740614 200501 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 4 Januari 2017



Galih Satrio Pambudi
NIM. 125030100111043

RINGKASAN

Galih Satrio Pambudi, 2017, **Analisis Relasi Antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan IKM** (Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang), Dr. Mohammad Nuh, SIP, M.Si., Ainul Hayat, S.Pd., M.Si., Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 143 hal + xvi

Relasi atau hubungan yang terjalin antara para *stakeholder* di dalam pengembangan IKM merupakan hal yang paling mendasar dalam pencapaian tujuan bersama. Kota Malang memiliki berbagai produk unggulan makanan khas daerah, salah satunya adalah marning jagung. Pengembangan yang dilakukan terhadap IKM marning jagung Kota Malang selama ini belum maksimal dimana hubungan yang terjalin antara *stakeholder* tidak begitu baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa hubungan yang terjadi selama ini; dampak yang terjadi dari hubungan; dan keinginan antara IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data John W. Creswell.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin selama ini antara IKM, pemerintah Kota Malang dan masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung belum menguntungkan atau mutualistik. Hubungan yang terjalin antara IKM dan Pemerintah tidak mutualistik dimana penyebabnya adalah pemerintah tidak aktif dalam pengembangan IKM, minimnya kunjungan dan pendataan, IKM tidak aktif dalam membentuk kelompok atau paguyuban, dan adanya tumpang tindih kepentingan pemerintah dalam pengembangan IKM. Hubungan yang terjadi antara IKM dengan masyarakat selama ini merupakan hubungan yang mutualistik dimana IKM berkontribusi bagi pembangunan wilayah dan masyarakat juga memiliki kontribusi bagi IKM sebagai tenaga kerja dan sarana pemasaran IKM. Sementara itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak mutualistik dimana tidak terjadinya interaksi antar kedua pihak tersebut. Dalam hubungan antara IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya kerukunan dan kontribusi antara IKM dan masyarakat. Dampak negatif dengan terjadinya kesulitan IKM dalam mengembangkan dan mendapatkan pasar yang luas bagi produknya. Dalam penelitian ini juga terdapat keinginan-keinginan dari masing-masing pihak yang dirangkum menjadi sebuah langkah agar tercapainya hubungan mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung.

Kata Kunci: Relasi, Mutualistik, IKM, Malang

SUMMARY

Galih Satrio Pambudi, 2017, **Analysis of the Relation Between Small and Medium Industries (SMI), Local Government and Society in the Development of SMI (Study on Center of SMI The Corn Marning Malang)**, Dr. Mohammad Nuh, SIP, M.Si., Ainul Hayat, S.Pd., M.Si., Brawijaya University. 143 pages + xvi

The relationship that exists between the stakeholders in the development of SMI is the most fundamental in the achievement of common goals. Malang City has a variety of excellent products regional specialties, one of which is marning corn. SMI development is done on the corn marning Malang has not been up to where the relationship between the stakeholders is not so good. This study aims to determine, describe and analyze the relationships that occur during this time; impacts arising from the relationship; and the desire among SMI, Malang government and society in the development of SME marning corn.

This research is a descriptive qualitative approach. The data used are primary and secondary data. The techniques of collecting data through interview, observation and documentation. This research using analytical data that proposed by John W. Creswell.

These results indicate that the relationship over time between SMI, Malang city government and community in the development of SMI marning corn is not profitable or mutualistic. The relationship between SMI and the Government did not mutualistic where the cause is that the government is not active in the development of SMI, the lack of visits and data collection, SMI are not active in the formation of a group or community, and their overlapping interests of the government in the development of SMI. The relationship between SMI and the public has a mutualistic relationship where SMI contribute to the development of regions and communities also have contributed to the SMI as labor and marketing tools SMI. Meanwhile, the relationship between government and society are not mutualistic where no interaction between the two parties. In the relationship between SMI, Malang government and society there are positive and negative impacts. The positive impact of their harmony and contribution between SMI and the public. Negatively impacted by the difficulties of SMI in developing and gain broad market for its products. In this research, there are also the desires of each party are summarized into a step in order to achieve a mutualistic relationship in the development of SME marning corn.

Keyword: Relation, Mutualistic, SMI, Malang

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Relasi Antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan IKM” (Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang). Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mohammad Nuh, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya.

5. Bapak Ainul Hayat, S.Pd., M.Si, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Iwan Siswanto, SH., M.Hum, selaku Kepala Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
8. Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis selama penelitian
9. Bapak dan Ibu Pelaku IKM Marning Jagung Kelurahan Pandanwangi Kota Malang dan Masyarakat yang telah bersedia menjadi narasumber dan membagi ilmu kepada penulis.
10. Bapak Sugiyono dan Ibu Melia Astuti selaku orang tua dan Sylvie Kusumastuti selaku kakak dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta dukungan materi kepada penulis selama penyusunan skripsi.



11. Febriana Syafitri Dewi wanita yang selalu memberikan kasih dan sayang, motivasi, semangat dan waktunya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman semasa kuliah Aditya Hadi, Galang, Afin, Ihya, Ryan, Amel, Fanny, Amanda, Zulkifli, Rahma, Aisyah, dan banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Seluruh keluarga Fakultas Ilmu Administrasi Publik angkatan 2012 yang menjadi teman seperjuangan
14. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	11
B. Hubungan (<i>Relationship</i>) dan Kemitraan (<i>Partnership</i>).....	18
1. Hubungan (<i>Relationship</i>).....	18
2. Kemitraan (<i>Partnership</i>)	21
C. <i>Public Private Partnership</i> (Kerjasama Pemerintah-Swasta).....	25
D. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Dampaknya..	30
1. Industri Kecil Menengah (IKM).....	30
2. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	35
3. Dampak Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).....	38
E. Stakeholder dalam Pengembangan IKM.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	58



1. Gambaran Umum Kota Malang	58
a. Kondisi Geografi	58
b. Kependudukan	61
c. Pemerintahan	62
d. Visi dan Misi Kota Malang.....	64
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....	65
3. Gambaran Umum Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang ...	70
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	73
1. Hubungan yang Terjadi Antara IKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan IKM Selama Ini	73
a. Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marning Jagung dengan Pemerintah Kota Malang	73
b. Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marnig Jagung dengan Masyarakat.....	80
c. Hubungan yang Terjadi Antara Pemerintah Kota Malang dengan Masyarakat	86
2. Dampak Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marning Jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat dalam Pengembangan IKM	88
3. Keinginan dari IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM marning jagung	97
a. Keinginan IKM Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung	97
b. Keinginan Pemerintah Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung.....	100
c. Keinginan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung.....	103
C. Pembahasan dan Analisis Data	105
1. Hubungan yang Terjadi Antara IKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan IKM Selama Ini	105
a. Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marning Jagung dengan Pemerintah Kota Malang	106
b. Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marnig Jagung dengan Masyarakat.....	112
c. Hubungan yang Terjadi Antara Pemerintah Kota Malang dengan Masyarakat	115
2. Dampak Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marning Jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat dalam Pengembangan IKM	119
3. Keinginan dari IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM marning jagung	122
a. Hubungan yang Terjadi Antara IKM Marning Jagung dengan Pemerintah Kota Malang	125

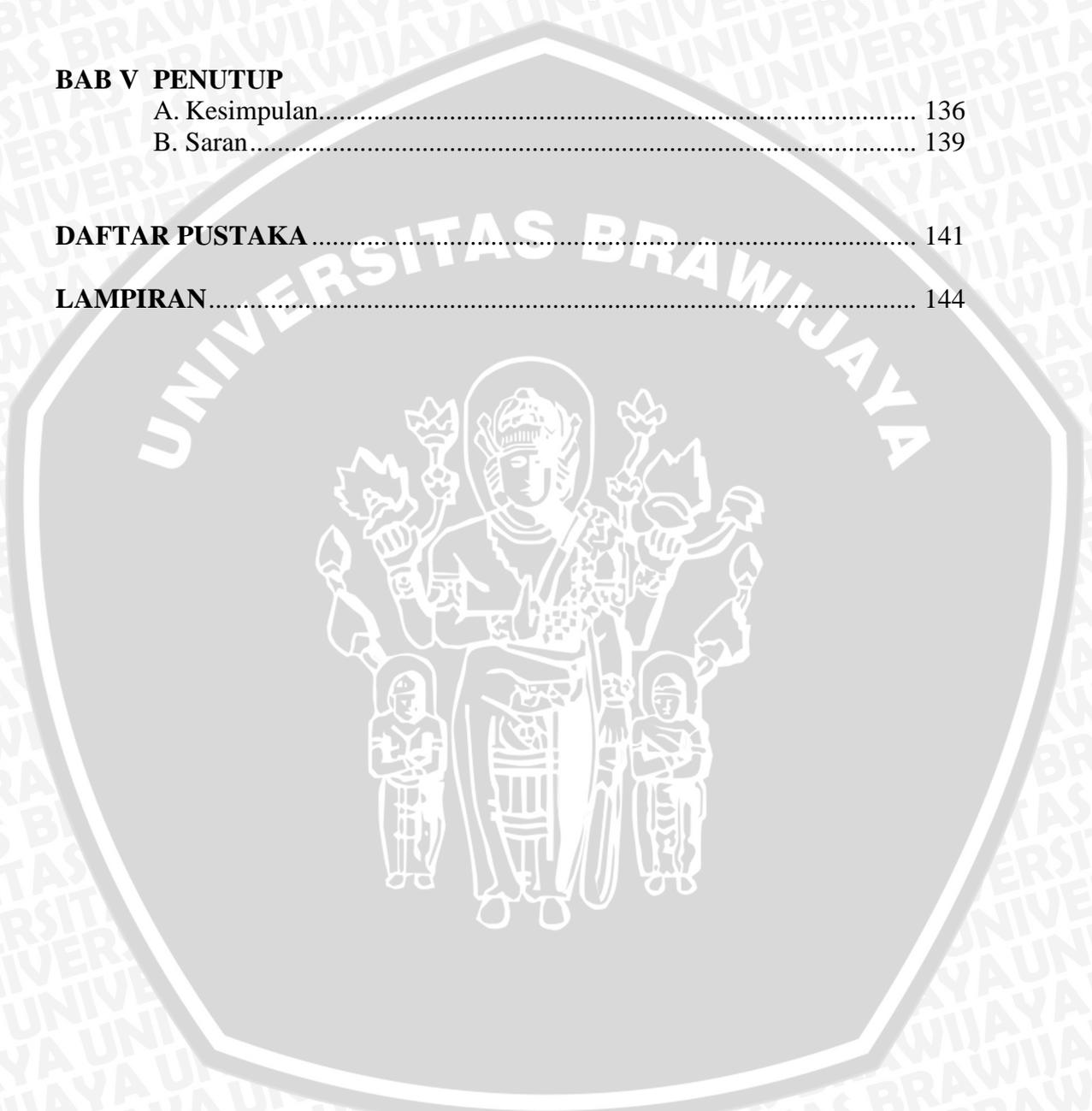
- b. Keinginan Pemerintah Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung..... 128
- c. Keinginan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung..... 130

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 136
- B. Saran..... 139

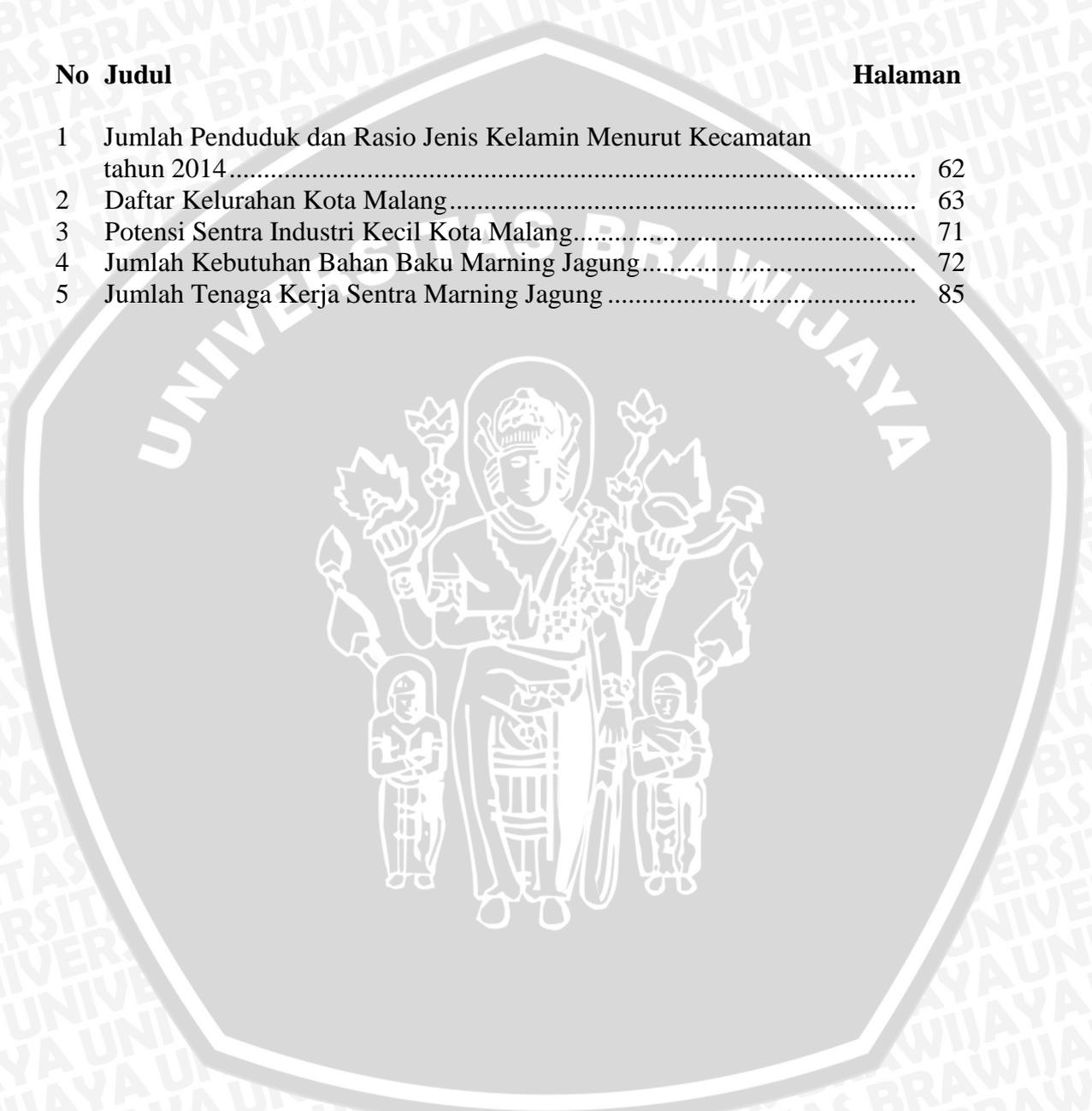
DAFTAR PUSTAKA 141

LAMPIRAN 144



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan tahun 2014.....	62
2	Daftar Kelurahan Kota Malang.....	63
3	Potensi Sentra Industri Kecil Kota Malang.....	71
4	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Marning Jagung.....	72
5	Jumlah Tenaga Kerja Sentra Marning Jagung.....	85



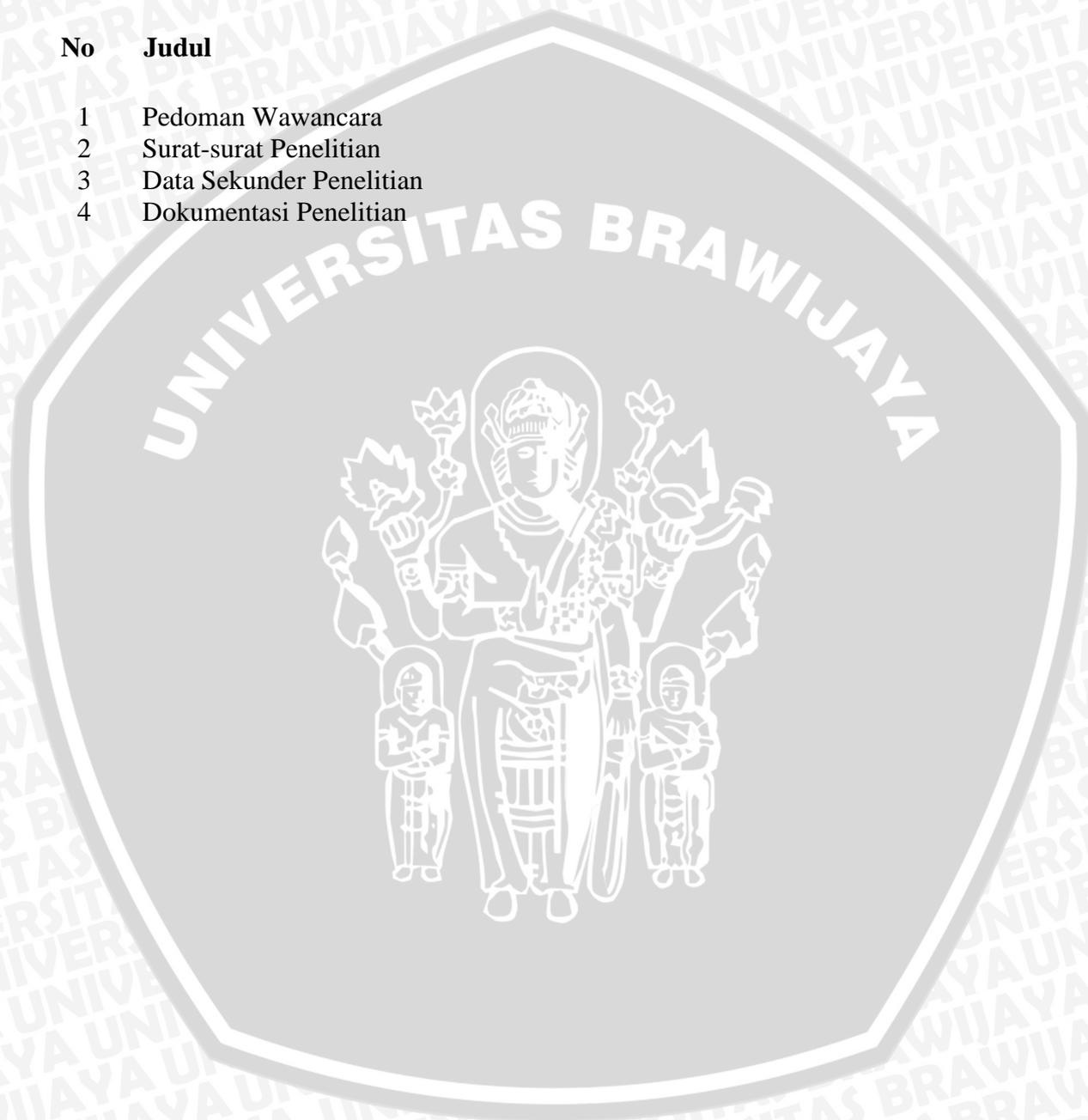
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif Creswell	53
2	Peta Wilayah Kota Malang	59
3	Logo Kota Malang	60
4	Pola Relasi/Hubungan antara IKM Marning Jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Sekitar	118
5	Keinginan dari IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung	133
6	Model Langkah-langkah Agar Tercapai Hubungan Mutualistik dalam Pengembangan IKM Marning Jagung	135



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Pedoman Wawancara
2	Surat-surat Penelitian
3	Data Sekunder Penelitian
4	Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada saat ini terutama industri kecil dan menengah (IKM) dapat digambarkan sebagai salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan sektor industri kecil merupakan penopang perekonomian masyarakat baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan industri kecil dan menengah tersebut menjadi hal yang diutamakan dalam setiap perencanaan pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil dan menengah menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% dari seluruh tenaga kerja yang dimiliki Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil dan menengah (BPS, 2010-2012). Dalam mewujudkan peningkatan perekonomian melalui industri kecil dan menengah (IKM) keterlibatan dari para *stakeholder* sangat diperlukan.

Sesuai dengan konsep *governance* yang paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-

kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Hetifah, 2009:29).

Relasi atau hubungan yang terjalin antara para *stakeholder* di dalam pengembangan IKM merupakan hal yang paling mendasar dalam pencapaian tujuan bersama. Hubungan yang saling menguntungkan dan intensif tentunya menjadi hal yang sangat penting ketika seluruh pihak memahami bahwa peran masing-masing dari mereka mampu menjadikan perekonomian lebih baik dari sebelumnya. Seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dan hubungan antar sesama manusia, dapat digambarkan bagaimana pelaku IKM juga membutuhkan hubungan yang baik terhadap pihak-pihak lain terutama pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sekitar sebagai pendukung dari jalannya produksi dan begitupun hubungan sebaliknya dari ketiga pihak tersebut. Jika dilihat dari masing-masing fungsi peran *stakeholder*, maka fungsi dari pelaku IKM sebagai pelaku produksi, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengolah produk unggulan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara fungsi dari pemerintah sendiri adalah sebagai regulator, pembina, penyedia sarana dan prasarana, serta penyedia kesempatan pemasaran dan perizinan. Sedangkan fungsi masyarakat sekitar sebagai pendukung dari jalannya proses produksi, sebagai tenaga kerja, dan proses perluasan pasar.

Dukungan dari masing-masing *stakeholder* tersebut sangat diharapkan dalam perkembangan IKM di Indonesia. Diperlukan terwujudnya hubungan dan kemitraan (*partnership*) yang saling menguntungkan atau mutualistik antara pemerintah, pelaku IKM, serta masyarakat sekitar. Menurut Ndraha (2011:5)

definisi hubungan pemerintahan adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Sedangkan tujuan suatu kemitraan menurut Sulistiyani (2004:129) adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan pelaku IKM harus menguntungkan satu sama lain dimana pemerintah mempunyai ketergantungan dengan kegiatannya terhadap perkembangan pelaku IKM dan sebaliknya pelaku IKM juga membutuhkan pemerintah di dalam aspek kegiatannya. Sedangkan hubungan pelaku IKM dengan masyarakat sekitar juga sangat penting dan saling terikat dalam hal ketenagakerjaan dan dukungan moral untuk dapat mengembangkan perekonomian di kedua pihak.

Hubungan mutualistik yang terjadi di antara tiga *stakeholder* utama dalam dunia industri kecil bertujuan agar terjadinya perkembangan dalam proses produksi hasil olahan IKM. Keterlibatan ketiga sektor *stakeholder* tersebut menjadi hal penting bagi ukuran keberhasilan pengembangan IKM yang dilakukan selama ini. Tujuan utama pengembangan IKM menurut Dumairy (1996:48) adalah sebagai argumentasi penciptaan lapangan pekerjaan, memiliki keunggulan komperatif dan mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur, dan sebagai loncatan teknologi dengan

kata lain pengembangan industri kecil menengah akan menggunakan teknologi yang lebih.

Setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, seperti halnya Kota Malang merupakan kota yang memiliki banyak Industri Kecil Menengah (IKM) di dalamnya, Kota Malang juga memiliki berbagai produk unggulan daerah terutama dalam produk hasil olahan makanan. Terdapat 11 sentra dan total 624 unit usaha IKM, salah satu produk unggulan di Kota Malang yang diangkat oleh penulis adalah produk olahan marning jagung. Di Kota Malang terdapat sentra pengolahan marning jagung tepatnya di Jalan Simpang Teluk Bayur, kelurahan Pandanwangi Kota Malang. Di wilayah ini terdapat banyak sekali para pelaku usaha kecil menengah yang bergelut di bidang pengolahan yang berbahan dasar jagung terutama marning jagung. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdapat 1 sentra IKM marning jagung yang terdiri dari 11 unit usaha, 52 tenaga kerja, dengan kapasitas produksinya berjumlah 538.980kg (Data Potensi Sentra Kota Malang, Disperindag, 2015).

Dilihat dari data tersebut diketahui bahwa prospek pengolahan produksi marning jagung di kota Malang cukup baik dan dapat menjadi suatu produk unggulan dan menjanjikan bagi para pelaku usaha, masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah sendiri. Tentunya dengan keadaan yang baik dari segi produksi, jumlah usaha, dan tenaga kerja juga mempengaruhi bagaimana proses produksi dari olahan marning jagung tersebut sehingga dikenal oleh pasar secara luas. Di dalam proses pengembangan produksi olahan marning jagung Kota Malang terlibat juga hubungan yang terjalin diantara para *stakeholder* baik

pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun jika dilihat dalam kenyataannya di lapangan, sentra IKM marning jagung di Kelurahan Pandanwangi bisa dikatakan kurang stabil tanpa adanya struktur pendukung yang lengkap diantara para *stakeholder*. Hubungan antara pelaku IKM dengan masyarakat sekitar sangatlah baik, mulai dari tenaga kerja hingga proses pemasaran produk dilakukan oleh masyarakat sekitar. Adanya hubungan saling memenuhi diantara pelaku produksi yang lain, seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Ketimpangan terlihat dari hubungan antara IKM dengan Pemerintah Daerah Kota Malang, dimana hubungan yang terjalin dalam pengembangan IKM tidak begitu baik.

Hubungan yang tidak begitu baik ini bisa terlihat dari hal-hal mendasar di wilayah sentra produksi marning jagung tersebut, mulai dari tidak adanya identitas sentra, seperti papan nama, pembinaan IKM, sosialisasi, pendataan, pelatihan serta bantuan berupa alat maupun pemasaran. Apabila seperti yang disebutkan bahwa marning jagung merupakan produk unggulan dan oleh-oleh khas Kota Malang, seharusnya ada sebuah pengembangan yang intensif agar identitas yang melekat di wilayah tersebut tetap bertahan dan menjadi sebuah produk khas daerah yang berpotensi dan mampu bersaing, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat terus meningkat dan produk olahan marning jagung dikenal oleh masyarakat luas baik sekitar wilayah Malang maupun berbagai wilayah lainnya.

Masalah lain yang timbul dari hubungan antara IKM dengan pemerintah adalah dari jenis kepercayaan satu dengan yang lainnya. dimana masyarakat tidak percaya jika program-program yang diberikan pemerintah mampu

menguntungkan mereka, seperti halnya undangan pembinaan atau seminar tentang produksi, permodalan dari berbagai instansi bank, dan bantuan peralatan produksi. Pelaku IKM dan masyarakat sekitar ragu akan program yang diberikan pemerintah akan merugikan mereka seperti harusnya mengeluarkan biaya tambahan jika mengikuti program. Mereka juga selalu mengandalkan modal yang bersumber dari pribadi dan tidak banyak yang mau mendapatkan suntikan modal dari pihak pemerintah maupun bank. Sementara itu, bantuan peralatan yang sekiranya penting bagi produksi IKM tidaklah selalu terpenuhi oleh pemerintah. Dimana para pelaku IKM marning jagung memilih untuk membeli peralatan mereka sendiri sejak awal mendirikan usaha mereka, karena terkadang alat yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan kapasitas produksi mereka yang sangat besar. Hubungan selanjutnya yang menjadi masalah di lapangan adalah tinjauan dari pemerintah terhadap sentra IKM marning jagung di kelurahan Pandanwangi ini sangatlah minim. Pelaku IKM dan masyarakat sekitar mengakui bahwa tindakan dari pemerintah setempat sangatlah minim dan tidak konsisten. Masalah seperti ini harusnya bisa dihindari dan harusnya ada perbaikan dari pemerintah setempat mengingat tugas pemerintah adalah melayani dan membina masyarakat serta pelaku usaha.

Hubungan antara pemerintah dan rakyat yang kurang harmonis tidak jarang menimbulkan konflik sosial, yang berakibat terhadap pembentukan jarak, sehingga banyak program pemerintah yang terhambat karena tidak adanya kesepakatan. Ketidaktaatan masyarakat bahkan pelaku usaha (*privat*) terhadap kebijakan pihak pemerintah, diantaranya karena pihak pemerintah sendiri tidak

konsisten terhadap penegakkan peraturan perundangan. Hal ini lebih merupakan salah satu penyebab, yang dapat mencuat ke permukaan, dibandingkan penyebab kerugian yang secara eksplisit sering disuarakan oleh masyarakat yang mengalami. Hubungan yang terjalin diantara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang dengan Industri Kecil Menengah (IKM) dan masyarakat di dalam pengembangan IKM marning jagung Kota Malang sangatlah penting sehingga membentuk sebuah hubungan yang saling menguntungkan atau mutualistik. Karena tentunya hubungan saling menguntungkan antara pihak-pihak tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana IKM marning jagung Kota Malang mampu berproduksi serta memasarkan produknya di pasaran luas. Bagaimanakah hubungan yang dilakukan oleh setiap pihak dan bagaimana dampak dalam membangun hubungan yang dinamis dan menguntungkan sehingga mampu menjadikan produk IKM marning jagung Kota Malang sebagai produk yang dapat diandalkan sebagai produk yang bernilai tinggi. Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul *Analisis Relasi Antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengembangan IKM (Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang).*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan yang terjadi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung selama ini?

2. Bagaimanakah dampak hubungan yang terjadi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung?
3. Apa sajakah keinginan dari Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hubungan yang terjadi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan IKM selama ini.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak hubungan yang terjadi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan IKM.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis keinginan dari Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar tercapai hubungan mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung.

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, IKM dan masyarakat dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam mengembangkan dan memasarkan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta sebagai tambahan referensi dan wacana bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema ini.

2. Secara praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah khususnya pada hubungan antar pihak terkait dalam kegiatan pengembangan dan pemasaran, sehingga diharapkan kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, IKM dan masyarakat kedepannya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan kerangka teoritis yang didalamnya membahas landasan teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh penulis. Sehingga mempunyai acuan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan hubungan antara pemerintah daerah, IKM dan masyarakat dalam promosi dan pemasaran produk IKM di Kota Malang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data, analisis data, dan hasil interpretasi analisis data yang diperoleh selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Mengacu pada permasalahan penelitian ini, maka akan dikemukakan beberapa kajian teori sebagai landasan untuk menelaah masalah yang ada dalam rangka mencari solusi pemecahannya. Hal ini penting karena landasan teori merupakan unsur ilmu yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian untuk mencoba menerangkan permasalahan yang terjadi. Sebelum membahas penelitian lebih lanjut, maka perlu diuraikan mengenai landasan teori yang mencakup tentang Administrasi Publik, Hubungan (relationship) dan Kemitraan (Partnership), *Public Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah-Swasta), pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan dampaknya, dan teori stakeholder dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

A. Administrasi Publik

Di dalam kegiatan setiap bentuk organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah pasti berhubungan dengan administrasi. Terdapat dua pengertian administrasi, yakni administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Menurut F.X Soedjadi dalam Indradi (2006:3) “Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai pekerjaan ketatausahaan dan kesekretariatan yang berhubungan dengan surat-menyurat atau korespondensi, soal pencatatan atau dokumentasi, soal pendaftaran atau registrasi soal-soal kearsipan”, sedangkan

menurut S.P Siagian dalam Indradi (2006:8) “Administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya”, sementara itu pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie, 2006:18).

Selanjutnya Corson dan Haris dalam Tjiptoherijanto dan Manurung (2010:111) mendefinisikan mengenai administrasi publik dalam versi lengkap maupun sederhana. Dalam versi sederhana, “*Public administration is he means by which an objective are implemented*”. Sedangkan dalam versi legkap ,

“Public administration is decision making, planning the work to be done, formulating objectives and goals, working with legislature and citizen organization to gain public support and funds for government programs, establishing and revising organization, directing and supervising employees, providing leadership, communicating and receiving communication, determining woek methods and procedures, appraising performance, exercising controls, and others function performed by government excecutive and supervisor.” (Administrasi publik adalah pengambilan keputusan, perencanaan pekerjaan yang harus dilakukan, merumuskan tujuan dan sasaran, bekerjasama dengan legislative dan warga untuk mendapatkan dukungan publik dan dana untuk program-program pemerintah, menetapkan dan meninjau organisasi, mengarahkan dan mengawasi karyaan, memberikan kepemimpinan, berkomunikasi dan menerima komunikasi, menentukan metode dan prosedur kerja, penilaian kinerja, berolahraga kontrol, dan lain-lain fungsi yang dilakukan oleh eksekutif pemerintah dan pegawai)

Dari beberapa pola pemikiran tersebut diatas, maka administrasi publik dapat dijabarkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses kegiatan atau kemampuan kerjasama yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan suatu keputusan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan

mengatur kepentingan yang berkembang di masyarakat, atau administrasi publik dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manajemen, politik, hukum yang berhubungan dengan negara dan masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi publik memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, menurut Tjokroamidjojo dalam Tjiptoherijanto dan Manurung (2010:113-114). Terdapat 3 prinsip utama administrasi publik yakni:

- a. Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi yakni analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera, konsistensi tersebut mencakup: konsistensi antar waktu/generasi, antar sekitar, dan wilayah, antar tingkat pemerintah dan antar unit pemerintahan.
- b. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi
Unsur administrasi yang perlu dikelola adalah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi, tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi public. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan untuk merespon perkembangan eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan perkembangan internasional.
- c. Pengelolaan dinamika administrasi
Dinamika administrasi (*the Dynamic of administration*) meliputi kepemimpinan, koordniasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengatur/pengendalian unsur-unsur administrasi publik menggunakan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Perkembangan administrasi dari waktu ke waktu tidaklah lepas dari adanya unsur administrasi publik, adapun unsur-unsur tersebut tebagi dari unsur

mutlak dan unsur umum (Tusyakdiah 2013:8). Penjelasan dari kedua unsur tersebut antara lain:

1. Unsur mutlak/faktor ilmu administrasi

a. Dua orang manusia atau lebih

Dalam hal ini manusia tidak dapat bekerja sendiri tetapi selalu membutuhkan bantuan dari pihak lain/orang lain

b. Tujuan

Merupakan kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani yang diperjuangkan melalui perbuatan-perbuatan yang nyata agar dapat terpenuhi. Meliputi tujuan jangka panjang, menengah dan pendek.

c. Tugas dan pelaksanaan

Administrasi akan mencapai tujuan jika terwujudnya pembagian tugas antar pihak-pihak yang terlibat.

d. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi bergantung berbagai faktor antara lain:

- 1) Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu
- 2) Sifat tujuan yang hendak dicapai
- 3) Ruang lingkup dan aneka ragam tugas yang hendak dijalankan
- 4) Sifat kerjasama yang dapat dikembangkan dan diciptakan

2. Unsur umum/Anatomi ilmu administrasi

a. Organisasi

Organisasi merupakan unsur pertama yang menjadi wadah penyelenggaraan usaha kerja sama (badan administrasi). Proses mengorganisasi adalah penyusunan rangka dengan membagi dan mengubungkan setiap orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadi kesatuan yang selaras. Termasuk juga tujuan yang hendak dicapai.

b. Manajemen

Manajemen berfungsi dimana diolah seluruh keperluan dan darimana dikelola seluruh kepentingan badan/organisasi, dan kemana seluruh hasil kegiatan disalurkan atau dilaporkan

c. Komunikasi

Merupakan proses penyampaian keterangan dari pengirim informasi kepada penerima informasi yang bertujuan agar tercipta proses kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Kepegawaian

Merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan sumber tenaga manusia yang harus ada pada setiap usaha kerjasama.

Administasi kepegawaian pada pokoknya mempelajari segenap proses penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama. Proses tersebut dimulai dari penerimaan sampai dengan pemberhentian.

e. Keuangan

Merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan mengolah segi-segi pembiayaan sampai pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. Administrasi keuangan mencakup penganggaran belanja (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*auditing*) serta tindakan-tindakan lainnya dalam bidang keuangan.

f. Perbekalan

Merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaian, menyimpan, mengembalikan, merawat, menyingkirkan dan menghapus barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

g. Tatausaha

Merupakan proses menghimpun, mencatat, mengolah, mengirim, dan menyimpang bahan-bahan informasi.

h. Perwakilan atau hubungan masyarakat

Merupakan proses kegiatan mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan internal maupun eksternal.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah diciptakan. Tugas-tugas dan kegiatan yang telah

diciptakan di dalam administrasi publik tentunya juga harus memiliki keunggulan dan keuntungan untuk semua pihak yang terlibat. Hubungan yang saling menguntungkan dari sebuah kegiatan dalam administrasi publik pastinya memiliki hasil yang sangat baik dan memuaskan semua pihak tanpa ada satu pihak pun yang mengalami kerugian.

Selanjutnya, hubungan yang terjalin antara seluruh unsur di dalam administrasi publik haruslah saling menguntungkan atau mutualistik, dengan kata lain tidak ada suatu kebijakan atau kegiatan yang dilakukan dalam lingkup publik merugikan salah satu unsur atau pihak yang terlibat. Di dalam ilmu sains hubungan yang saling menguntungkan dinamakan sebagai simbiosis mutualisme. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani “sym” yang berarti dengan dan “biosis” yang berarti kehidupan. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion.

Hubungan mutualistik atau mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan, hal ini dapat diartikan pihak yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain saling diuntungkan, dan memperoleh keuntungan yang positif dalam kehidupannya (Ritonga, 2001:61-62). Menurut ilmu sosiologi, hubungan mutualisme adalah bentuk kerja sama antar kelompok masyarakat yang bersifat saling menguntungkan. Bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bentuk kerjasama yang menghasilkan keselarasan dan keharmonisan. Hubungan mutualistik menurut Wahid dan Rumadi (2001:26) merupakan suatu hubungan

timbang balik yang saling memerlukan. Sebagai contoh pada hubungan mutualistik adalah tindakan manusia yang baik dan berimplikasi kepada kebijakan pula untuk manusia yang telah berbuat baik. Jenis ini yang seharusnya kita cermati dan pelajari bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan saling menguntungkan dan tidak memberi suatu kerugian.

Hubungan mutualistik adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam ilmu administrasi publik menurut penulis hubungan mutualistik juga dapat berarti sebagai hubungan yang menguntungkan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat yang berada dan secara langsung terlibat dalam sebuah implikasi kebijakan. Hubungan di dalam ilmu administrasi dan pemerintahan juga bisa di sebutkan sebagai kemitraan (*partnership*). Menurut penulis hubungan antara IKM, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pengembangan IKM terhadap konsep mutualistik dalam perspektif administrasi publik, lebih ditekankan dalam intensitas hubungan dari sebuah regulasi atau program pengembangan IKM, sehingga diharapkan dalam kegiatan pengembangan IKM terjadi sebuah hubungan dan kemitraan yang mana dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat atau meminimalisasi masalah yang ada.

B. Hubungan (*Relationship*) dan Kemitraan (*Partnership*)

1. Hubungan (*Relationship*)

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan membutuhkan pertolongan atau

peran serta dari manusia lain atau lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupannya manusia tidak hidup dalam kesendiriannya, manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Manusia diartikan sebagai makhluk sosial karena manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya hubungan atau interaksi ini berbentuk kelompok. Aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial, tercermin dalam kehidupan berkelompok. Manusia selalu berkelompok dalam hidupnya. Berkelompok dalam kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan, bahkan bertujuan. Tujuan manusia berkelompok adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.

Begitu pentingnya sebuah hubungan atau interaksi sosial antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki tujuan, dapat diartikan juga terhadap pentingnya hubungan antar sesama kelompok baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik formal maupun secara non-formal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan atau interaksi diartikan sebagai hal saling melakukan aksi, berhubungan, atau saling mempengaruhi. Jadi, pengertian hubungan atau interaksi sosial adalah hubungan timbal balik (sosial) berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.

Soekanto (2005:67) mengartikan hubungan atau interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan

sosial. Interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya [komunikasi](#), hubungan ataupun [interaksi](#) antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa [interaksi](#) merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya [hubungan](#) sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut hubungan atau interaksi.

Dari penjelasan diatas dapat dihubungkan juga dengan bagaimana hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta sektor privat. Definisi hubungan pemerintahan menurut Ndraha (2011:5) Definisi hubungan pemerintahan adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintahan mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus. Dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik bahkan kesenjangan sosial di masyarakat, hubungan dan interaksi yang baik dari seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat maupun sektor privat seperti pengusaha sangatlah dibutuhkan. Hubungan atau interaksi yang terjalin memiliki tujuan yang harus sama dengan keinginan semua pihak, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu perlu adanya hubungan yang sangat baik, intensif dan konsisten dari pihak-pihak yang terkait. Hubungan yang terjalin dalam setiap kegiatan bisa

juga berupa sebuah kegiatan kemitraan (*partnership*) dan kerjasama. Karena jika hanya terjadi komunikasi saja tanpa adanya kegiatan atau tindakan kemitraan maka tidak akan ada hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan keinginan bersama. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menekankan pada bagaimana pemerintah mampu untuk menjalankan sebuah kerjasama dengan *private sector* (swasta) untuk memperlancar sebuah kegiatan yang sudah direncanakan agar berjalan dengan baik, kemitraan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menonjolkan produk unggulan daerah ke pasar luas. Kemitraan (*partnership*) memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, saling menguntungkan dan memiliki manfaat bagi setiap pihak yang bermitra

2. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan dijelaskan oleh Sulistyani (2004:129) dapat dilihat dari perspektif etimologis yang di adaptasi dari kata *partnership* yang berasal dari kata *partner*. *Partner* dalam hal ini berarti “pasangan, sekutu, jodoh, atau komponen”, sedangkan *partnership* berarti persekutuan atau perkongsian. Berangkat dari hal tersebut, kemitraan dapat berarti sebagai suatu bentuk ikatan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua belah pihak atau lebih
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- c. Ada kesepakatan
- d. Saling membutuhkan

Kemudian Sulistiyani (2004:129) menerangkan bahwa tujuan suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Agar sebuah kemitraan menjadi kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat yang dihasilkan maka memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan visi atau misi berbeda tetapi saling mengisi dan melengkapi secara fungsional.

Menurut Hafsa (2000:63) dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara konkret adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja, serta
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Inti dari Kemitraan (*partnership*) adalah berbagi kekuasaan, tanggungjawab, dan pencapaian. *Partnership* dapat memberikan kontribusi yang

baik dalam pemerintahan. Menurut Ali Farazman dalam Domai (2011:85) dalam membangun *partnership* harus memperhatikan dua kondisi, yakni:

- a. Kondisi *Start-up* primer berada dalam bentuk: interdependensi dan konvergensi target dan akomodasi atau rekonsiliasi tujuan. Peningkatan rekognisi interdependensi antara pemerintah dan aktor lain dalam masyarakat (bisnis sektor privat, organisasi non pemerintah, dan organisasi sistem kooperatif) adalah sebuah pondasi esensial dalam membentuk *partnership* efektif.
- b. Kondisi proses untuk membentuk dan melestarikan *partnership* efektif dalam *governance*:
 1. Kepercayaan mutual dan keyakinan yang baik dalam area *partnership* yang terfokus.
 2. Rekognisi batasan setiap pihak.
 3. Klarifikasi dan *recording*-target dan strategi.
 4. Tujuan phasing proyek *partnership* dalam detail terukur.
 5. Menghasilkan regulasi konflik dan mekanisme resolusi konflik.
 6. Memfokuskan pada persoalan, masalah dan target/tujuan *partnership*.
 7. Mengidentifikasi dan menunjukkan persoalan dan prosedur legal.
 8. Proteksi kepentingan dan hak pihak ketiga.
 9. Dukungan yang cukup dan fasilitas kontrol yang meningkatkan *partnership*.
 10. Koordinasi internal dan eksternal lewat proses, *network* dan mekanisme yang formal dan informal.
 11. Tata cara, manajemen, dan keahlian yang tepat dan cukup bagi pengembangan kebijakan, analisis dan implementasi/administrasi dalam *governance* berbasis *partnership* dirasa dibutuhkan.

Menurut Sulistiani dalam Domai (2010:97-98) mengemukakan model kemitraan berdasarkan fenomena biologis meliputi:

- a. Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya.
- b. Kemitraan mutualistik, merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

- c. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, yaitu dua pihak atau lebih dalam melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan model kemitraan atas fenomena hubungan kerjasama antar organisasi meliputi:

- a. *Subordinate union of partnership*, kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sheering* dan peran atau fungsi yang seimbang.
- b. Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, misi, organisasi, status atau legalitas.
- c. Kemitraan dengan melalui kerjasama linear, dalam konteks ini kemitraan tidak membedakan besaran atau volume atau kekuatan para pihak yang bermitra, dalam hubungan kemitraan ini terjadi secara linear.

Menurut Wibisono (2007:103), terdapat tiga prinsip penting kemitraan yakni:

1. Kesetaraan atau keseimbangan. Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuatan semata, namun hubungan saling menghargai dan saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja.
3. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak.

Dari hal tersebut diatas maka kemitraan (*Partnership*) dapat disimpulkan sebagai istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok untuk dapat mewujudkan suatu tujuan tertentu. Dalam esensi kerjasama maupun kemitraan (*partnership*) dilakukan untuk pemenuhan tujuan yang ingin dicapai, hal penting dalam kerjasama maupun kemitraan (*partnership*) yakni bahwa dengan adanya kerjasama dan kemitraan (*partnership*) haruslah dapat memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat, oleh karena itu dalam kerjasama ataupun kemitraan haruslah menguntungkan pihak-pihak yang terlibat atau dengan kata lain tidak hanya sebagai alat untuk menuju sebuah tujuan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Kemitraan juga dapat dilakukan dalam suatu kegiatan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dimana pihak pelaku usaha mampu bermitra dengan pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar agar kegiatan proses industri dapat berjalan dengan lancar dan mampu bermanfaat bagi pihak yang terlibat. Karena diketahui bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) dapat berkembang dengan luas karena adanya peran serta dari berbagai pihak di sekitarnya.

C. *Public Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah-Swasta)

Pada hakekatnya pengertian mengenai *public private partnership* adalah keterlibatan pihak swasta dalam kerjasama dengan pemerintah untuk mengurus kepentingan publik. Bentuk kerjasama itu bisa dilakukan melalui kontak yang

disepakati bersama. Namun untuk mengikat kerjasama tersebut tidak mudah. Karena mengurus kepentingan publik (*public interest*) ruang lingkup sangat luas dan membutuhkan biaya yang sangat besar., sedang pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, di lain pihak, swasta tidak mau mengeluarkan biaya jika tidak menguntungkan, maka perlu dicari skema kerjasama yang saling menguntungkan. William J Parente dari USAID Enviromental Services Program dalam Istianto (2011:37), menjelaskan tentang *public private partnership* yang mengatakan sebagai berikut:

“an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which:

- (a) Private party undertakes government function for specified period of time,*
- (b) The private party receives compensation for performing the function, directly,*
- (c) The private party is liable for the risks arising from performing the function and,*
- (d) The public pacilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party.”*

Sesuai definisi tersebut dapat diterjemahkan secara bebas bahwa *public private partnesrship* adalah perjanjian atau kontrak antara pemerintah dengan sektor swasta yang anara lain; a) sektor swasta mengambil alih fungsi pemerintah selama periode waktu yang ditentukan, b) sektor swasta menerima kompensasi dari pelaksanaan fungsi tersebut baul langsung maupun tidak langsung, c) sektor swasta dibebani timbulnya risiko dari pelaksanaan fungsi tersebut, d) adapun fasilitas publik, tanah atau sumber-sumber daya yang lain dapat dialihkan atau dapat digunakan oleh sektor swasta. Pengertian PPP diatas menunjukkan adanya keseimbangan kepentingan disatu pihak sektor swasta mengambil alih fungsi

pemerintah dan disamping menerima kompensasi juga menanggung beban atas resiko dari pelaksanaan fungsi tersebut, dipihak lain pemerintah menjamin kebutuhan yang diajukan oleh sektor swasta untuk menjalankan kegiatan usahanya secara *fasible*.

Selanjutnya penjelasan tentang PPP secara lebih mendalam disampaikan oleh John Black dan Kam Tara dalam Istianto (2011:38), mengatakan bahwa

“Describe a government “service or private business venture which is funded and operated in partnership of government and one or more private sector companies. These schemes are sometimes referred to as PPP. In some types of PPP, the government uses tax revenue to provide capital for investment, with operations run jointly with the private sector or under contract (see contracting out). In other types (notably the private finance initiative), capital investment is made by the private sector on the strength of a contract with government to provide agreed services. Government contributions to a PPP may also be in kind (notably the transfer of existing assets). In projects that are aimed at creating public goods like in the infrastructure sector, the government may provide a capital subsidy the form od a one-time grant, so as to make it more attractive to the private investors. In some other cases, the government may support the projrct by providing revenue subsidies, including tax breaks or by providing guaranteed annual revenues for a fixed period.”

“PPP digambarkan sebagai pelayanan publik dan swasta dapat dibiayai dan dioperasikab dalam kerjasama antara oemerintah dengan satu atau lebih perusahaan swasta. Skema ini kadang-kadang dirujuk sebagai PPP. Sebenarnya terdapat beberapa tipe PPP, yaitu antara lain; pemerintah menggunakan pajak pendapatan untuk disediakan sebagai menanamkan modalnya sedangkan pelaksanaannya atau operasionalnya bekerjasama dengan perusahaan swasta dibawah kontrak (*see contract out*). Tipe yang lain yaitu bahwa inisiatif pembiayaan (*finance*) dari sektor swasta untuk menanamkan modalnya dengan dukungan atau kekuatan kontrak sedangkan oemerintah menyediakan berbagai persetujuan dan pelayanan yang dibutuhkan swasta. Seperti mialnya pemerintah memberikan kontribusi secara lebih baik dengan mengalihkan beberapa aset yang dimiliki pemerintah kepada swasta. Dalam proyek-proyek bantuan untuk meningkatkan barang publik (*public goods*) seperti pembangunan sektor infrastruktur, pemerintah menyediakan subsidi modal dalam bentuk “*one-time grant*”, untuk membuat lebih atraktif bagi para investor swasta. Adapun dalam peristiwa lain, pemerintah mendukung suatu proyek

melalui penyediaan subsidi pendapatan, termasuk didalamnya keringanan pajak atau menyediakan jaminan pendapatan dalam periode yang tetap.”

Masih terkait dengan pembahasan mengenai pengertian *public private partnership*, Savas dalam Istianto (2011:40) juga menjelaskan secara lebih detail tentang PPP yaitu sebagai berikut:

“dengan Kemitraan Pemerintah-Swasta. Proyek-proyek infrastruktur semakin sering dibangun melalui kemitraan pemerintah-swasta (PPP). Namun tidak seperti pada umumnya istilah dalam terminology PPP, dimana pemerintah atau negara memerlukan modal intensif guna membangun onfrastruktur yang tahan lama, dengan menggunakan model kontrak kombinasi yaitu; fasilitas infrastruktur yang dibangun yang kebanyakan dibayai oleh swasta kemudian dioperasikan oleh badan swasta dibawah waralaba dengan kontrak atau sewa jangka panjang. selama duapuluh atau 99 tahun yang dalam pembangunan meliputi; pembangunan, operasi, pemeliharaan dan biaya modal. Model PPP tersebut biasanya cirinya pembangunan proyek jalan, jembatan, dan air minum, jaringan pipa, serta pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi dalam perkembangannya pembangunan penjara, stadion, sekolah dan pembangunan kota juga dibangun melalui metode ini, seperti proyek-proyek pembangunan ekonomi perkotaan”.

Setelah diuraikan pengertian PPP, selanjutnya mengenai kunci sukses pelaksanaan PPP menurut Hanh Lee Griffin dalam Istianto (2011:64) mengatakan ada beberapa aspek kunci sukses PPP yaitu sebagai berikut:

- a. *Consensus on wath to build, funding shares, method of payment*;
Mengembangkan konsensus atau kesepakatan seta pembagian pendanaan dan metoda pembayaran;
- b. *Legal authority*; Pelaksanaan PPP memiliki kewenangan yang kuat dari aspek legalitas;

- c. *Stabel revenue stream*; dalam pelaksanaan PPP terjamin akan kelangsungan pendapatan yang stabil;
- d. *Funding firewalls, private sector trust*; yang melaksanakan PPP adalah sektor swasta yang dipercaya atau kredibel, terutama dari kesiapan pendanaannya;
- e. *Appropriate allocation of risk*; resiko sedapat mungkin diatur secara seimbang antara kedua belah pihak;
- f. *Cost and schedule control*; pembiayaan selalu terkontrol melalui penjadwalan yang ketat;
- g. *Experienced project management*; yang melaksanakan PPP adalah dilakukan oleh manajemen proyek yang berpengalaman;
- h. *Product orientation not process orientation*; dalam pelaksanaan PPP selalu berorientasi pada hasil atau produksi bukan orientasi pada proses;
- i. *Focused agency mission*; pelaksanaan PPP selalu fokus pada misi organisasi;
- j. *Clear decision making authority*; kewenangan dalam membuat keputusan selalu tuntas.

Adapun tujuan dari pelaksanaan *public private partnership* (Istianto, 2011:76) antara lain:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui penerahan dana swasta; artinya bahwa kerjasama pemerintah dengan swasta, jika dalam kontrak telah disepakati pendanaan dari swasta maka dalam proyek yang dibangun agar berjalan dengan lancar harus ada jaminan dari sektor

swasta bahwa pendanaan akan terus berkelanjutan dan tidak akan kekurangan ditengah perjalanan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu kepercayaan dan kredibilitas sektor swasta menjadi pilihan paling utama.

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat, artinya bahwa dengan PPP dilaksanakan melalui tender atau pelanggan umum, maka sektor swasta yang bekerjasama dengan pemerintah disamping merupakan pilihan, juga mampu menjaga mutu, pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih efisien.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur, artinya mengingat kedua belah pihak antara pemerintah dengan sektor swasta, terikat dalam kontrak kerjasama dalam membangun infrastruktur, maka keduanya akan saling menjaga komitmen dan konsisten terhadap tanggung jawab masing-masing, sehingga dalam pengelolaan dan pemeliharaan penyediaan infrastruktur tersebut, sektor swasta tetap menjaga kualitas dan pemerintah memberikan jaminan terhadap pengembangan bisnisnya.
4. Mendorong prinsip “pakai bayar” dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemakai, artinya mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna.

D. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Dampaknya

1. Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri kecil selama ini masih mengalami keaburan definisi dan batasan dikalangan masyarakat. Sementara acuan dan penggolongan yang biasanya dipakai adalah menekankan pada aspek jumlah tenaga kerja dan modal. Berdasarkan definisi dan batasan yang dipaparkan diatas, bahwa industri kecil adalah usaha perorangan atau rumah tangga maupun badan yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 9 orang, mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta dan nilai penjualan pertahun Rp. 1 Milyar atau kurang.

Untuk mempertegas definisi tentang industri kecil di Indonesia, Saleh (1986) menjelaskan terdapat tiga industri kecil yaitu:

- a. Industri lokal, yaitu kelompok jenis industri yang menguntungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas, sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak, dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangan sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.
- b. Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokkan atau kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari pada kategori yang pertama. Sehingga peranan pedagang atau pengumpulan menjadi cukup menonjol.
- c. Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah mempunyai kemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang canggih. Pasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok ini relatif tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan

sebagai bagian dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi. Dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Dengan adanya pengelompokan tersebut akan mudah mendeskripsikan peranan dari industri kecil. Pemantauan pengembangan industri juga harus diperhatikan untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif berdasarkan klasifikasi dan tujuannya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas industri yang terkelompok atau terbagi menjadi sentra industri kecil yang produknya merupakan produk lokal yang unggulan. Di Kota Malang terdapat dua pembagian tentang jenis usaha, yang pertama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan yang kedua jenis usaha berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pengertian UMKM adalah usaha kecil menengah yang hanya menjual barang/produk dan jasa tidak melalui tahapan proses pembuatan. Sedangkan pengertian dari IKM adalah suatu industri kecil menengah yang menciptakan suatu produk/barang yang melalui berbagai tahapan berupa proses pengolahan bahan mentah, menjadi bahan setengah jadi, dan hingga menghasilkan produk-produk yang siap untuk dipasarkan.

Di Indonesia sendiri ada banyak kerancuan antara pengertian UMKM dengan IKM, ada yang menjadikan satu pengertian dimana IKM merupakan bagian dari UMKM, terdapat juga dimana UMKM terpisah pengertiannya dengan IKM, pembagian wilayah definisi yang masih rancu ini menimbulkan beberapa pengertian. Banyak yang mengartikan IKM merupakan bagian dari UMKM yang masuk ke dalam UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM dalam bab I (ketentuan umum) pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha

produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Dengan kriteria ini, menurut UU tersebut, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta; usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 milyar; dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta

hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 500 milyar (Tambunan, 2012:16).

Sedangkan menurut Bank Indonesia batasan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

1. **Usaha mikro.** (SK. Direktur BI No.31/24//Kep/DER tanggal 5 Mei 1998).

Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry.

2. **Usaha kecil.** Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. **Usaha Menengah** (SK Dir. BI No.30/45/Dir/Uk tgl 5 Jan 1997). Omzet tahunan < 3 Milyar Asset = Rp. 5 milyar untuk sektor industri Asset = Rp.600 juta di luar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing

Namun peneliti lebih memilih pengertian dan istilah pada Industri Kecil Menengah (IKM) dikarenakan pembagian jenis usaha berupa IKM dan UMKM terdapat di wilayah Malang Kota mempunyai lembaga tersendiri yang menaunginya dan terpisah secara kepentingan. Dimana IKM merupakan naungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sementara itu UMKM merupakan naungan tersendiri dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Selain itu, peneliti juga didukung oleh pengertian Industri Kecil Menengah (IKM) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dalam UU no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Dijelaskan lebih rinci bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut penulis, industri kecil dan menengah (IKM) merupakan suatu kegiatan industri yang mana mengolah bahan baku yang berawal mentah menjadi bahan yang setengah jadi atau bahan jadi, dengan kriteria usaha tertentu mulai dari pendapatan, aset, tenaga kerja serta produk yang diolah dan dihasilkan. Di dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku IKM banyak pihak-pihak yang mendukung, membantu dan menjalankan kegiatan produksi mulai dari perizinan, pembinaan, tenaga kerja maupun masyarakat sekitar. Pihak-pihak tersebut biasa disebut dengan stakeholder atau pihak-pihak pemangku kepentingan dalam proses kegiatan.

2. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Kata pengembangan memiliki banyak pengertian dimana termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan, mengembangkan” (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:414). Kemudian Ndraha (1983:184) mengungkapkan bahwa istilah pengembangan berasal dari kata “kembang” yang berarti meningkatkan atau menambahkan sesuatu yang sudah ada baik kualitatif maupun kuantitatif, jadi ada sesuatu yang bertambah. Kemudian menurut Pamudji (1985:7) juga mengemukakan bahwa pengembangan adalah sebagai suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan dimiliki nilai yang tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau manfaat.

Lebih jelas lagi Kuncoro (2007:364) mengartikan pengembangan industri kecil adalah:

“cara yang dinilai besar perannya dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri berskala kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.”

Jadi pengembangan industri merupakan upaya atau suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk meningkatkan suatu nilai fungsi dalam memproses atau mengolah barang agar mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mampu mendorong pembangunan suatu daerah khususnya daerah pedesaan. Adapun pengembangan industri kecil dan usaha mikro, kecil,

dan menengah menurut Kartasasmita dalam Pradana (2014:98) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

- a. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, disamping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
- b. Peningkatan akses pasar yang meliputi suatu *spectrum* kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan.
- c. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
- d. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi menjamin terjadinya pemerataan sosial (sosial equity).
- e. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Sementara itu, di dalam pengembangan industri kecil menengah memiliki tujuan yang secara umum dijelaskan menurut Dumairy (1996:48) sebagai berikut:

- a. Sebagai argumentasi penciptaan lapangan pekerjaan;
- b. Memiliki keunggulan komperatif dan mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
- c. Sebagai loncatan teknologi dengan kata lain pengembangan industri kecil menengah akan menggunakan teknologi yang lebih canggih niscaya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pengembangan industri kecil menengah pada dasarnya merupakan sebuah cara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik dimana didalamnya termasuk juga peningkatan mutu sumber daya manusia yang ada. Di dalam

pengembangan industri kecil dan menengah diharapkan dapat membantu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan. Sementara itu upaya pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Menurut Syarif (1991:3) bahwa bentuk-bentuk pengembangan meliputi:

1. Bentuk Internal:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- b. Pembinaan usaha
- c. Bantuan promosi
- d. Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha

2. Bentuk Eksternal:

- a. Menyediakan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentral usaha pada sentra-sentra industri kecil
- b. Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Bentuk-bentuk pengembangan ini sangat diperlukan untuk menunjang potensi industri kecil dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, permodalan, teknologi, dan perluasan pasar sehingga mampu berkembang dan menjadikan industri kecil sebagai produk unggulan daerahnya.

3. Dampak Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Pengertian yang lain adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan orang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi (KBBI Online, 2016).

Menurut Tugiman (1989:45) "Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen". Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu ;

a. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal

yang baik, suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Serta positif merupakan keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Di dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) pastinya memiliki dampak tersendiri, baik dampak positif maupun negatif. Berikut adalah dampak yang timbul dari pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) menurut penulis:

Dampak Positif Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM):

- a. Membuka lapangan pekerjaan
- b. Meningkatkan kualitas produksi
- c. Menambah modal usaha
- d. Menambah pengetahuan produksi bagi pelaku usaha
- e. Menambah perluasan pemasaran produk
- f. Meningkatkan teknologi produksi, dsb.

Dampak Negatif Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM):

- a. Buruknya hubungan antara IKM dengan masyarakat sekitar
- b. Terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar wilayah produksi IKM
- c. Kesulitan IKM dalam perawatan peralatan bantuan produksi
- d. Ketidakmampuan IKM mengelola teknologi baru dalam produksi, dsb.

E. Stakeholder dalam Pengembangan IKM

Istilah *stakeholder* atau yang biasa disebut pemangku kepentingan menurut Allen dan Kilvington (2004) dalam Suharto (2015:125) merupakan “orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah kebijakan, program atau proyek, sedangkan menurut Freeman (1984) dalam Putra (2005:30) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu”.

Menurut Kuncoro (2005:8) bahwasanya *stakeholder* adalah semua individu, kelompok dan organisasi yang mempunyai kepentingan (*stake*) pada kinerja organisasi, termasuk pemilik (pemegang saham pada perusahaan publik), karyawan, pemasok, masyarakat umum, dan lain-lain. *Stakeholder* juga dapat diartikan sebagai individu atau kelompok, baik didalam maupun diluar

perusahaan, yang mempunyai kepentingan terhadap hidup dan matinya perusahaan dan sekaligus dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan kata lain *stakeholder* adalah pemegang kepentingan.

Sedangkan dalam UNDP (United Nation Development Program) para *stakeholder* yang berperan sebagai pelaku *good governance* yaitu:

1. Negara atau Pemerintah (*government*)
 - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
 - b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
 - c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*
 - d. Menegakkan hak asasi manusia
 - e. Melindungi lingkungan hidup
 - f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public
2. Sektor Privat (*privat sector*)
 - a. Menjalankan industri
 - b. Menciptakan lapangan kerja
 - c. Menyediakan insentif bagi pegawai
 - d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
 - e. Memelihara lingkungan hidup
 - f. Menanti peraturan
 - g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
 - h. Menyediakan kartu kredit bagi pengembangan UKM dan IKM
3. Masyarakat Madani (*civil society*)
 - a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
 - b. Mempengaruhi kebijakan publik
 - c. Sebagai sarana *check and balance* pemerintah
 - d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
 - e. Mengembangkan sumber daya manusia
 - f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat (Sinambela, 2006),

Overseas Development Administration (ODA) mengelompokkan stakeholders menjadi 3 bagian (dalam Putra, 2005:31-34) sebagai berikut:

1. Stakeholders Utama (primer)

Stakeholders utama merupakan stakeholders yang memiliki kepentingan langsung dalam sebuah kebijakan. Stakeholders utama ini ditempatkan sebagai proses pengambilan keputusan. Stakeholders utama antara lain:

- a. Masyarakat dan tokoh masyarakat yang terkait dengan kebijakan seperti yang terkena dampak dari adanya kebijakan.
 - b. Pihak manajer publik yang terdiri dari lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi keputusan.
2. Stakeholders Pendukung (sekunder)
- Stakeholders pendukung yang merupakan bagian dari stakeholder perantara atau tidak memiliki kepentingan secara penuh terhadap suatu kebijakan melainkan karena adanya kepedulian (*concern*) sehingga turut mempengaruhi sikap masyarakat yang terkena kebijakan dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder pendukung yang antara lain:
- a. Lembaga (aparatur) pemerintah dalam suatu wilayah yang tidak memiliki tanggung jawab langsung.
 - b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu kebijakan tetapi tidak memiliki kewenangan langsung dalam memiliki kewenangan langsung dalam mengambil suatu keputusan.
 - c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau organisasi yang bergerak di bidang sesuai dengan concern kebijakan atau dampak dari kebijakan tersebut.
 - d. Perguruan tinggi yang termasuk dalam kelompok akademisi, memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
3. Stakeholders Kunci
- Stakeholders kunci merupakan bagian dari *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal untuk mengambil sebuah keputusan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan instansi.

Berdasarkan pengelompokan *stakeholder* diatas, bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengembangan sentra IKM Marning jagung di Kota Malang yaitu: (1) Stakeholders Utama adalah masyarakat Kota Malang dalam ruang lingkup produksi marning jagung; (2) Stakeholders Pendukung yaitu pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) Marning Jagung di Kota Malang sebagai pelaksana produksi, dan (3) Stakeholders Kunci adalah Pemerintah Daerah Kota Malang dalam hal ini khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan secara legal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai cara untuk menentukan arah kegiatan dalam penelitian. Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada BAB I, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam membahas status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2014: 6) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku di lapangan yang dapat diamati. Pendekatan ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui dan menganalisis mengenai permasalahan dan keinginan dari pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku

IKM marning jagung, serta masyarakat sekitar sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan mutualistik di antara mereka.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014: 12) penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Dengan demikian, fokus penelitian merupakan batasan data penelitian sehingga memudahkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, fokus penelitian membuat penulis berfokus pada permasalahan yang diteliti dan tidak keluar dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus penelitian adalah pemilihan pokok permasalahan awal untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun fokus penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Hubungan yang terjadi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung selama ini.
 - a. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Pemerintah Kota Malang
 - b. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Masyarakat
 - c. Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kota Malang dengan masyarakat.

2. Dampak hubungan yang terjadi antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung.
 - a. Dampak positif : kerukunan antar IKM dan masyarakat, saling berkontribusi, dan pengembangan wilayah yang terlaksana dengan baik.
 - b. Dampak negatif : pemasaran produk semakin sulit, sulitnya penerimaan bantuan dan berkurangnya jumlah IKM
3. Keinginan dari Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung.
 - a. Keinginan IKM agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM
 - b. Keinginan pemerintah agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM
 - c. Keinginan masyarakat agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kota Malang. Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau peristiwa yang di dalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian

sehingga peneliti mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian situs dalam penelitian ini adalah :

1. Sentra IKM Marning Jagung Kelurahan Pandanwangi Kota Malang.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian tersebut didasari oleh keingintahuan dari penulis untuk mengetahui tentang hubungan yang terjalin antara pelaku IKM marning jagung, pemerintah khususnya Disperindag Kota Malang, serta masyarakat sekitar yang terlibat. Dikarenakan IKM marning jagung merupakan sebuah sentra dan dari keadaan dilapangan ditemukan bahwa belum adanya kelompok/paguyuban IKM yang terbentuk, program pengembangan IKM tidak maksimal dan tidak banyak diketahui khalayak ramai meskipun memiliki potensi produksi marning jagung yang cukup besar.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk dapat memperoleh data yang sebenarnya dengan tepat, perlu dilakukan proses pengumpulan data-data tersebut berasal dari narasumber yang tepat dan dapat dijadikan pegangan akan keakuratan hasil penelitian nantinya. Menurut Arikunto (2006: 129), sumber data terdiri dari *Person*, *Place*, dan *Paper*. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi 3 macam, yakni:

1. *Person*, yakni sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan. Dalam penelitian ini *person* meliputi anggota Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bagian Pembinaan dan

Pengembangan Industri Makanan dan Minuman, Pelaku sentra IKM marning jagung Kelurahan Pandanwangi, serta Masyarakat.

2. *Place*, yakni sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Hal ini dapat berupa lokasi penelitian yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Sentra IKM marning jagung Kelurahan Pandanwangi.
3. *Paper*, yakni sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini *paper* meliputi data mengenai Kota Malang, table-tabel data seperti sentra IKM, kependudukan kota Malang, bahan baku IKM, serta gambar peta dan logo Kota Malang.

Pada umumnya, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yang terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer dapat berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Pelaku IKM marning jagung Kelurahan Pandanwangi, maupun Masyarakat.
2. Data Sekunder, yaitu semua data yang secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Daerah Kota Malang, dll.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis data tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer dengan sumber data yang terdiri dari:

- a. Bagian Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
 - b. Pelaku IKM marning jagung Kelurahan Pandanwangi.
 - c. Masyarakat setempat.
2. Data sekunder dengan sumber data:
 - a. Arsip-arsip yang dimiliki data primer yang berhubungan dengan hubungan mutualistik antara IKM, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan IKM.
 - b. Data lain yang menunjang. Misalnya buku, koran, dokumentasi, internet, jurnal, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan sumber data sekunder lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1993:130). Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menyesuaikan dengan objek penelitian dan berlandaskan teori dan

pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Pengamatan dilakukan dengan mengamati dan mencatat pada apa yang ditemukan pada situs penelitian yaitu pada Sentra IKM Marning Jagung Kelurahan Pandanwangi dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pengamatan yang dilakukan memiliki tenggat waktu selama sebulan dengan rentan waktu dua kali dalam seminggu., dalam setiap pengamatan peneliti biasa mengamati selama satu sampai dengan dua jam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:157). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal. Di dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) narasumber, terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, pelaku IKM marning jagung, dan Masyarakat sekitar Jl. Simpang Teluk Bayur Kelurahan Pandanwangi. Berikut merupakan daftar narasumber penelitian:

- a. Bapak Iwan Siswanto, SH., M.Hum., selaku Kepala Sub Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Disperindag Kota Malang.
- b. Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang
- c. Pelaku IKM Marning Jagung Kota Malang, diantaranya Bapak Fauzi, Bapak Juwahir, Bapak Supriadi dan Bapak Indra

- d. Masyarakat sekitar Jl. Simpang Teluk Bayur, diantaranya Bapak Harjo dan Ibu Hasanah

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang meliputi dokumen atau arsip-arsip yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian. Semua tersebut dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan tahun 2014 Kota Malang, daftar kelurahan di Kota Malang, potensi sentra industri kecil Kota Malang, data jumlah kebutuhan bahan baku marning jagung, dan data jumlah tenaga kerja sentra IKM marning jagung

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2009:4) mengemukakan bahwa “instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri”. Jika tidak memasukkan peneliti sebagai intrumen penelitian, sangat tidak mungkin sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, sedangkan instrumen penunjangnya adalah:

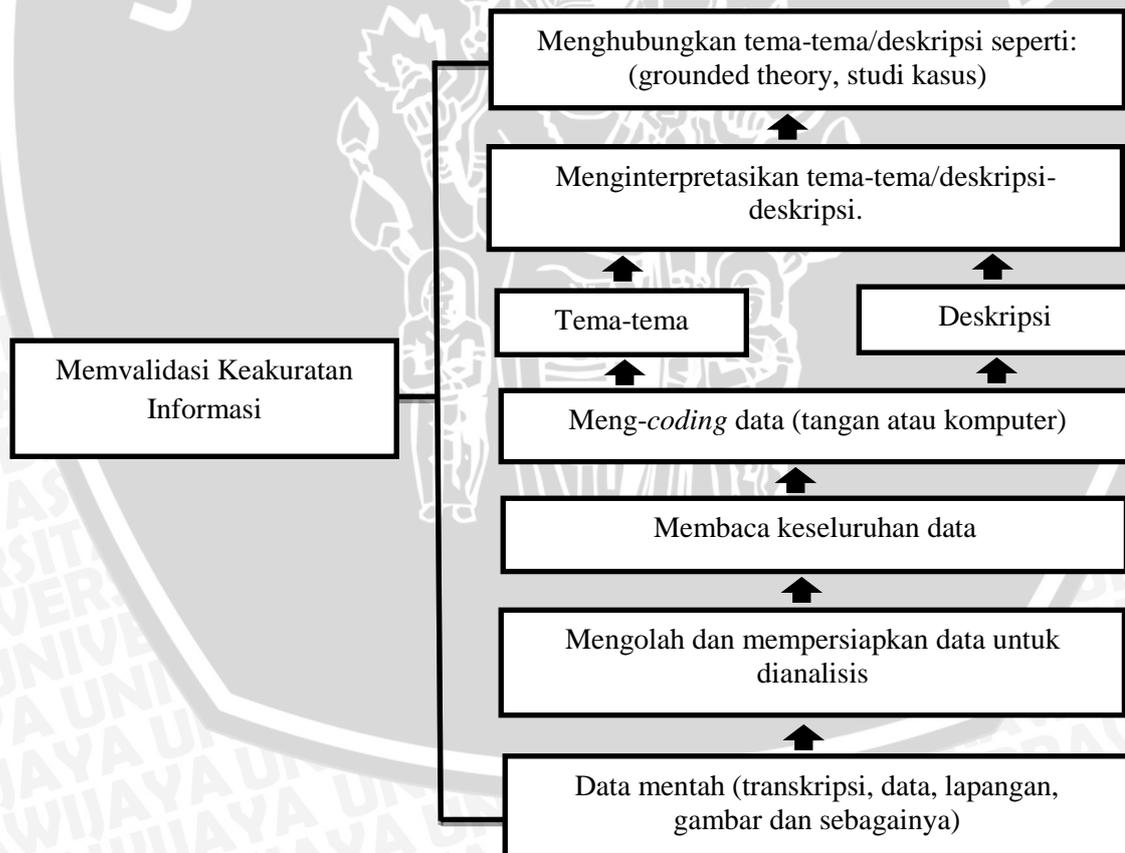
1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.

2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.
3. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan/pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
4. Peralatan teknis, digunakan peneliti berupa perlengkapan alat tulis seperti bolpoin, penghapus, penggaris, *note book*. Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera dan alat perekam untuk melakukan *check list* kearsipan dan membantu proses observasi di lapangan

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-*analisis* berdasarkan objek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Peneliti berlandaskan pada pernyataan Cresswell (2012:274) yang mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dan dengan teknik pengumpulan data bervariasi seperti

observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kelebihan pada peneliti untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan. Penelitian ini menggunakan analisis data Creswell yang penulis anggap mampu menerjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi sebuah informasi, selain itu juga dianggap sebagai teori baru. Creswell (2012:27) memberikan pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Lebih jelasnya dijabarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1: Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif Creswell

Sumber: (Creswell, 2012: 27) Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penjelasan gambar:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi, wawancara, mengopi literatur, mengetik data lapangan, memilah dan menyusun data yang ada serta relevan yang berkaitan dengan hubungan antara IKM, pemda, dan masyarakat dalam pengembangan IKM di kawasan sentra IKM marning jagung kota Malang.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas dan penuturan informasi itu. Pada tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai hubungan yang terjadi antara IKM, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat, paragraf, atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasan yang benar-benar berasal dari informan (disebut istilah *in vivo*). Penulis memilah data berdasarkan fokus penelitian, yaitu hubungan yang terjadi antara IKM, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dampak dari

hubungan yang terjadi; dan keinginan-keinginan dari IKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang hubungan antara IKM, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan IKM marning jagung.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini disajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini meliputi pembahasan kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterhubungan antar tema. Para peneliti kualitatif juga bisa menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan ini.
6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari ramalan peneliti.

Dalam analisis data yang dikembangkan oleh Ceswell tidak didapati langkah untuk mencari sebuah kesimpulan atau benang merah setelah adanya interpretasi data hasil dari penelitian, untuk itu peneliti menambahkan sebuah analisis yang dikembangkan oleh Spredley sehingga muncul sebuah kesimpulan atau benang merah di dalam menganalisa penelitian ini. Terdapat empat tahapan proses analisis data dalam penelitian yang dikemukakan oleh Spredley dalam Sugiyono (2013:255) yaitu:

1. Analisis Domain (*Domain Analysis*). Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh melalui pertanyaan *grand* dan *minitour*. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian yang selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.
2. Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*). Domain yang telah dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus.
3. Analisis Komponensial (*Componential Analysis*). Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (*contrast question*).
4. Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*). Mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan kedalam tema/judul penelitian. Analisis ini

digunakan untuk mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Penemuan benang merah tersebut maka akan dapat tersusun situasi sosial/objek yang sebelumnya masih gelap menjadi lebih jelas dan terang.

Setelah dijelaskan dalam metode analisis data yang dikemukakan Spredley, peneliti hanya menggunakan metode terakhir yaitu analisis tema kultural untuk mengetahui benang merah atau kesimpulan dari hasil interpretasi data atau pemaknaan data yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode analisis data Creswell. Mencari hubungan diantara domain atau data yang sudah diinterpretasikan/dimaknai sebelumnya mengenai relasi atau hubungan yang terjadi di dalam pengembangan IKM, dampak yang timbul dan keinginan agar tercapainya hubungan yang menguntungkan/mutualistik. Kemudian setelah itu dicari sebuah hubungan antara interpretasi/pemaknaan sebelumnya sesuai dengan judul penelitian sehingga ditemukan sebuah benang merah yang dapat menjelaskan dari keseluruhan data yang disajikan dalam penelitian. Benang merah tersebut merupakan sebuah kesimpulan dan saran yang dikemukakan peneliti sebagai sebuah kejelasan dan hasil terang mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Kondisi Geografi

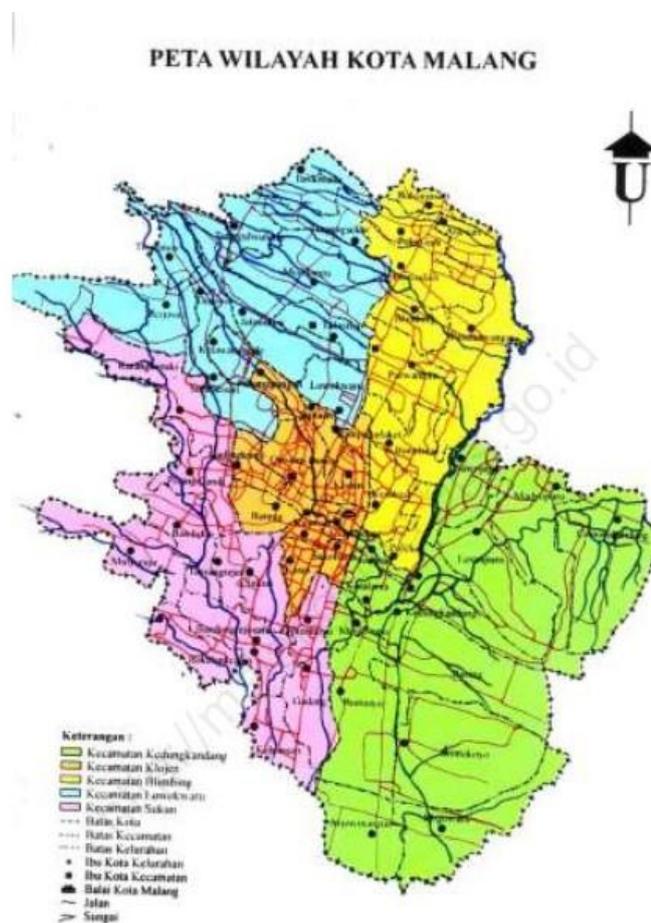
Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $25,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim,

musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Adapun peta wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Peta Wilayah Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id

Kota Malang memiliki semboyan yakni “MALANG KUCECWARA” yang berarti *Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar* (malangkota.go.id). Semboyan tersebut tercantum pada logo Kota Malang sebagai berikut:



Gambar 3: Logo Kota Malang
Sumber: malangkota.go.id

Arti dari keterangan logo tersebut adalah:

- Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia
- Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran
- Hijau adalah kesuburan
- Biru Muda berarti Kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa
- Segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b. Kependudukan

Kota Malang merupakan kota pendidikan, dimana warga yang bertempat di Malang bukan hanya warga asli Kota Malang melainkan juga para mahasiswa yang merupakan warga luar kota untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut membuat Kota Malang menjadi salah satu kota dengan penduduk terpadat di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak warga pendatang. Menurut hasil Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang tahun 2014 sebanyak 845.973 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 416.982 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 428.991 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,2. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 2010–2014 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,31 %. Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 192.066 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Sukun 188.545 jiwa, Kecamatan Kedungkandang 183.927 jiwa, Kecamatan Blimbing 176.845 jiwa dan Kecamatan Klojen 104.590 jiwa. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.845 jiwa per km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.611 jiwa per km².

Tabel 1: Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan tahun 2014

Kecamatan <i>Districts</i>	Penduduk (orang) <i>Population</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
	Kedungkandang	91,474	92,453	
Sukun	93,632	94,913	188,545	98.7
Klojen	49,779	54,811	104,590	90.8
Blimbing	87,581	89,264	176,845	98.1
Lowokwaru	94,516	97,550	192,066	96.9
Jumlah/ <i>Total</i>	416,982	428,991	845,973	97.2

Sumber: *Dokumen BPS Kota Malang tahun 2015*

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah sebanyak 845.973 jiwa dengan sebanyak 416.982 penduduk laki-laki dan 428.991 penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Selisih antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki adalah sebanyak 12.009 jiwa.

c. Pemerintahan

Kota Malang merupakan sebuah wilayah administrasi yang dipimpin oleh seorang Walikota dan di bantu oleh Wakil Walikota beserta jajaran lembaga dibawahnya. Kota Malang memiliki 5 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 57 kelurahan.

Tabel 2: Daftar Kelurahan Kota Malang

Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang
Klojen	Blimbing	Tasikmadu	Ciptomulyo	Kotalama
Rampal Celaket	Balearjosari	Tunggulwulung	Gadang	Mergosono
Samaan	Arjosari	Merjosari	Bandungrejosari	Bumiayu
Kidul Dalem	Purwodadi	Tlogomas	Sukun	Wonokoyo
Sukoharjo	Polowijen	Dinoyo	Tanjungrejo	Buring
Kasin	Pandanwangi	Sumbersari	Pisang Candi	Kedungkandang
Oro-oro Dowo	Bunulrejo	Ketawanggede	Bandulan	Lesanpuro
Bareng	Kesatrian	Jatimulyo	Karangbesuki	Sawojajar
Gading Kasri	Polehan	Tunjungsekar	Mulyorejo	Madyopuro
Penanggungan	Jodipan	Mojolangu	Bakalan Krajan	Cemorokandang
Kauman	Purwantoro	Tulusrejo	Kebonsari	Arjowinangun
		Lowokwaru		Tlogomas

Sumber: malangkota.go.id (data diolah penulis)

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 menetapkan TRIBINA CITA KOTA MALANG:

1. Kota Pelajar / Kota Pendidikan
2. Kota Industri
3. Kota Pariwisata

d. Visi dan Misi Kota Malang

(1) VISI

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

(2) MISI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
6. Membangun kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
7. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.
9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk penetapan peraturan Walikota yang tertuang dalam

Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum;
 - 3) Subbagian Penyusunan Program;
- c. Bidang Perindustrian Agro dan Kimia , terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan Minuman;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pertanian dan Kehutanan;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia.
- d. Bidang Perindustrian ILMETA dan IATT, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri logam dan Mesin;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka;

- 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Elektronika dan IATT
(Industri Alat Transportasi dan Telematika).
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;
 - 2) Seksi Distributor dan ekspor - Impor ;
 - 3) Seksi promosi
- f. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Konsumen;
 - 2) Seksi Pengawasan barang Beredar dan Jasa;
 - 3) Seksi Kemetrologian.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris sedangkan untuk Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dimana masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.
- Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Agro dan Kimia.
- Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) mempunyai tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT)
- Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan.
- Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen.

Sistem dan prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terangkum dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Nomor : 188.45/87/ 35.73.311/2013 tentang Standard Operasional

Prosedur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Standard Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja dan bertujuan antara lain;

1. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintah;
2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;

Manfaat dari SOP lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi antara lain:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin akan dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standard kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

3. Gambaran Umum Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang

Pada kelurahan Pandanwangi terdapat satu kampung yang bernama Terongdowo atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Simpang Teluk Bayur, dimana terdapat banyak produsen emping atau marning jagung. Sentra industri marning jagung telah ada secara turun-temurun sejak tahun 1970-an di kawasan tersebut. Simpang Teluk Bayur tepatnya di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing

Kota Malang, luas wilayah Kelurahan Pandanwangi sebesar 3.586.000 m² dengan kepadatan penduduk 157 km/jiwa. Jarak Pusat Pemerintahan Kelurahan dengan Kecamatan hanya 2 km dan 7 km jarak Pusat Pemerintahan Kelurahan dengan Kota. Secara geografis Kelurahan Pandanwangi berada di ketinggian 444 mdpl dengan suhu rata-rata 27°C. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2016, data potensi sentra industri kecil menengah di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Potensi Sentra Industri Kecil Kota Malang

No	Bidang Usaha	Unit Usaha	Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi	Kapasitas Produksi	
					Jumlah	Satuan
1	Kerajinan Rotan	23	76	1,727,937,000	272,016	buah
2	Tempe/ Keripik Tempe	309	793	35,736,757,000	9,100,820	Kg
3	Marning Jagung	11	72	3,110,087,000	538,980,000	Kg
4	Krecek	4	20	935,195,000	563,721	Kg
5	Gerabah	23	65	380,498,000	1,527,600	unit
6	Keramik	46	218	3,556,250,000	170,000	unit
7	Mebel kayu	43	294	14,755,448,000	12,842	unit
8	Sanitair	14	90	300,000,000	27,000	buah
9	Kompur Sumbu	32	500	1,809,500,000	996,000	buah
10	Kerajinan Gips	16	48	24,000,000	120,000	buah
11	Pakaian Jadi	24	113	335,000,000	33,000	dusin
12	Sikat Ijuk	3	5	28,770,000	36,000	biji
13	kue basah	46	124	2,913,568,333	6,646,236	bh
14	raket	30	163	407473000	467000	bh
		624	2,561	66,020,483,333		

Sumber: Data Disperindag Kota Malang 2016

Dari data tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 14 sentra di kota Malang dengan salah satunya adalah sentra ikm marning jagung. Terdapat 11 unit usaha industri marning jagung, dengan memiliki 72 tenaga kerja, nilai investasi sebesar Rp. 3.110.087.000 serta kapasitas produksi sebesar 538.980.000 kg per tahunnya. Bahan baku untuk memproduksi emping atau marning jagung adalah jagung. Jagung yang digunakan adalah jagung local yang dipasok dari berbagai wilayah seperti Tulungagung, Kediri, Madiun, Kabupaten Malang sesuai dengan persediaan yang ada serta dengan harga yang fluktuatif. Berikut adalah jumlah kebutuhan bahan baku dan pendukung produksi marning jagung di simpang Teluk Bayur rata-rata per tahunnya:

Tabel 4: Jumlah Kebutuhan Bahan Baku Marning Jagung

No.	Jenis	Volume	Satuan	Nilai (Rp.)
1	Jagung	156.000	Kg	499.200.000
2	Minyak Goreng	215.374	Kg	1.873.750.320
3	Garam	6.864	Kg	11.668.800
4	Bawang	3.604	Kg	108.120.00
5	Seasoning	951	Kg	6.411.000
6	Cabe	1.147	Kg	34.170.000
7	Plastik	4.742	Kg	170.138.000
8	Gula	39.936	Kg	409.344.000
9	Gamping	37.440	Kg	149.760.000
10	Stiker	635.918	Biji	3.454.152.000
11	Kardus	2.964	Kg	177.840.000

Sumber: Disperindag Kota Malang Tahun 2013

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Hubungan yang terjadi antara IKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan IKM selama ini.

Untuk dapat menyusun sebuah hubungan yang mutualistik antara IKM marning jagung, pemerintah kota serta masyarakat yang berada di sekitar sentra marning jagung Kelurahan Pandanwangi Kota Malang maka lebih baiknya kita mengetahui tentang hubungan yang terjadi selama ini dari ketiga elemen yaitu IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang, dan Masyarakat sekitar.

a. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Pemerintah Kota Malang

Dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) terjadi sebuah hubungan antara IKM dengan Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hubungan yang terjalin bisa saja berupa pelatihan, pembinaan, undangan seminar, maupun pendataan yang dilakukan oleh Disperindag. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari disperindag sendiri itu terhadap IKM atau pelaku usaha di Kota Malang termasuk kecil menengah itu ya salah satu contohnya itu paling mengadakan pelatihan, sosialisasi, temu usaha, hibah. Jika pelatihan itu kalau makanan dan minuman biasanya tentang desain kemasan. Mereka itu paling lemah masalah desain kemasan, kita masih kalah dibandingkan dengan kota-kota lain. Pernah kita mengadakan kegiatan itu temu usaha antara pelaku usaha yang ada di Kota Malang dengan pelaku usaha yang ada di Bandung. Kalau masalah rasa kita itu menang, tapi kalau masalah kemasan kalah kita. Fungsinya diadakan temu usaha itu agar

pelaku usaha yang ada di Kota Malang itu melek. Mereka itu anggapannya gini “halah aku seperti ini saja sudah laku”. Padahal jika di kemas secara bagus itu bisa dipasarkan sampai keluar Malang, bahkan bisa di ekspor. Jadi yang penting itu kemasan.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Desain kemasan memang mampu menjadi daya tarik tersendiri dari sebuah produk, namun untuk memiliki sebuah desain kemasan yang bagus dan menarik tentunya juga mengeluarkan modal yang lebih besar lagi karena biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Fauzi pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

”Tapi disini kan kendalanya kalau kemasan terlalu bagus itu biayanya juga mahal. Terus pembeli disini tidak beli bungkusnya, tapi beli isinya. Ini saja sudah termasuk kemahalan mas. Satu bungkus marning jagung itu sudah 8.000, kalau dihitung plastik dan stiker merk sudah 1.000 sendiri. Jadi sudah termasuk kemahalan” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Mengenai hubungan yang terjalin antara disperindag dengan pelaku IKM marning jagung dirasakan oleh pelaku IKM sangat kurang mendapatkan perhatian dari Disperindag, dari hal sosialisai, pemasaran, pelatihan, maupun pembinaan yang diberikan. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Juwahir pelaku IKM marning jagung yang mengemukakan bahwa:

”Tidak pernah ada bantuan mas, kosong disini. Gak ada kok mas. Hanya mungkin penyuluhan aja tentang produksi seperti apa. Kalau pemasaran juga gak ada, kita masarkan sendiri. Kalau perindustrian gak ada bantuan masalah mesin atau alat-alat produksi. Hanya dulu saja saya ngurus izin itu, tapi ya karena di persulit jadinya saya males wes mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Iwan Siswanto, SH., M.Hum., selaku Kepala Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Kalau bantuan alat ke marning belum ada. Untuk sampai sekarang itu bantuan alat itu ke sentra kripik tempe yang sudah pernah. Jadi ke marning belum sama sekali. Jadi kita belum sentuh masalah marning, kita cuma data aja. Karna setiap tahun itu bisa lebih dan berkurang pelaku usaha yang ada. Karena selama ini kita belum ada data pelaku usaha marning, jadi baru tahun 2013 itu dianggarkan. Sebelumnya kita belum pernah menyentuh marning sama sekali” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 1 November 2016 pukul 11.00 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzi sebagai pelaku IKM Marning jagung yang mengatakan bahwa:

”Enggak pernah mas, tapi kalau pelatihan Cuma strategi pemasaran tapi itupun tidak ada solusi mas. Dari umkm kota malang. Tidak pernah ikut pelatihan lainnya mas. Dinas itu seperti pilih-pilih mas. Jadi ada yang sudah kenal dengan orang dinas dan sering main-main kesana. Itu biasanya langsung dikasih alat atau bungkusan begitu saja mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Sering mas kalau diundang seminar, kita menyesuaikan juga dengan waktu. Kadang kalau tidak sibuk produksi ya datang. Tapi kalau dari Disperindag belum pernah berkunjung kesini mas. Kalau yang dari luar kota ada, dari Jakarta, Lombok, NTB pernah kesini. Mereka studi banding produk yang kita hasilkan. Untuk dinas mungkin pertanian mas yang datng tapi tidak sering, ya hanya ngantarkan tamu saja.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa pelaksanaan pengembangan yang dilakukan terhadap IKM marning jagung hanyalah bersifat formal saja, pelaku IKM dapat dikatakan berjalan sendiri dalam pemenuhan

kebutuhan produksinya tanpa tersentuh langsung oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak aktif dalam melakukan pengembangan kepada para pelaku IKM seperti adanya pembinaan, pelatihan, pemasaran, serta pemberian bantuan secara berkala. Sedangkan itu terdapat tumpang tindih dalam kepentingan pemerintah di dalam pengembangan IKM, dimana tidak hanya dinas Perindustrian dan Perdagangan saja yang melakukan hubungan dengan IKM, tetapi terdapat dinas lain seperti dinas UMKM dan Koperasi serta dinas Pertanian.

Hubungan yang terjalin antara IKM dan pemerintah dapat juga dilihat dari kunjungan yang dilakukan pemerintah terhadap para pelaku IKM marning jagung, kunjungan pemerintah bisa berupa pendataan dan sosialisasi. Namun hal yang terjadi bahwa kunjungan yang dilakukan sangat minim sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Marning jagung merupakan salah satu sentra yang ada di Kota Malang. Kota Malang pernah ada kegiatan yaitu masalah data-data sentra termasuk marning jagung ini, dan dilakukan tahun 2013 dan belum update. Data IKM di kota malang itu kan banyak, jadi harus berurutan dan blm sempat update tahun-tahun berikutnya. kalau hubungan yang kontinyu di marning belum ya. Cuma karna kita sudah melakukan pendataan tentang marning, ketika ada tamu untuk melihat kita bisa antarkan kesana. Tapi kalau kita sentuh masalah bantuan dan lainnya belum sama sekali.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Mengenai kunjungan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku IKM, hal ini juga disampaikan bapak Juwahir Sebagai pelaku IKM marning jagung yang menyampaikan bahwa:

“Ada orang dinas kesini, tapi hanya mengantarkan tamu saja tapi langsung pulang meninggalkan tamunya disini. Seharusnya kan tamunya juga harus ada pendampingan dari dinas, tapi biasanya ditinggal sama orang dinas tamunya di sini. Jadi terkadang saya dan tamunya juga bingung harus ngapain lagi, karena memang yang banyak tau adalah orang dinasnya, kalau saya kan hanya produksinya saja. Maunya saya tuh ya mas, industri kan ini punya nya siapa, siapa yang pegang, nah tolong di tanyakan apa saja yang masih menjadi kebutuhan dan apa yang kurang, jadi diperhatikan mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Fauzi sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah tau mas ada orang dinas kesini, sama sekali tidak pernah dengar. Terus orang-orang sini enggak terlalu butuh orang dinas mas. Berdiri sendiri, meskipun pemerintah gak ikut campur ya gak ada masalah. Malah orang-orang dinas misalnya menurut orang sini ya ruwet mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari hal tersebut diatas bahwa adanya ketidakharmonisan dalam hubungan yang terjalin antara para pelaku IKM dengan pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kunjungan pihak pemerintah dalam hal ini Disperindag Kota Malang untuk terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk perhatian dan pengumpulan data secara berkala terhadap pelaku IKM marning jagung. Penyebab lainnya karena adanya anggapan dari pelaku IKM bahwa mereka mampu menjalankan usaha industrinya sendiri dengan mandiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, bahkan mereka menilai bahwa jika pemerintah ikut di dalam proses produksi akan menjadi tambah rumit.

Hubungan yang terjalin di antara dua elemen ini tidak hanya dilihat dari aktif atau tidaknya peran pemerintah dalam terjun langsung kepada pelaku IKM, namun bisa dilihat juga dari hal sebaliknya, dimana pelaku IKM marning jagung

juga harus aktif di dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya bukan karena rutin yaa, jadi dari pelaku usahanya sendiri. Terkadang seperti ini, mereka bentuk kelompok atau paguyuban lalu mereka buat proposal. Misalkan proposal itu minta tolong untuk diadakan pelatihan atau minta tolong IKM diberikan bantuan alat. Jdi dari mereka nya sendiri yang aktif, rata-rata seperti itu. Jadi kita malah berfikir kalau mereka masih membutuhkan seperti sosialisasi atau alat dan sebagainya, jadi kita tahu. Terkadang kalau kita tidak terjun sendiri kan kita tidak mengerti. Jadi karna mereka aktif dan di kripik tempe ada paguyubannya, jadi mereka kalau ada keluh kesah butuh sesuatu mereka sampaikan ke kami.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Kemudian ditambahkan kembali oleh Bapak Iwan Siswanto, SH., M.Hum., selaku Kepala Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Iya betul, jadi mereka itu kurang gereget. Mereka itu kurang, tapi ketika kita melakukan kegiatan pelatihan seperti desain kemasan, tidak Cuma kripik tempe saja yang kita undang, tapi berbagai macam pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di Kota Malang, ya termasuk pasti kita undang 3 atau 4 pelaku usaha dari marning jagung. Biasanya pak Samsul dengan usaha Sofia kita undang. Ada lagi pak supeno dan banyak lainnya, cuma saya tidak tahu nama pemiliknya, contohnya firdaus dan saya tidak tahu nama pemiliknya.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 1 November 2016 pukul 11.00 di kantor Disperindag Kota Malang)

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Fauzi sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Apa ya mas. Saya gak mengharapkan begitu mas. Ya enakan begini saja mas. Orang-orang sini kan males-males mas. Umpama diajak ikut seminar atau pameran dengan orang kelurahan, itu di bawa produk kita mas dan dikenalkan dengan pemilik usahanya juga. Tapi Cuma gitu aja, kelanjutannya gak ada. Memang saat seminar dan pameran laku produk

kita, tapi setelah itu gak ada yang tanya dan gak ada kelanjutannya gitu lah mas. Jadi ya sudah saat ada pertemuan pelaku usaha itu ya Cuma ketemu dan mau tau rasanya saja, gak kepingin melebarkan sayap gitu mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Indra sebagai pelaku IKM manring jagung yang mengatakan bahwa:

“Oh gak ada mas paguyubannya. Dulu pernah mas bikin paguyuban, tapi oaring-orang kampung sini yang sulit. Soalnya mereka modal individu, dan beda-beda harga jualnya. Jadi mau diajak kompak ya sulit mas pelaku usaha disini. Kecuali kelompok saya sendiri karena memang produksinya jadi satu dengan saya.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pelaku IKM juga tidak memiliki keaktifan di dalam menjalin hubungan dengan pemerintah dimana para pelaku IKM lebih memilih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pelaku IKM lainnya dan membentuk suatu kelompok atau paguyuban sehingga sulit dalam mendapatkan perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah. Karena pemerintah memberikan perhatian dan bantuan kepada para pelaku IKM jika mereka memiliki kelompok atau paguyuban yang aktif meminta kepada pemerintah. Sehingga pemerintah mampu mendengar dan mengetahui keluhan serta kekurangan yang dialami oleh pelaku IKM melalui proposal yang seharusnya disampaikan oleh kelompok atau paguyuban kepada pemerintah.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan, baik di dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang maupun di wilayah sentra IKM manring jagung, selama observasi berlangsung peneliti tidak menemukan adanya kegiatan pemerintah maupun bantuan alat yang terdapat di

wilayah tersebut yang bertujuan untuk pengembangan IKM, peneliti juga merasakan tidak adanya wakil pemerintah yang berkunjung atau datang ke wilayah sentra IKM marning jagung selama penelitian berlangsung. Sementara itu, dari kegiatan yang dilakukan IKM, tidak ditemukan adanya kelompok atau paguyuban yang menaungi kegiatan dari seluruh proses produksi marning jagung, baik tempat perkumpulan IKM maupun papan nama mengenai kelompok atau paguyuban IKM marning jagung tidak ditemukan selama observasi berlangsung.

Dari hasil wawancara diatas, maka hubungan yang terjadi antara IKM dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kurang aktif dalam pengembangan IKM marning jagung
2. Minimnya kunjungan dan pendataan dari pemerintah
3. Pelaku IKM tidak aktif dalam pembentukan kelompok atau paguyuban
4. Tumpang tindih kepentingan dan pembinaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Dinas

b. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Masyarakat

Dalam setiap proses produksi suatu industri kecil menengah (IKM) tentunya memiliki hubungan atau interaksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah kegiatannya. Bukan saja dalam hal tenaga kerja, tetapi juga apa yang bisa diberikan IKM agar bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Hubungan yang terjalin baik tentunya mampu memperlancar proses produksi yang

dilaksanakan IKM. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Kalau masyarakat sekitar ini responnya baik, hanya kalau masyarakat sini sudah terbiasa dengan produksi marning disini, makanya jadi ciri khas satu wilayah disini. Mungkin jika ada masyarakat yang anaknya belum bekerja bisa dipekerjakan. Karena tenaga kerja juga masyarakat sekitar mas. iya seperti acara RW ya ikut andil juga mas semua.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Mengenai kontribusi pelaku IKM yang aktif di dalam pembangunan wilayah sekitar juga dikemukakan oleh Bapak Suwardi sebagai Pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah gak ada masalah dengan warga mas. Termasuk disini orangnya saling bermasyarakat. Seperti membangun makam, jalan kampung, langgar dan masjid itu juga pelaku usaha yang membangun bersama-sama masyarakat. Kalau ada yang butuh bantuan ya kadang di bantu dengan kita juga mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simoang Teluk Bayur)

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Juwahir Sebagai pelaku IKM marning jagung yang menyampaikan bahwa:

“Oh iya hubungannya baik. Gak ada masalah. Meskipun bersaing, sehat ataupun gak sehat tetap rukun disini mas. Dengan semua masyarakat ya dekat semua mas. Malah justru rukun. Disini baik sekali mas ikatannya, misalkan ada sumbangan apa-apa ya dikasih. Contohnya masjid Al-Hikmah yang besar disini, itu gak sampai 1 tahun udah selesai kok pembangunannya mas tanpa minta dana dari luar. Jadi orang sini meskipun masih cemburu sosial karena sama-sama dagang juga, tapi kalau antar sesama masyarakat ya rukun mas saling membantu.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat yang terjadi, tenaga kerja yang dipekerjakan oleh para pelaku IKM marning jagung juga berasal dari masyarakat sekitar atau tetangga terdekat. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Supriadi sebagai Pelaku IKM marning jagung yang mengemukakan bahwa:

“Tenaga kerja yang ada ini ya anak-anak sini saja, orang-orang sekitar. jadi misalkan ada tetangga juga yang anaknya belum bekerja, bisa kita tarik untuk bekerja disini, jadi kita sama-sama bantu saja mereka yang sedang susah cari kerja. Disini jumlahnya Cuma 6 orang. Satu drum 2 orang jadi ada 3 drum totalnya. Setiap drum bisa berisi 9 kwintal jagung mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simoang Teluk Bayur)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Harjo sebagai tenaga kerja dalam proses produksi IKM marning jagung yang menyatakan bahwa:

“Iya benar mas, saya sudah sekitar 10 tahun bekerja di olahan marning ini. ya Alhamdulillah bisa betah mas, karena dekat juga dengan rumah. Hubungannya selama ini ya baik, saya sebagai tenaga kerja juga diperlakukan dengan baik, sebagai masyarakat sini juga merasakan manfaatnya lah mas dari kontribusi pelaku usaha nya sendiri, mulai dari acara kampung sampai pembangunan masjid disini terbantu mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 12.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari hal tersebutkan diatas tergambar bahwa hubungan yang terjalin antara pelaku IKM dengan masyarakat sekitar sangat baik dan rukun. Tidak hanya hubungan bermasyarakat saja, namun juga kontribusi yang diberikan pelaku IKM terhadap masyarakat juga dapat dirasakan manfaatnya yang sangat besar dimana pemenuhan kebutuhan sarana kampung terbantu dengan adanya pelaku IKM di sekitar jl. Simpang Teluk Bayur.

Selain hubungan yang terjalin dan kontribusi yang diberikan antara pelaku IKM dengan masyarakat sekitar, keseimbangan terhadap lingkungan sekitar juga

sangat diperhatikan oleh pelaku IKM agar hasil dari proses produksi baik berupa hasil matang atau limbah tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Kalau limbah enggak berbahaya mas, malah masyarakat sering meminta limbahnya di alirkan ke area persawahannya supaya mengairi tanaman jagungnya. Limbahnya ini bermanfaat mas, jadi untuk limbah ada yang langsung di buang ke sungai, ada yang di alirkan ke tanaman-tanaman. Limbahnya dari air perebusan jagung dengan kapur itu mas. proses produksi tidak ada baunya mas, Cuma warnanya saja putih mas. kalau masalah limbah kan buang nya ke sungai, malah bermanfaat, banyak ikan di bawah aliran limbahnya, jadi orang-orang sini malah mincing disana.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Juwahir Sebagai pelaku IKM marning jagung yang menyampaikan bahwa:

“Tidak ada protes dari masyarakat disini, disini kan home industri, jadi selama ini tidak ada. Kadang tetangga hanya bilang saja kok baunya marning seperti ini. tapi kalau protes enggak mas. Sebenarnya kalau kemarau itu menguap, kalau marning kan di rendam 2 malam, nah baunya ini yang terkadang gak enak. Tetapi masyarakat kan sudah terbiasa mas, karena ini kan proses produksi marning menjadi ciri khas daerah ini sejak lama, jadi masyarakat tidak terganggu juga mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Sementara itu dari sisi apa yang dirasakan masyarakat mengenai semua proses kegiatan produksi marning jagung, hal ini yang dikemukakan oleh Ibu Hasanah sebagai masyarakat sekitar jl. Simpang Teluk Bayur mengatakan bahwa:

“Tidak ada masalah mas dengan proses produksi marning jagung disini karena sudah biasa dari dahulu. Selama saya masih sekolah sampai sekarang ya sudah ada marning jagung di kampung sini. Kalau untuk terganggunya sama sekali tidak, bau yang timbul ya sudah biasalah seperti itu. Tapi tidak berdampak kemana-mana mas. saluran air juga bersih, ya

hampir tidak ada kerugian lah mas.“ (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 14.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari hal diatas dapat menjelaskan bahwa semua hasil proses kegiatan produksi marning jagung yang dilakukan para pelaku IKM melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Masyarakat merasa terbantu karena adanya kegiatan produksi karena ini juga menjadikan lahan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat memanfaatkan hasil olahan marning jagung untuk dipasarkan kembali. Proses produksi dalam bentuk limbah juga tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar Jl. Simpang Teluk Bayur. Masyarakat tidak merasa dirugikan dari semua hasil pembuangan bekas proses produksi yang dilakukan. Dari pernyataan yang ada, ditemukan bahwa limbah sebagian besar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar seperti pengairan ke ladang atau kebun. Selain itu pembuangan limbah juga di alirkan langsung ke sungai terdekat tanpa melalui saluran pembuangan air milik masyarakat sekitar.

Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada sentra industri marning jagung Kelurahan Pandanwangi ini tenaga kerja berasal dari keluarga dan tetangga di lingkungan sekitar sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat disekitarnya. Sebagian besar tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki dan didominasi oleh lulusan SD dengan presentase sebesar 58% dari total tenaga kerja yang diserap. Selanjutnya tingkat pendidikan tenaga kerja adalah SMP 20%, SMA 20% dan Perguruan Tinggi 2%. Berikut merupakan data tenaga kerja pada sentra industri marning jagung Kota Malang:

Tabel 5: Jumlah Tenaga Kerja Sentra Marning Jagung

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (org)	Tingkat Pendidikan			
			SD	SMP	SMA	PT
1.	Laki-laki	46	22	9	9	6
2.	Perempuan	26	12	5	5	4
	Total	72	34	14	14	10

Sumber: Disperindag Kota Malang Tahun 2013

Sementara itu, dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di wilayah Jl. Simpang Teluk Bayur, peneliti melihat bahwa tidak adanya masalah yang timbul antara masyarakat dengan kegiatan produksi IKM, limbah yang dihasilkan oleh IKM marning jagung tidak menimbulkan bau dan tidak menghasilkan asap tebal. Peneliti juga tidak menemukan adanya sampah maupun kotoran hasil produksi marning jagung di saluran pembuangan milik masyarakat sekitar. Peneliti juga menemukan adanya kontribusi yang diberikan IKM terhadap masyarakat sekitar dengan terbentuknya Masjid Al-Hikmah di Jl. Simpang Teluk Bayur yang telah rampung dan adanya pelaksanaan pembangunan langgar (musholla) yang sedang berlangsung di dekat salah satu tempat produksi marning jagung.

Dari hasil wawancara diatas, maka hubungan yang terjadi antara IKM dengan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. IKM berkontribusi terhadap pembangunan di sekitar wilayah produksinya
2. Proses produksi marning jagung melibatkan masyarakat sekitar
3. Kerukunan antara pelaku IKM dengan masyarakat sekitar sangat baik

4. Masyarakat tidak merasa dirugikan dari seluruh kegiatan produksi marning jagung

c. Hubungan yang terjadi antara Pemerintah dengan Masyarakat

Keterkaitan seluruh elemen di dalam setiap proses produksi marning jagung sangatlah menunjang keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh para pelaku IKM. Hubungan yang terjalin dari para pelaku IKM dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar berdampak terhadap setiap kegiatannya. Namun hubungan antara pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan masyarakat sekitar wilayah produksi marning jagung juga perlu diketahui bagaimana keadaannya meskipun tidak terlalu banyak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

”Mengenai hubungan kami dengan masyarakat sekitar Teluk Bayur tidak terlalu dekat ya mas, karena kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih fokus pada IKM marning jagungnya saja. Tidak ada kegiatan khusus dari kami menyambang ke masyarakat, karena kami ya berhadapannya dengan IKM nya langsung. Mungkin yang lebih bia terjadi justru antara IKM dengan masyarakat karena pasti berdampak sangat besar ya mas dari semua aspeknya. Tetapi kalau dari kami belum sampai kesana. Kami ya hanya bisa mendengar saja berita dari pelaku IKM apakah ada masalah dengan masyarakat sekitar dalam proses produksi, kalau ada masalah ya kami terkadang turun bersama dengan pihak lain yang berkaitan dengan masalahnya, kemudian di bicarakan dan musyawarahkan bagaimana jalan keluarnya.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Pandangan masyarakat mengenai hubungan yang terjadi dengan pemerintah yang berkaitan dengan proses produksi marning jagung tidak begitu banyak

diketahui oleh masyarakat. Masyarakat lebih banyak berinteraksi langsung dengan pelaku IKM marning jagung dibandingkan dengan pemerintah, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Harjo sebagai tenaga kerja dalam proses produksi IKM marning jagung yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah tahu kalau ada dinas nya langsung ke masyarakat sekitar mas. Saya hanya tahunya ada orang dinas karena saya sebagai tenaga kerja dari IKM ini saja, kadang itu ya dari bos saya tanya-tanya saja pendapat saya tapi katanya itu dari dinas tenaga kerja. Kalau dari Disperindag saya tidak pernah tau mas. Untuk pendataan tenaga kerja biasanya lewat bos saya saja mas, tidak langsung ke saya.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 12.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Hasanah sebagai masyarakat sekitar jl.

Simpang Teluk Bayur mengatakan bahwa:

“Tidak pernah tahu sama sekali saya mas. Tidak pernah dengar ada pemerintah atau dinas mana yang kesini. Saya mungkin hanya tahu kalau ada acara atau kegiatan masyarakat biasanya hanya dari RW dan Kelurahan saja. Tetapi saya tidak pernah dengar ada acara untuk masyarakat dari pemerintah atau dinas mana yang berkaitan dengan marning jagung mas. Yang penting kan tidak ada masalah mas kami dengan IKM marning jagungnya, ya sudah itu saja baik-baik semua.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 14.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Nampak bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan IKM Marning jagung tidak terlalu baik. Pemerintah tidak banyak melakukan interaksi terhadap masyarakat disekitar wilayah IKM marning jagung, masyarakat juga tidak banyak mengetahui tentang peran pemerintah serta tidak merasakan adanya kepentingan pemerintah di dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan proses kegiatan marning jagung. Masyarakat merasa hanya cukup berinteraksi dengan pelaku

IKM saja tanpa mengetahui adanya kepentingan pemerintah di dalamnya. Sedangkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung, memang tidak terjadi interaksi atau hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat Jl. Simpang Teluk Bayur, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaktahuan masyarakat dengan keberadaan pemerintah maupun dinas yang menaungi IKM marning jagung selama ini.

2. Dampak hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang, dan Masyarakat dalam pengembangan IKM

Kegiatan proses produksi marning jagung yang dilakukan IKM berkaitan erat dengan hubungan yang terjalin antara pelaku IKM dengan pemerintah dan masyarakat sekitar di dalam pengembangannya. Hubungan yang terjalin selama ini merupakan hasil dari bagaimana para pihak tersebut berinteraksi dan bekerjasama untuk dapat memenuhi kewajiban dan kebutuhannya masing-masing. Di dalam hubungan yang terjadi selama ini, pastinya memiliki dampak yang dirasakan oleh masing-masing elemen dalam proses kegiatan produksi marning jagung di wilayah jl. Simpang Teluk Bayur Kelurahan Pandanwangi baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi lebih dirasakan oleh IKM marning jagung sebagai pelaku dan pelaksana proses produksi, dampak yang mereka rasakan terkait dengan hasil produksi dan dukungan dari berbagai pihak di sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juwahir Sebagai pelaku IKM marning jagung yang menyampaikan bahwa:

“Saya biasanya habis lebaran gini satu bulannya bisa mengeluarkan 2 truk, paling sepi 1 truk lah. Sekarang tuh 5 bulan Cuma 3 truk. Tapi saya juga

bertani lah mas untuk mencukupi keluarga saya. Sulit mas sekarang memang. Ada orang yang mungkin tidak percaya, datang ke saya dan menanyakan, saya serahkan saja semuanya ke dia mulai dari awal sampai penjualannya, perkakas semua saya pinjami. Dan tidak ada yang sanggup. Memang sudah sulit sekarang mas. Marning itu kalau gak punya chanel ya susah mas, karena marning kan bukan bahan pokok seperti beras ya mas. Jadi saya kalau tidak ada yang ambil yasudah. Saya pemasarannya ya usaha sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut pasarkan seperti pemerintah. Ya kami-kami ini saja yang pasarkan, cari pembeli sendiri, maka dari itu sulit mas dapatkan pasar sekarang. Lagi sepi sekali sekarang ini mas. Saya itu kalau sepi ya sepi kalau ramai ya bilang ramai. Gak mau bohongi saya mas. Saya orang yang gak punya dulu, tapi jalannya jujur. Ya saya kadang kalau ada pesenan biasanya 2 minggu sekali atau 10 hari 30 bal. itupun punya nya anak saya mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Dulu banyak mas disini yang produksi marning lebih dari 15 tempat, tapi mungkin sekarang tidak lebih dari sepuluh, bahkan banyak yang produksi mulai dari setengah jadi saja, sudah sedikit yang prosesnya mulai ari bahan mentah. Banyak yang sudah tutup, seperti di wilayah barat sana mas. Mereka tutup karena modalnya kurang dan pasarnya juga sulit sekarang. Sulitnya itu ya karena pasarnya sudah mulai sedikit dan kita juga pemasarannya dilakukan sendiri saja. Mungkin kalau di dukung pemerintah enak ya mas bisa dicarikan pasar atau semacam di promosikan lah mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hasil produksi dari marning jagung lebih banyak di pasarkan sesuai dengan kemampuan para pelaku IKM dalam mencari pelanggan. Pemasaran dilakukan secara tradisional dan tanpa menggunakan teknologi yang sudah berkembang saat ini, pelaku IKM marning yang memproses hingga menjadi kemasan memasarkan produknya hanya di sekitaran wilayah mereka saja dengan membuka toko. Sedangkan untuk produk marning setengah jadi di pasarkan ke pabrik-pabrik pengolah di wilayah lain dari Kota Malang. Ajakan promosi dari

pemerintah dirasakan kurang menguntungkan bagi pelaku IKM marning jagung dalam meluaskan pasar mereka. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Fauzi sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Ya enakan begini saja mas. Orang-orang sini kan males-males mas. Umpama diajak ikut seminar atau pameran dengan orang kelurahan, itu di bawa produk kita mas dan dikenalkan dengan pemilik usahanya juga. Tapi Cuma gitu aja, kelanjutannya gak ada. Memang saat seminar dan pameran laku produk kita, tapi setelah itu gak ada yang tanya dan gak ada kelanjutannya gitu lah mas. Jadi ya sudah saat ada pertemuan pelaku usaha itu ya Cuma ketemu dan mau tau rasanya saja, gak kepingin melebarkan sayap gitu mas. (wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari wawancara diatas didapatkan bahwa keadaan pasar untuk produk marning jagung sudah sangat sulit dan menyempit, bisa dilihat dari banyaknya IKM yang tutup karena modal yang kurang dan pasar. Pasar sangat penting bagi pelaku IKM untuk menjual hasil produksinya dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu makanan ringan khas Kota Malang. Namun para pelaku IKM mengaku kesulitan di dalam meluaskan sayap pemasaran mereka, bahkan mereka menganggap tawaran promosi yang diberikan pemerintah juga tidak mampu meluaskan pasar mereka sehingga mereka mengandalkan kemampuan sendiri dalam memasarkan produknya. Namun mengenai keaktifan pemerintah dalam hal pengembangan dan pemasaran produk IKM dijelaskan oleh Bapak Iwan Siswanto, SH., M.Hum., selaku Kepala Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Memang pengembangan yang kami lakukan seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan, bantuan serta pemasaran ke IKM marning belum maksimal. Bisa dibilang belum tersentuh sama sekali, hanya pendataan terkahir saja di tahun 2013 dan hanya undangan-undangan seminar saja ke beberapa

pelakunya. Kendalanya selama ini ya seperti anggarannya yang belum terpenuhi untuk dilakukan pengembangan ke marning jagung. Untuk pemasaran dan promosi setiap sentra pasti kita ajak, memang tidak semua dari pelaku IKM itu, tetapi pasti kami ajak. Pemasaran dan promosi biasanya dalam bentuk pameran, kami biasanya mengajak pelaku IKM juga bersama dengan produknya. Pameran biasanya rutin dalam skala nasional, ada juga yang ke luar negeri beberapa kali seperti Cina, Swiss, Singapura, dan Belanda. Tapi kalau untuk dari marning belum kami ajak sama sekali pameran tersebut” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 1 November 2016 pukul 11.00 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Dari wawancara tersebut terlihat jelas bahwa peran pemerintah adalah hal pengembangan dan pemasaran produk bagi IKM masih sangat minim, bahkan diakui oleh Bapak Iwan Siswanto, SH., M.Hum., selaku Kepala Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Disperindag Kota Malang bahwa IKM marning belum banyak diikuti dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dampak dari ketidakikutsertaan IKM marning jagung dalam kegiatan pameran sebagai salah satu penunjang pemasaran menjadikan produk marning yang dihasilkan sulit untuk mendapatkan pasar luas. Bahkan pelaku IKM mempunyai anggapan bahwa kegiatan pameran yang diadakan pemerintah tidaklah menguntungkan dan tidak melebarkan sayap dalam pemasaran.

Selain dampak bagi produksi marning jagung, perhatian pemerintah terhadap perkembangan IKM juga menjadi dampak negatif berikutnya. Hal ini timbul karena adanya ketidakpedulian dari masing-masing pihak baik pemerintah maupun IKM sendiri. IKM marning jagung di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang terlihat tidak aktif dalam membentuk kelompok atau paguyuban pelaku produksi marning jagung. Fungsi kelompok ini sebenarnya dapat memberikan

suatu hal yang bermanfaat bagi keberlanjutan produksi marning jagung. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya bukan karena rutin yaa, jadi dari pelaku usahanya sendiri. Terkadang seperti ini, mereka bentuk kelompok lalu mereka bikin proposal. Misalkan proposal itu minta tolong untuk diadakan pelatihan atau minta tolong IKM diberikan bantuan alat. Jadi dari mereka nya sendiri yang aktif, rata-rata seperti itu. Jadi kita malah berfikir kalau mereka masih membutuhkan seperti sosialisasi atau alat dan sebagainya, jadi kita tahu. Terkadang kalau kita gak terjun sendiri kan kita tidak mengerti. Jadi karna mereka aktif dan di kripik tempe ada paguyubannya, jadi mereka kalau ada keluh kesah butuh sesuatu mereka sampaikan ke kami. Kalau untuk marning jagung ini tidak ada sama sekali kelompok atau paguyubannya, jadi mereka jalan sendiri. Kita juga tidak mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa yang masih kurang dalam kegiatan mereka” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Mengenai permasalahan tidak adanya kelompok atau paguyuban yang terbentuk di dalam sentra marning jagung juga dibenarkan oleh Bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada mas paguyubannya. Dulu pernah mas bikin paguyuban tetapi bubar karna sudah berusia tua para pelakunya, dan juga orang-orang kampung sini yang sulit. Soalnya mereka modal individu, dan beda-beda harga jualnya. Jadi mau diajak kompak ya sulit mas pelaku usaha disini. Kecuali kelompok saya sendiri karena memangproduksinya jadi satu dengan saya” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal senada juga diungkapkan oleh oleh Bapak Fauzi sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Ya selama ini tidak ada paguyuban mas. Ya beginilah kami usaha sendiri, kalau memang butuh bantuan ya tinggal minta ke pelaku IKM lain, nanti di bantu karena sama-sama tetangga. Dasarnya itu orang sini malas-malas mas, jadi buat apa minta ke pemerintah atau dinas nanti malah dipersulit.

Lebih baik usaha sendiri saja, tidak ribet urus segala macamnya. Kecuali mereka yang sudah kenal dengan orang dinas, yang sering main ke kantor dinas untuk ngobrol atau ngopi, biasanya ya dikasih begitu saja bantuan dalam bentuk barang atau alat mas. Tapi kalau saya kan tidak bias begitu karena waktunya tidak ada, setiap hari ya harus produksi terus mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari wawancara diatas nampak bahwa pemerintah menginginkan adanya kelompok atau peguyuban yang terbentuk antar pelaku IKM marning agar dapat terdengarnya keluhan serta kekurangan dalam pengembangan produksi marning jagung. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa tidak adanya kelompok atau paguyuban yang terbentuk di sentra IKM marning tersebut yang dikarenakan para pelaku IKM sulit untuk diajak bekerjasama dan keinginan untuk berjalan sendiri. Hal ini disebabkan bahwa mereka merasa dalam menjalankan usaha produksinya menggunakan modal dan lahan sendiri tanpa berbagi dengan yang lainnya. Hal yang terjadi lainnya adalah pelaku IKM menganggap bahwa meminta bantuan kepada pemerintah akan semakin rumit dalam prosesnya, melainkan mereka para pelaku IKM yang sudah kenal baik dengan aparat pemerintah akan mudah mendapatkan bantuan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama berlangsungnya penelitian, peneliti juga menemukan adanya dampak negatif yang terjadi dalam proses produksi olahan marning. Ada beberapa IKM marning jagung yang tidak berproduksi selama peneliti mengamati perkembangan di wilayah sentra IKM marning jagung. Sementara itu, selama observasi berlangsung, hal yang ditemukan adalah tidak banyaknya pelaku IKM yang melakukan kegiatan promosi

diluar wilayah mereka, pelaku IKM cenderung memasarkan produknya hanya disekitar wilayah mereka dengan membuka toko di depan rumah.

Dampak tidak selalu menjadi negatif, dampak yang positif juga timbul dari hubungan yang terjalin selama ini adalah dari adanya hubungan antara IKM dengan masyarakat, dimana kedua pihak sama-sama diuntungkan selama ini di dalam proses kegiatan IKM marning jagung. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Harjo sebagai tenaga kerja dalam proses produksi IKM marning jagung yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah terbantu sekali mas masyarakat sekitar dengan para pelaku IKM disini, sebagian masyarakat menjadi tenaga kerjanya, selain itu pelaku IKM juga membantu segala keperluan kampung dan tetangganya. Pembangunan jalan makam, langgar serta masjid juga dibantu oleh pelaku IKM dan masyarakat sekitar. Jadi cepat begitupembangunannya tanpa meminta bantuan dana keluar lagi.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 12.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal serupa dikemukakan oleh Ibu Hasanah sebagai masyarakat sekitar jl. Simpang Teluk Bayur yang merasakan hubungan selama ini dengan pelaku IKM marning jagung sangat baik, beliau mengatakan:

“Sangat baik sekali pengusaha marning ke masyarakat, kami sering dibantu dalam hal-hal seperti pinjaman uang, atau acara-acara agama disini mas, tidak sulit mencari dana kalau ada acara. Kebersihan juga bias dilihat sendiri, tidak ada sampah yang disebabkan dari proses produksinya. Ya selama ini nyaman dan aman mas tinggal bersebelahan dengan IKM ini” Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 14.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Pelaku IKM marning jagung juga merasa bahwa hubungan selama ini dengan masyarakat sangat baik bahkan saling membantu saat membutuhkan, hal

ini diungkapkan oleh Bapak Juwahir sebagai pelaku IKM yang mengatakan bahwa:

“Baik sekali kalau dari masyarakat ke kita. Masalah produksinya di bantu dengan tetangga juga, mereka tidak pernah ada keluhan dari kegiatan kami. Ya kami juga harus berbuat baik ke mereka, kalau ada masyarakat yang meminta bantuan dan sumbangan ya kami kasihkan semampunya, kami harus bisa berbagi juga karna mereka juga membantu. Dengan pelaku IKM yang lain juga rukun meskipun saling bersaing, dengan tetangga ya rukun. Disini rukun semua mas masyarakatnya, tidak pernah rebut-ribut besar atau saling iri mas. Bagus ini mas” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Senada dengan pernyataan diatas, Bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat sangat membantu sekali, selain sebagai tenaga kerja kami mereka juga ikut memasarkan hasil dari produksi kami. Selain untuk menambah pendapatan mereka, ini juga menjadi keuntungan lain bagi kami dalam hal pemasaran. Ya saling membantu lah mas” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Dari hal tersebutkan diatas, hubungan yang terjadi antara IKM dengan masyarakat terjalin begitu baik dan erat. Saling membutuhkan dan saling membantu menjadikan mereka tidak merasa dirugikan satu dengan yang lainnya. IKM terbantu dengan tenaga kerja yang merupakan masyarakat sekitar. Sedangkan masyarakat juga terbantu karena kontribusi besar yang diberikan IKM kepada masyarakat dan wilayah sekitar. Kerukunan dirasakan seluruh pihak di wilayah tersebut, tidak ada permasalahan besar yang timbul selama ini. Masyarakat juga ikut andil dalam memasarkan produk yang dihasilkan IKM marning jagung. Sehingga IKM merasa terbantu di dalam proses pemasaran

produknya. Dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjalin merupakan dampak positif dari hubungan yang mutualistik karena setiap pihak merasakan manfaat dan keuntungannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama berlangsungnya penelitian, terdapatnya dampak yang positif memang sangat dirasakan ketika melihat sisi dari hubungan yang terjadi antara IKM dengan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dijumpai peneliti dengan suasana di Jl. Simpang Teluk bayur yang tidak gaduh karena adanya proses produksi marning jagung, masyarakat disekitar juga mendukung adanya produksi tersebut. Tidak ditemukan masalah selama penelitian berlangsung antara IKM dengan masyarakat. Dalam hal ini cenderung ditemukan bahwa IKM dan masyarakat bersama-sama saling berkontribusi terhadap kepentingan mereka selama ini seperti yang sudah dijelaskan dalam hubungan yang terjadi antara IKM dengan masyarakat diatas.

Dari hasil wawancara diatas, maka dampak yang terjadi dari hubungan selama ini bukan hanya dampak secara negatif saja, tetapi juga ada dampak positif yang dirasakan. Berikut ini merupakan dampak dari hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung, pemerintah dan masyarakat sekitar adalah sebagai berikut:

Dampak Positif:

1. Adanya kerukunan antara IKM dengan masyarakat
2. Masyarakat ikut memasarkan produk IKM
3. Pembangunan lingkungan sekitar terlaksana dengan baik
4. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Dampak Negatif:

1. Pemasaran yang semakin sulit bagi IKM
2. Sulitnya penerimaan bantuan bagi IKM dalam pengembangannya
3. Berkurangnya jumlah IKM marning jagung

3. Keinginan dari IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan yang Mutualistik Dalam Pengembangan IKM marning jagung

Dari berbagai permasalahan yang timbul dari berbagai pihak seperti IKM, pemerintah dan masyarakat, maka harus dilakukan beberapa langkah yang tepat sehingga dapat memperbaiki hubungan yang telah terjalin selama ini. Permasalahan lebih banyak terjadi di dalam hubungan antara IKM dengan pemerintah, dimana adanya ketidakharmonisan yang terjadi antara keduanya di dalam pengembangan IKM. Untuk menemukan jalan keluar sebagai langkah dari permasalahan tersebut, maka perlu diketahui keinginan dari berbagai pihak yang terkait agar hubungan yang terjalin dapat menjadi lebih baik dan mutualistik, maka berikut beberapa keinginan yang diungkapkan pihak IKM, pemerintah dan masyarakat.

a. Keinginan IKM agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Berbagai kendala yang dihadapi pelaku IKM dalam kegiatan produksinya memiliki dampak yang sangat besar. Perlu adanya langkah yang tepat untuk dapat

menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan selama ini. Masalah yang besar dihadapi pelaku IKM adalah hubungan dengan pemerintah yang kurang begitu baik sehingga menyebabkan tersendatnya pengembangan baik dalam proses produksi maupun pemasaran produk mereka. Oleh karena itu perlu diketahui keinginan dari pelaku IKM terhadap pemerintah untuk memperbaiki hubungannya yang terjalin selama ini. Berikut merupakan keinginan pelaku IKM yang disampaikan oleh Bapak Fauzi sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Keinginan saya ke pemerintahnya mungkin ya lebih di perhatikan lagi kondisi kami disini, jangan hanya ada rencana-rencana saja tetapi tidak ada bukti tindakan berikutnya. Mungkin kami dipermudah ntuk mendapatkan bantuan, jadi kami tidak berfikir lagi bahwa mau memintabantuan itu harus sulit prosesnya. Kalau bisa pameran itu tidak hanya mengenalkan produk kami saja, tetapi kedepannya juga orang memesan produk kami, jadi ada dampak yang baik bagi kami” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 10 November 2016 pukul 10.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Keinginan serupa juga disampaikan oleh Bapak Juwahir sebagai pelaku IKM yang mengatakan bahwa:

“Harapan saya pemerinth jangan mempersulitlah kalau mengenai perizinan, jadi kami juga merasakan kemudahan. Untuk masalah kunjungan dari wilayah lain, mohon di dampingi oleh pemerintahnya juga,karena saya sering bingung sendiri menjelaskan mengenai proses marning jagung jika itu diluar pengetahuan saya. Dan pemerintah juga harus objektif mas, jangan hanya dilihatbahwa marning jagung ini masih ramai peminatnya, itu dilihat kan dari satu pelaku IKM saja, coba dilihat ke semuanya, ada yang merasakan sulit dan sepinya pemasaran.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.00 di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Indra sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Kalau harapannya sih yaa tolong ditinjau langsung ke lokasinya, agar tau apa kekurangannya, yang dibutuhkan apa. Supaya makanan ciri khas malang kedepannya tidak hilang mas. Dan bagaimana orang dinas mampu membuat cara mempromosikannya seperti apa agar kita juga mudah mencari pasar lagi.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Sementara itu keinginan kedepannya yang diharapkan pelaku IKM terhadap hubungannya dengan masyarakat sekitar tidak banyak, mereka menganggap bahwa hubungan yang selama ini terjalin sudah sangat baik. Seperti yang diungkapkan Bapak Supriadi sebagai pelaku IKM marning jagung yang mengatakan bahwa:

“Sudah cukup mas kalau dengan masyarakat, sangat membantu sudah. Sudah tidak ada yang kurang dan tidak ada masalah. Hanya dijaga kerukunan yang sudah terjadi selama ini saja. Jangan ampai kita retak begitu saja.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di jl. Simoang Teluk Bayur)

Dari hasil wawancara diatas nampak keinginan dan harapan besar disampaikan pelaku IKM kepada pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan, membangun cara agar produksi marning jagung tidak hilang begitu saja, karena marning jika dikembangkan dengan baik, maka potensinya tidak kalah dengan makanan khas Malang lainnya. Pelaku IKM juga mengharapkan agar pemerintah mencari cara dalam mempromosikan produk marning jagung, bukan hanya mengenalkan produk saja, tetapi dapat menjanjikan agar produk tersebut bisa dikenal dan dipesan oleh khalayak luas dari berbagai wilayah. Sementara itu, dalam hubungan yang terjalin dengan masyarakat sekitar,

pelaku IKM hanya mengharapkan agar kerukunan dan hubungan yang sudah terjalin baik bisa terus terjaga.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung, peneliti merasakan langsung adanya keinginan pelaku IKM agar diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena mulai menurunnya hasil olahan marning jagung karena berkurangnya pasar. Peneliti melihat bahwa dari sepiunya produksi marning selama pengamatan yang dilakukan, membuat adanya harapan besar dari pelaku IKM terhadap peran pemerintah di dalam mengembangkan proses produksi marning. Tentunya ini dapat berdampak buruk terhadap kelanjutan kegiatan produksi marning jagung jika tidak segera diberikan arahan dan perkembangan yang signifikan. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keinginan dan harapan besar dari pelaku IKM adalah sebagai berikut:

1. Perhatian pemerintah terhadap kondisi yang dihadapi IKM
2. Mempertahankan ciri khas marning jagung di Kota Malang
3. Cara yang dilakukan pemerintah agar pemasaran produk IKM meluas
4. Hubungan dengan masyarakat selalu baik dan rukun

b. Keinginan pemerintah agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Keinginan dan harapan kedepannya juga disampaikan pemerintah untuk dapat memperbaiki masalah yang terjadi selama ini di dalam pengembangan IKM. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

belum maksimal dalam menyelenggarakan pengembangan bagi IKM marning jagung Kota Malang seperti pemberian sosialisasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, bantuan dan pemasaran bagi pelaku IKM. Oleh karena keinginan kedepannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Kami harus intens kunjungan kesana, sebenarnya harus. Karena asumsinya itu misalkan mereka ada keluhan apa, kita bisa membantu dan tidak hanya begitu-begitu saja dan bisa berkembang. Kita perlu pendekatan, tidak hanya menunggu mereka berteriak dulu. Memang sudah kewajiban kita untuk membina pelaku usaha di Kota Malang terutama yang kecil menengah. Tapi belum kita lakukan, insya Allah tahun 2017. Lalu kalau ada pameran bisa di promosikan. Jadi gak melulu batik atau keramik, aneka kerajinan yang diajak. Jadi tonjolkan kulinernya malang” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Kemudian keinginan selanjutnya yang juga disampaikan oleh Bapak Noegroho Dwipoetranto, SH., selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Disperindag Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Mereka juga harus membentuk kelompok atau paguyuban kedepannya, agar kita tahu permasalahan dan kebutuhan mereka secara garis besarnya. Karna akan susah jika satu persatu, jadinya tidak akan sama nanti. Buat kelompok atau paguyuban, kemudian dijabarkan kebutuhan dan kekurangan di dalam proposal, lalu akan kami anggarkan dan Insya Allah dilaksanakan. Karna mereka harus aktif itu jga perlu mas.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 13.30 WIB di kantor Disperindag Kota Malang)

Keinginan yang harus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang kedepannya disampaikan oleh Bapak Iwan Siswanto,

SH., M.Hum., selaku Kepala Bidang Perindustrian Agro dan Kimia Disperindag

Kota Malang yang menyatakan bahwa:

“Akan ada pendataan yang terbaru kalau dari keinginan saya, mudah-mudahan tahun 2017 ada anggarannya untuk itu, dan kami juga akan kunjungan kesana. Karna selama ini kendalanya ada di anggaran, jadi terakhir pendataa itu ya ditahun 2013. Untuk promosi seperti pameran kami ikutkan tidak hanya satu pelaku IKM saja, tetapi beberapa pelaku dari satu sentra. Kedepannya semoga bisa diikuti semua, apalagi ada rencana kegiatan Pasar Senggol yang dilaksanakan Pemkot Malang bersama dengan Dinas terkait untuk memperkenalkan produk-produk khas Kota Malang. Pasar tersebut rencananya ingin mengikuti seperti pasar Malioboro di Yogyakarta, agar Kota Malang juga memiliki ikon” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 1 November 2016 pukul 11.00 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Dari hasil wawancara diatas, jelas bahwa pemerintah ingin memperbaiki hubungan dengan IKM marning jagung dalam hal pengembangan IKM. Pemerintah menginginkan agar kedepannya IKM membentuk kelompok atau paguyuban supaya pemerintah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan para pelaku IKM, pemerintah juga akan melaksanakan pendataan terbaru serta kunjungan ke wilayah IKM marning jagung guna memperhatikan dan memahami keadaan dan kondisi yang ada.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, peneliti mengamati bahwa adanya keinginan pemerintah dalam hal ini khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terjadi dengan IKM marnig jagung. Tetapi menurut penulis hal tersebut masih sangat sulit dilakukan karena belum adanya anggaran yang dapat memadai dan masalah aparatur yang masih enggan untuk langsung terjun ke lapangan. Sementara itu,

peneliti juga merasakan bahwa aparat pemerintah lebih menginginkan jika pelaku IKM yang lebih aktif untuk menyampaikan keluhan mereka.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keinginan dari pemerintah dalam pengembangan IKM adalah sebagai berikut:

1. IKM membentuk kelompok atau paguyuban
2. Melakukan kunjungan ke wilayah sentra IKM marning jagung
3. Melakukan pendataan bagi IKM marning jagung
4. Mengajak pelaku IKM marning jagung dalam promosi seperti pameran

c. Keinginan masyarakat agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Masyarakat memahami pentingnya hubungan yang terjalin baik dengan para pelaku IKM dimana dipahami bahwa kontribusi yang diberikan pelaku IKM sangat berarti bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hubungan baik yang terjalin dengan pelaku IKM diharapkan terus berlanjut tanpa adanya masalah yang timbul di kemudian hari. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Hasanah sebagai masyarakat sekitar jl. Simpang Teluk Bayur yang mengatakan bahwa:

“Keinginan saya sebagai warga ya seperti ini saja sudah cukup mas, kan selama ini sudah baik dan rukun sesame tetangga, jadi ya jangan sampai ada masalah kedepannya. Karna sebagai tetangga kan juga harus menghargai dan saling menghormati agar tidak terjadi singgungan antar tetangga. Harapannya semoga kedepannya tidak ada yang dirugikan, produksi marning jagung kan sudah baik tidak merugikan tetangga, kalau bias ya dipertahankan, jangan sampai nanti ada yang berubah dari prosesnya kemudian merugikan tetangga sekitar mas.” Wawancara oleh penulis pada tanggal 14 November 2016 pukul 14.00 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Seperti halnya Ibu Hasanah, bapak Harjo sebagai tenaga kerja dalam proses produksi IKM marning jagung menyatakan bahwa:

“Harapannya ya semoga bias dipertahankan saja hubungan antara masyarakat dengan para pelaku IKM, karena kami sebagai masyarakat juga masih membutuhkan seperti saya masih butuh pekerjaan disini. Senoga saja lancer terus produksi marning disini agar kami masyarakat juga bisa terus bekerja. Jangan sampai hilang ini usaha produksi marning nya, karna sudah menjadi ciri khas kampung sini. Kan terkenal sebagai wilayah khas produksi marning jagung.” (Wawancara oleh penulis pada tanggal 16 November 2016 pukul 12.30 WIB di jl. Simpang Teluk Bayur)

Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa keinginan masyarakat kedepannya mengenai hubungan dengan pelaku IKM di wilayah mereka adalah tetap seperti yang sudah terjalin selama ini, dimana masyarakat menilai kontribusi yang baik diberikan oleh para pelaku IKM. Masyarakat juga mengharapkan bahwa keadaan akan lebih baik lagi dimana proses produksi dari marning jagung terus meningkat agar masyarakat juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut sebagai tenaga kerja. Keinginan selanjutnya dari masyarakat adalah agar produksi marning jagung tidak hilang begitu saja, terus tetap eksis menjadi makanan khas kampung Teluk Bayur dan Kota Malang.

Pengamatan yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung, peneliti menemukan bahwa masyarakat sudah merasa cukup terbantu dengan keberadaan IKM marning jagung di wilayah mereka. Masyarakat tidak menginginkan banyak dikarenakan keadaan saat ini sudah cukup bagi mereka terhadap hubungan dengan IKM. Peneliti juga mengamati selama melakukan penelitian, bahwa masyarakat cenderung tidak ingin terlalu banyak mengetahui dan terlibat hubungan dengan pemerintah, hal ini bisa disebabkan karena

masyarakat merasa hubungan dengan IKM lebih baik karena berdampak langsung terhadap kegiatan sehari-hari. Peneliti merasa perlunya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat karena hal tersebut juga berdampak terhadap perkembangan IKM. Pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap IKM harus melibatkan masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga berkontribusi terhadap produksi marning jagung

Dari wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hubungan masyarakat dengan IKM tetap baik
2. Proses produksi marning jagung meningkat
3. Marning jagung tetap eksis menjadi makanan khas Kota Malang

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat dalam pengembangan IKM selama ini.

Begitu pentingnya sebuah hubungan atau interaksi sosial antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki tujuan, dapat diartikan juga terhadap pentingnya hubungan antar sesama kelompok baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik formal maupun secara non-formal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan atau interaksi diartikan sebagai hal saling melakukan aksi, berhubungan, atau saling mempengaruhi. Jadi, pengertian hubungan atau interaksi sosial adalah hubungan timbal balik (sosial) berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok,

dan antara kelompok dan kelompok. Hal ini dapat sepadan dengan hubungan yang terjadi di dalam pengembangan IKM, dimana terdapat pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Hubungan yang terjadi mampu mempengaruhi perkembangan suatu proses dari kegiatan IKM. Dalam hal ini, hubungan yang terjadi meliputi hubungan antara pelaku IKM, Pemerintah dan masyarakat sekitar. Dari penyajian data diatas, dapat dijabarkan hubungan yang terjadi antara ketiga pihak yaitu IKM, pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Pemerintah Kota Malang

Peran IKM di dalam peningkatan ekonomi masyarakat sangat signifikan, tidak hanya sebagai dasar kemandirian masyarakat, tetapi sebagai tolak ukur keberhasilan pengembangan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah. IKM memiliki banyak manfaat bagi keberlanjutan ekonomi suatu negara. Oleh Karena itu pengembangan IKM sangat dibutuhkan agar IKM tersebut mampu bertahan dan berinovasi menjadi lebih baik lagi. Cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri berskala kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan (Kuncoro, 2007:364).

Ditinjau dari hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangatlah kurang baik. Hubungan yang terjalin setidaknya mampu memberikan semangat bagi para pelaku IKM dan pemerintah untuk selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan. IKM tentunya perlu dukungan dari pemerintah dalam bidang sosialisasi, pembinaan, pelatihan, bantuan, maupun sektor pemasaran agar perkembangan IKM terus berlanjut dan memiliki kualitas yang baik. Tetapi terkadang hubungan yang terjadi dalam pengembangan IKM justru tidak selamanya baik, dikarenakan adanya ketidakaktifan dari masing-masing pihak maupun hanya sebagai pernyataan formal saja. Menurut Syarif (1991:3) bahwa bentuk-bentuk pengembangan meliputi:

3. Bentuk Internal:

- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- f. Pembinaan usaha
- g. Bantuan promosi
- h. Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha

4. Bentuk Eksternal:

- c. Menyediakan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentral usaha pada sentra-sentra industri kecil

- d. Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan

IKM merasakan adanya kesulitan yang terjadi dalam hubungan yang mengaitkan pemerintah. IKM beranggapan bahwa selama ini pemerintah tidak terlalu memberikan andil besar terhadap jalannya kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan IKM lebih banyak dilakukan atas usaha sendiri dan kemandirian masing-masing pelaku IKM tanpa adanya bantuan dari pihak manapun. Pada umumnya IKM marning jagung melakukan kegiatan produksi dengan pembelajaran secara turun-menurun dari keluarga terdahulu. Berawal dari proses bahan jagung atau bahan metahnya hingga menjadi bahan setengah jadi, kemudian berlanjut dalam proses penggorengan dan olahan rasa, hingga proses pengemasan dilakukan atas usaha mereka sendiri. Selama ini tidak ada peran pemerintah yang dirasakan dalam hal pengembangan IKM marning jagung. Pelaku IKM beranggapan bahwa pihak pemerintah hanya sebatas melakukan rencana dan pendataan yang bahkan tidak rutin, kemudian tidak ada keberlanjutannya di kemudian hari. Kegiatan yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap IKM lebih banyak pada pelaksanaan seminar dan pameran sebagai bentuk promosi. Namun tidak semua pelaku IKM mendapatkan hal yang sama, hanya beberapa pelaku IKM saja yang dinilai baik dan dekat dengan beberapa aparatur pemerintah yang dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pihak pemerintah. Dari penyajian data diatas, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut:

(1) Pemerintah kurang aktif dalam pengembangan IKM marning jagung

Pelaksanaan pengembangan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang masih sangat minim. Pelaku IKM sama sekali tidak merasakan kehadiran pemerintah di dalam kegiatan proses produksinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak rutin dalam melaksanakan pengembangan kepada IKM marning jagung seperti sosialisasi, pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan, dan pemasaran. Selama ini hanya ada undangan seminar bagi beberapa pelaku IKM tertentu dimana tidak semua pelaku IKM mendapatkan kesempatan yang sama. Mengenai hal pengembangan lain belum dapat dirasakan dan belum pernah diterima oleh para pelaku IKM. Dukungan seperti bantuan alat atau pelatihan tidak dirasakan oleh IKM selama ini, para pelaku IKM memilih untuk memenuhi kekurangan proses produksinya dengan usaha dan modal sendiri.

(2) Minimnya kunjungan dan pendataan dari pemerintah

Kunjungan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai tindakan pengawasan kepada pelaku IKM belum dapat dilakukan. Kunjungan dapat dilaksanakan jika saja terdapat tamu yang berasal dari wilayah lain untuk melakukan studi banding terhadap IKM marning jagung Kota Malang. Tidak ada perhatian lebih yang diberikan oleh pemerintah kepada IKM marning jagung ini. Begitupun dengan pendataan yang dilakukan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan pendataan terakhir pada tahun 2013 dan sampai saat ini belum ada pembaharuan data terkait IKM marning jagung. Sesuai

dengan pernyataan para pelaku IKM, data terakhir tersebut sudah sangat jauh berbeda dengan yang ada saat ini, saat ini terjadi pengurangan jumlah IKM.

(3) Pelaku IKM tidak aktif dalam pembentukan kelompok atau paguyuban

Sentra IKM marning jagung Kota Malang tidak memiliki kelompok atau paguyuban bersama untuk mengatasi masalah kekurangan yang selama ini dirasakan. Ini berdampak pada perhatian pemerintah terhadap kondisi IKM marning jagung. Pemerintah menyatakan bahwa fungsi kelompok atau paguyuban tersebut agar pemerintah mampu memahami kebutuhan dan kekurangan yang dialami oleh para pelaku IKM di daerah tersebut. Namun para pelaku IKM nampaknya sulit dalam membentuk kelompok atau paguyuban, dikarenakan mereka menganggap bahwa seluruh proses produksi dilakukan dengan modal dan lahan milik pribadi.

(4) Tumpang tindih kepentingan dan pembinaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Dinas

Terdapat tumpang tindihnya kepentingan yang dilakukan beberapa OPD/Dinas terhadap pembinaan IKM mengakibatkan tidak konsistennya pengembangan terhadap IKM itu sendiri. Diketahui dalam penyajian data diatas bahwa tidak hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja yang memiliki hubungan langsung dalam pengembangan IKM marning jagung, namun terdapat juga Dinas UMKM dan Koperasi serta Dinas Pertanian yang memiliki kepentingan dengan IKM marning jagung. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan dari pihak IKM dalam melaksanakan pengembangan, karena adanya

tumpang tindih kepentingan dan pembinaan dari beberapa OPD/Dinas dan pasti berbedanya program pengembangan yang diberikan terhadap IKM.

Dalam kegiatannya, baik IKM maupun pemerintah harus mampu bekerjasama dan bermitra agar rencana dan keinginan dari kedua pihak dapat terwujud. Menurut Sulistiyani (2004:129) menerangkan bahwa tujuan suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Agar sebuah kemitraan menjadi kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat yang dihasilkan maka memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan visi atau misi berbeda tetapi saling mengisi dan melengkapi secara fungsional.

Saling mengisi dan melengkapi perlu dilakukan antara IKM marnig jagung dengan Pemerintah Kota Malang agar pengembangan yang dilakukan oleh kedua pihak sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama. Hal ini diperlukan agar hubungan yang terjadi antara IKM dengan pemerintah menjadi hubungan yang mutualistik atau saling menguntungkan. Tetapi kenyataannya dilapangan bahwa IKM sulit bekerjasama dengan pemerintah, terjadi ketimpangan dari masing-masing pihak sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara IKM dengan pemerintah tidak mutualistik atau tidak menguntungkan.

b. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Masyarakat

Keterkaitan antara IKM dengan wilayah sekitarnya sangat berpengaruh termasuk dengan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Begitu juga yang terjadi dengan IKM marning jagung dengan masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah Jl. Simpang Teluk Bayur. Hubungan yang terjalin selama ini antara IKM dengan masyarakat sangat baik. Kerukunan tetap terjaga diantara mereka. Kontribusi dari masing-masing pihak terhadap lingkungan juga dapat diperhitungkan. Perilaku yang baik dari IKM maupun masyarakat dan saling menghargai mampu memberikan efek yang positif dalam kelancaran proses kegiatan produksi marning jagung setiap harinya. Dari penyajian data diatas, diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

(1) IKM berkontribusi terhadap pembangunan disekitar wilayah produksi

Kontribusi pelaku IKM dengan pembangunan wilayah Jl. Simpang Teluk Bayur sangat besar. Masyarakat sekitar terbantu dengan keberadaan IKM tersebut, dimana IKM memberikan bantuan terhadap setiap acara dan kebutuhan bagi masyarakat. Dari penyajian diatas diketahui bahwa pembangunan jalan, langgar, masjid dan acara warga selalu terbantu oleh kontribusi IKM. Misalnya saja pembangunan masjid Al-Hikmah di Jl. Simpang Teluk Bayur selesai dalam kurun waktu 1 tahun tanpa meminta dana dari luar wilayah mereka. Diakui oleh

masyarakat bahwa IKM memberikan dampak yang baik bagi pembangunan di wilayah mereka.

(2) Proses produksi marning jagung melibatkan masyarakat sekitar

Dalam proses produksi marning jagung, pelaku IKM menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Hal ini dapat membantu dari segi pendapatan masyarakat. Seluruh kegiatan proses produksi melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat berterimakasih akan adanya IKM marning jagung tersebut. Selain terlibat sebagai tenaga kerja, masyarakat juga ikut andil di dalam proses pemasaran marning jagung. Banyak masyarakat yang mengambil hasil produksi IKM untuk mereka jual kembali sebagai pendapatan tambahan. Hal ini tentunya menguntungkan bagi kedua pihak baik IKM dan masyarakat sendiri

(3) Kerukunan antara pelaku IKM dengan Masyarakat sekitar sangat baik

Hubungan yang terjalin baik selama ini antara IKM dengan Masyarakat sekitar menjadi suatu hal yang positif. Saling menyadari akan pentingnya kontribusi dari masing-masing pihak dalam proses pemenuhan kebutuhan menjadikan hubungan yang bisa dikatakan mutualistik. Kerukunan dirasakan oleh pelaku IKM maupun masyarakat sekitar, dimana tidak ada masalah besar yang terjadi selama ini diantara mereka. Sifat bermasyarakat yang tinggi dan saling membantu sudah tertanam di wilayah tersebut. Meskipun terjadi persaingan usaha antar IKM di wilayah tersebut, namun selama ini tidak pernah ada sifat saling menjatuhkan atau saling iri terhadap yang lainnya.

(4) Masyarakat tidak merasa dirugikan dari seluruh kegiatan proses produksi marning jagung

Proses produksi marning jagung yang dilakukan setiap hari di wilayah Jl. Simpang Teluk Bayur Kota Malang tidak memberikan kerugian bagi masyarakat. Sebagai salah satu industri kecil tentunya hasil dari proses produksi memiliki limbah yang besar pula. Namun limbah hasil produksi dari marning jagung tersebut diolah dengan baik tanpa harus merugikan masyarakat. Diketahui dari pernyataan pelaku IKM dalam penyajian data diatas bahwa limbah hasil produksi bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengairi kebun dan ladang mereka, limbah juga langsung dialirkan ke sungai dimana hasil buangan limbah di sungai menjadi tempat berkumpulnya ikan dan dapat dimanfaatkan warga untuk memancing. Sementara itu proses olahan marning juga mengeluarkan aroma atau bau, namun warga sekitar tidak terganggu akan aroma atau bau tersebut, hal ini dikarenakan sudah terbiasanya masyarakat dengan proses produksi marning di wilayah mereka.

Melihat dari penyajian data diatas, dapat terjelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara IKM dengan masyarakat sangat baik. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pihak. Soekanto (2005:67) mengartikan hubungan atau interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial. Interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi, hubungan ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin

ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya hubungan sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut hubungan atau interaksi. Kontribusi IKM yang besar bagi masyarakat, kontribusi masyarakat terhadap produksi IKM, dan juga saling membantu sesama masyarakat menjadikan hubungan yang terjalin dapat dikatakan mutualistik atau menguntungkan. Hubungan ini patut untuk terus dipertahankan mengingat penting sekali bagi IKM untuk kelancaran proses produksi dan bagi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kota Malang dengan Masyarakat

Dalam perkembangannya hubungan yang terjadi meliputi pengembangan IKM disadari terdapat kepentingan dari berbagai pihak. Peran IKM menjadi sentral, dimana IKM berhubungan langsung dengan pemerintah sebagai pelayan rakyat, IKM juga berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Pola hubungan seperti itu sangat signifikan terjadi di setiap lingkungan kegiatan IKM. Namun dari ketiga pihak tersebut penting bagi kita juga mengetahui hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang terkait dengan pengembangan IKM. Karna sejatinya, masyarakat ikut serta dalam pengembangan IKM, namun pada kenyataannya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat

juga kurang berjalan baik. Sementara tugas pemerintah juga sebagai pelayan masyarakat, tentunya dalam pengembangan IKM ini pemerintah dan masyarakat sekitar IKM menjalin hubungan dan saling mendukung

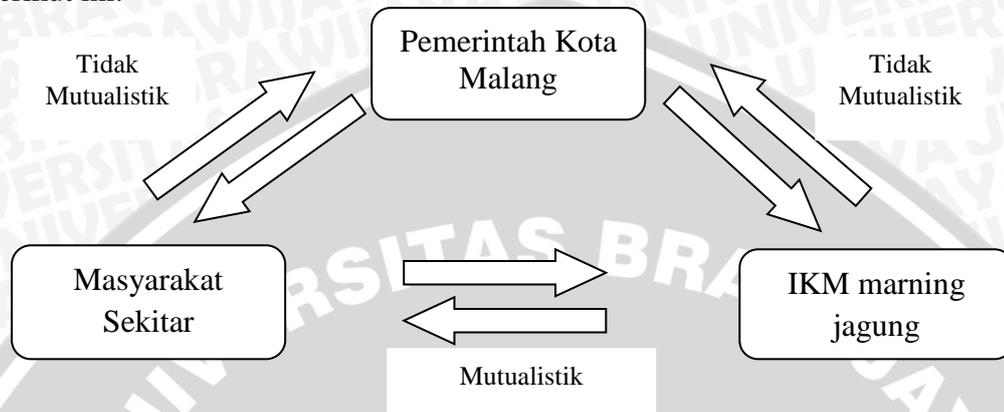
Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar IKM marnig jagung tidak terjalin dengan baik dalam hal kaitannya pengembangan IKM. Terihat dari penyajian data diatas, bahwa masyarakat saja tidak mengetahui pemerintah mana yang menaungi kegiatan IKM. Masyarakat lebih banyak berinteraksi langsung dengan IKM daripada dengan pemerintahnya. Begitu juga dengan pemerintah, tidak ada kegiatan yang dilakukan sampai merambah jauh ke masyarakat sekitar IKM tersebut. Mengingat bahwa kontribusi masyarakat terhadap IKM juga sangat besar, maka seharusnya pemerintah mampu menjalin hubungan dan bermitra dengan masyarakat. Karna keterkaitan masyarakat dengan pengembangan IKM masuk dengan apa yang dinyatakan Hafsah (2000:63) dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara konkret adalah:

- g. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- h. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- i. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- j. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
- k. Memperluas kesempatan kerja, serta
- l. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Berkaitan antara pengembangan IKM dengan keadaan masyarakat mampu memberikan hal yang baik bagi memenuhi kebutuhan dan pendapatan masyarakat. Dari hal tersebut seharusnya pemerintah menyadari jika pelaksanaan pengembangan IKM tidak hanya melibatkan IKM saja tetapi juga masyarakat sekitar, sehingga dapat terjalinnya hubungan atau kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Sulistiani dalam Domai (2010:97-98) mengemukakan model kemitraan berdasarkan fenomena biologis salah satunya adalah kemitraan mutualistik, yang merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Dalam kenyataannya dilapangan, pemerintah khususnya Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak memiliki hubungan yang mutualistik atau menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Pemerintah tidak banyak melakukan interaksi terhadap masyarakat disekitar wilayah IKM marning jagung, masyarakat juga tidak banyak mengetahui mengenai peran pemerintah serta tidak merasakan adanya kepentingan pemerintah di dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan proses kegiatan marning jagung. Masyarakat merasa hanya cukup berinteraksi dengan pelaku IKM saja tanpa mengetahui adanya kepentingan pemerintah di dalamnya. Hal ini perlu diperbaiki, karena di dalam pengembangan IKM bukan hanya IKM saja yang merasakan dampaknya, tetapi masyarakat sekitar juga merasakan.

Dari ketiga hubungan yang terjalin antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat sekitar, dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



Gambar 4: Pola Relasi/Hubungan antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Sekitar

Sumber: Olahan Penulis, 2016.

Dari pola gambar hubungan diatas diketahui bahwa:

- (1) Hubungan antara IKM marning jagung dengan pemerintah tidak mutualistik/tidak menguntungkan, hal ini dikarenakan pemerintah kurang aktif dalam pengembangan IKM marning jagung, minimnya kunjungan dan pendataan dari pemerintah, pelaku IKM tidak aktif dalam pembentukan kelompok atau paguyuban dan tumpang tindih kepentingan dan pembinaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas.
- (2) Hubungan antara IKM marning jagung dengan masyarakat sekitar mutualistik/menguntungkan, hal ini dikarenakan IKM berkontribusi terhadap pembangunan disekitar wilayah produksi, proses produksi marning jagung melibatkan masyarakat sekitar, kerukunan antara pelaku

IKM dengan masyarakat sekitar sangat baik, masyarakat tidak dirugikan dari seluruh kegiatan proses produksi marning jagung.

- (3) Hubungan antara Pemerintah Kota Malang dengan masyarakat sekitar tidak mutualistik/tidak menguntungkan, hal ini dikarenakan pemerintah tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar IKM marning jagung dan masyarakat tidak mengetahui peran pemerintah didalam pengembangan IKM.

2. Dampak hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang, dan Masyarakat dalam pengembangan IKM

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Begitupun dengan pelaksanaan pengembangan yang dilakukan terhadap IKM. Bukan hanya dampak dari pengembangan saja yang dapat dijelaskan, namun hubungan antar pihak atau *stakeholder* yang terjalin selama ini juga bisa menimbulkan dampak bagi pengembangan IKM tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan di dalam penyajian data dan analisis mengenai hubungan yang selama ini terjadi antara IKM, pemerintah dan masyarakat di dalam pengembangan IKM. Dari hasil tersebut dapat diketahui tidak semua hubungan yang terjalin dari ketiga pihak tersebut merupakan hubungan yang mutualistik. Ada hubungan yang tidak saling menguntungkan seperti halnya hubungan antara IKM dengan pemerintah dan juga hubungan antara pemerintah dengan IKM. Dari penjelasan tersebut tentunya dapat diambil sebuah kesimpulan dari dampak yang terjadi.

Dampak yang terjadi dari hubungan ketiga pihak tersebut mempengaruhi secara signifikan dalam pengembangan IKM marning jagung. Hubungan yang mutualistik sudah pasti menjadikan dampak yang positif terhadap pihak yang menjalaninya. Namun hubungan yang tidak mutualistik akan berdampak negatif bagi pelaksanaan kegiatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Dari penyajian data diatas, ditemukan dampak positif dan dampak negatif dari hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung, pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan IKM sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) Adanya kerukunan antara IKM dengan Masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya sifat saling membantu dan menghargai antar sesama masyarakat di Jl. Simpang Teluk Bayur. Masing-masing pihak menyadari akan pentingnya saling membantu karena adanya keuntungan yang dialami.
- 2) Masyarakat berkontribusi dalam memasarkan produk IKM, kontribusi masyarakat terhadap masalah pemasaran bagi IKM sangat membantu. Masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari tenaga kerja IKM saja, tetapi mereka juga memanfaatkan produk IKM untuk dipasarkan kembali sesuai dengan kemampuan dan usaha masyarakat sendiri. Tentunya hal ini sangat membantu para pelaku IKM untuk lebih mudah mendapatkan pasar.
- 3) Pembangunan lingkungan sekitar terlaksana dengan baik, kontribusi pelaku IKM dengan lingkungan sekitar terwujud dari pembangunan yang dilakukan di sekitar wilayah produksi IKM dimana pembangunan fasilitas

kampung seperti jalan, masjid, langgar dan acara masyarakat disana didanai langsung oleh IKM sebagai donatur, sehingga masyarakat merasa terbantu untuk melaksanakan kegiatan di kampung mereka.

- 4) Terbentuknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pelaksanaan kegiatan proses produksi di wilayah IKM marning jagung melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Hal ini membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

b. Dampak Negatif

- 1) Pemasaran yang semakin sulit bagi IKM, sulitnya mencari pasar luas bagi IKM menjadi masalah tersendiri belakangan ini. Kemampuan IKM memasarkan produknya hanya terbatas dari apa yang mereka miliki tanpa adanya bantuan pemasaran yang dilakukan pemerintah. Upaya pemerintah dalam mempromosikan produk IKM seperti diadakannya pameran tidak dirasakan oleh semua pelaku IKM, bahkan pelaksanaan pameran juga tidak berdampak baik bagi peningkatan pemasaran produk IKM.
- 2) Sulitnya penerimaan bantuan bagi IKM dalam pengembangannya, kesulitan mendapatkan bantuan baik berupa alat, pembinaan, pelatihan atau bahkan pemasaran dari pemerintah dirasakan langsung oleh pelaku IKM, penyebab dari permasalahan ini juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah dan juga tidak adanya pembentukan kelompok atau paguyuban yang dilakukan oleh para pelaku IKM. Dari hal tersebut berdampak kepada ketidaktahuan pemerintah atas keluhan dan kekurangan yang dibutuhkan IKM selama ini.

- 3) Berkurangnya jumlah IKM marning jagung, jumlah IKM marning jagung semakin berkurang dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah untuk melaksanakan pengembangan bagi IKM. IKM sendiri merasakan hal tersebut terjadi karena adanya ketidakmampuan IKM dalam mengadakan modal usahanya dan semakin sulitnya pemasaran yang dilakukan.

3. Keinginan dari IKM, Pemerintah Kota Malang, dan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan Mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Pengembangan industri merupakan upaya atau suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk meningkatkan suatu nilai fungsi dalam memproses atau mengolah barang agar mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mampu mendorong pembangunan suatu daerah khususnya daerah pedesaan. pengembangan industri kecil menengah pada dasarnya merupakan sebuah cara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik dimana didalamnya termasuk juga peningkatan mutu sumber daya manusia yang ada. Di dalam pengembangan industri kecil dan menengah diharapkan dapat membantu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan. Sementara itu upaya pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.

Dalam pengembangan industri kecil menengah (IKM) memiliki tujuan yang secara umum dijelaskan menurut Dumairy (1996:48) sebagai berikut:

- d. Sebagai argumentasi penciptaan lapangan pekerjaan;
- e. Memiliki keunggulan komperatif dan mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
- f. Sebagai loncatan teknologi dengan kata lain pengembangan industri kecil menengah akan menggunakan teknologi yang lebih canggih niscaya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar.

Pengembangan IKM bertujuan bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan mengurangi angka pengangguran, pencegahan adanya persaingan tidak sehat yang mungkin saja terjadi di antara pelaku industri dan adanya penggunaan teknologi canggih dari sebelumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan dilakukan secara berkala agar IKM mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mampu bertahan dari arus persaingan usaha agar tidak hilang begitu saja. Pengembangan industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Kartasasmita dalam Pradana (2014:98) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

- f. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, disamping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
- g. Peningkatan akses pasar yang meliputi suatu *spectrum* kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan.
- h. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.

- i. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi menjamin terjadinya pemerataan sosial (sosial equity).
- j. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Pengembangan IKM yang sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tersebut menjadikan IKM semakin kuat dalam bersaing, bukan hanya dari segi manajemen, tetapi juga kualitas produksi dan pemasaran yang baik. Namun pengembangan yang dilakukan terhadap IKM mampu berdampak baik bagi kedepannya, sedangkan pengembangan dapat berdampak buruk jika elemen-elemen di dalamnya tidak mendukung. Elemen yang berpengaruh terhadap pengembangan IKM adalah hubungan yang terjalin di antara pihak-pihak yang terkait. Pihak yang terkait dari pengembangan IKM terdiri dari pelaku IKM, pemerintah serta masyarakat. Kontribusi dari ketiga pihak ini menjadikan IKM terus berkembang. Sesuai dengan penyajian data dan analisa diatas, diketahui bahwa hubungan yang terjalin dari ketiga pihak tersebut dalam lingkup pengembangan IKM marning jagung tidak terjalin dengan baik dan saling

menguntungkan. Hal tersebut mengakibatkan adanya dampak yang terjadi dirasakan bagi perkembangan IKM marning jagung.

Untuk memperbaiki hubungan yang selama ini terjadi sehingga mengakibatkan dampak yang signifikan bagi IKM, maka perlu adanya rencana atau langkah yang harus dilakukan. Langkah tersebut dirumuskan agar pengembangan IKM tetap berlanjut dan meminimalisir dampak negatif yang ada, sehingga IKM mampu bertahan dan bersaing sesuai dengan perubahan zaman.

Untuk merumuskan sebuah langkah kedepan guna menjadikan sebuah hubungan yang mutualistik, alangkah lebih baiknya mengetahui keinginan dari berbagai pihak untuk memperbaiki hubungan yang telah terjalin. Keinginan-keinginan tersebut disampaikan oleh pihak yang terkait dalam pengembangan IKM yaitu pelaku IKM, pemerintah dan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

a. Keinginan IKM agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Keinginan merupakan hal yang penting untuk diketahui, hal ini dimaksudkan sebagai salah satu landasan dalam menyusun sebuah langkah-langkah hubungan yang mutualistik. Keinginan perlu diketahui agar langkah-langkah yang dirumuskan nantinya dapat berjalan dengan baik, serta sebagai penampung aspirasi baik dari pelaku IKM, pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan terkait dengan pengembangan IKM. Karena yang terjadi selama ini hubungan diantara ketiga pihak tidak selamanya

menguntungkan atau mutualistik, sehingga terjadi suatu ketimpangan di dalam pengembangan IKM.

Sebelum mengetahui keinginan yang diutarakan oleh pelaku IKM marning jagung, baiknya kita membahas mengenai hubungan yang selama ini terjadi antara IKM dengan pemerintah dan masyarakat. IKM selama ini merasa bahwa hubungan yang terjadi dengan pemerintah tidak terjalin dengan baik, kurangnya perhatian pemerintah mengenai adanya IKM marning jagung menjadi hal yang utama. Di dalam pengembangan IKM marning jagung, pelaku IKM merasa selama ini mereka berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah dalam hal pengembangan. Pengembangan sendiri lebih jelasnya dapat dikatakan suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat memenuhi sebuah tujuan yang lebih baik lagi dengan beberapa proses yang dilakukan. Proses yang dilakukan secara umum biasanya terdiri dari sosialisasi, pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan serta pemasaran. Namun IKM marning jagung tidak semua merasakan hal itu, terlebih lagi kendala yang mereka hadapi saat ini adalah sulitnya untuk memasarkan produk mereka.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengakui bahwa pengembangan yang dilakukan selama ini kurang maksimal terhadap IKM marning jagung, hal ini juga disebabkan karena kurang aktifnya para pelaku IKM untuk menyampaikan keluhan kesah mereka kepada instansi. Sehingga pemerintah tidak mengetahui banyak apa saja keluhan dan kekurangan yang dialami oleh para pelaku IKM marning jagung. Dari hal tersebut terlihat adanya ketimpangan di dalam pengembangan IKM, dimana kedua belah pihak saling menunggu dan tidak

aktif dalam melakukan proses pengembangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang terjadi selama ini, terdapat beberapa keinginan yang di utarakan pelaku IKM.

Pertama, pelaku IKM menginginkan adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi yang dihadapi IKM. Perhatian yang diinginkan IKM terhadap pemerintah lebih besar kepada bantuan yang diberikan agar proses kegiatan produksi lebih lancar. Bantuan yang sangat dibutuhkan oleh IKM adalah bantuan dalam hal pemasaran, saat ini banyak pelaku IKM yang mengeluh bahwa pemasaran yang ada selama ini sedang sulit sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Hal lain yang dibutuhkan IKM dari pemerintah adanya pengawasan dan pembinaan lebih lanjut secara berkala, karena terlihat bahwa IKM senang jika ada pemerintah yang memberi perhatian kepada mereka.

Kedua, keinginan IKM selanjutnya adalah agar IKM marning jagung dapat terus bertahan menjadi ciri khas Kota Malang yang tidak kalah dengan makanan khas lainnya. Karena IKM menganggap bahwa potensi dari marning jagung lumayan besar, sehingga perlu adanya pelestarian guna mempertahankan eksistensi. Selama ini, sudah mengalami pengurangan jumlah IKM marning jagung dikarenakan keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Ketiga, IKM menginginkan adanya cara-cara yang lebih efektif dibuat oleh pemerintah dalam bidang pemasaran produk IKM. IKM mengalami kesulitan dalam pemasaran, sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan proses produksi mereka. IKM juga beranggapan bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah kurang memberikan efek positif bagi produk olahan mereka, tidak ada keberlanjutannya

dari pelaksanaan tersebut sehingga mereka tidak dapat melebarkan sayap usaha industri tersebut. Keempat, dari hubungan yang sudah terjalin dengan masyarakat sekitar yang dapat dikatakan sangat baik, IKM menginginkan agar hubungan tersebut tetap berjalan dengan begini adanya. Kerukunan yang sudah terjaga di lingkungan tersebut tetap terjaga, tidak ada masalah di kemudian hari. Hal ini dikarenakan IKM menyadari pentingnya kontribusi masyarakat di dalam proses produksi, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai perluasan pasar.

b. Keinginan Pemerintah agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Pemerintah memiliki tugas sebagai pelayan dan pembina masyarakat, adalah hal pengembangan IKM pemerintah memfasilitasi apa yang dibutuhkan IKM dalam pengembangannya. Pemerintah juga sebagai pembina dan pengawas dari jalannya kegiatan IKM, dimana pemerintah mampu menjadikan IKM lebih baik lagi dan kuat di dalam bersaing. Selain itu, pemerintah sebagai penyedia layanan dan informasi bagi masyarakat luas akan adanya sebuah IKM yang memproduksi olahan khas suatu daerah. Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap IKM bertujuan agar menguatkan perekonomian masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing antar IKM dari daerah lain. Tetapi hubungan yang terjalin tidak baik antara pemerintah dengan IKM maupun masyarakat dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat akan penggunaan pemerintah di setiap lini.

Dalam pengembangan IKM marning jagung Kota Malang, pemerintah dalam hal ini yang menangani adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kurang maksimal dalam menjalankan program pengembangan. Hubungan yang terjalin dengan IKM dan masyarakat juga tidak begitu baik, serta kurangnya perhatian terhadap perkembangan IKM. Pendataan yang lama tidak di perbaharui, pengawasan yang telah lama tidak dilakukan, serta pelaksanaan pemasaran yang tidak maksimal menjadi penyebab kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi IKM marning jagung. Namun di dalam pernyataannya, pemerintah juga mengutarakan bahwa mereka dapat maksimal melaksanakan pengembangan jika saja IKM aktif dalam menyampaikan keluhan dan kekurangan melalui kelompok atau paguyuban yang dibentuk. Namun kenyataan di lapangan, sentra IKM marning jagung Kota Malang tidak membentuk kelompok atau paguyuban tersebut.

Sesuai dengan permasalahan dan kendala tersebut, dapat dirumuskan beberapa langkah untuk memperbaiki hubungan yang selama ini sudah terjadi. Sebelum merumuskan langkah yang harus dilakukan, berikut merupakan keinginan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam hubungan yang terkait dengan pengembangan IKM marning jagung. Pertama, IKM marning jagung harus aktif dalam membentuk kelompok atau paguyuban. Fungsi kelompok ini adalah agar keluhan dan kekurangan yang dialami oleh IKM dapat terumuskan dengan baik, kemudian dibuat sebuah proposal untuk diajukan ke pemerintah. Dengan hal itu, pemerintah mengetahui keluhan dan kekurangan yang dibutuhkan secara garis besar dari IKM marning jagung.



Kedua, pemerintah berencana akan melakukan kunjungan terhadap IKM marning jagung di Kota Malang. Kunjungan yang dilakukan adalah sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintah di dalam pengawasan dan pembinaan terhadap IKM, guna mengetahui kondisi di lapangan saat ini. Ketiga, pendataan akan dilakukan untuk memperbaharui data lama bagi IKM marning jagung. Telah diketahui bahwa data terakhir yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tentang IKM marning jagung adalah tahun 2013 dan belum diperbaharui hingga saat ini. Keempat, pemerintah kedepannya akan mengajak pelaku IKM marning jagung dalam mempromosikan produk seperti kegiatan pameran. Hal ini perlu dilakukan agar IKM tetap bertahan dan memiliki wilayah pasar yang luas.

c. Keinginan masyarakat agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung

Masyarakat merupakan satu pihak yang ikut berkontribusi di dalam pengembangan IKM, masyarakat memiliki peran baik dalam hal tenaga kerja maupun proses pemasaran produk. Oleh karenanya hubungan dengan masyarakat dari pihak lain seperti IKM dan pemerintah penting adanya dalam menunjang proses pengembangan IKM. Dari penyajian dan analisis diatas, diketahui bahwa hubungan yang mutualistik hanya terjadi antara IKM dengan masyarakat saja, sedangkan hubungan di antara pemerintah dengan masyarakat tidak mutualistik. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat berhubungan baik dengan IKM, hal tersebut dikarenakan masyarakat berkontribusi dalam kegiatan

produksi marning jagung. Masyarakat sekitar Jl. Simpang Teluk Bayur berkontribusi sebagai tenaga kerja maupun pihak yang membantu memasarkan produk IKM.

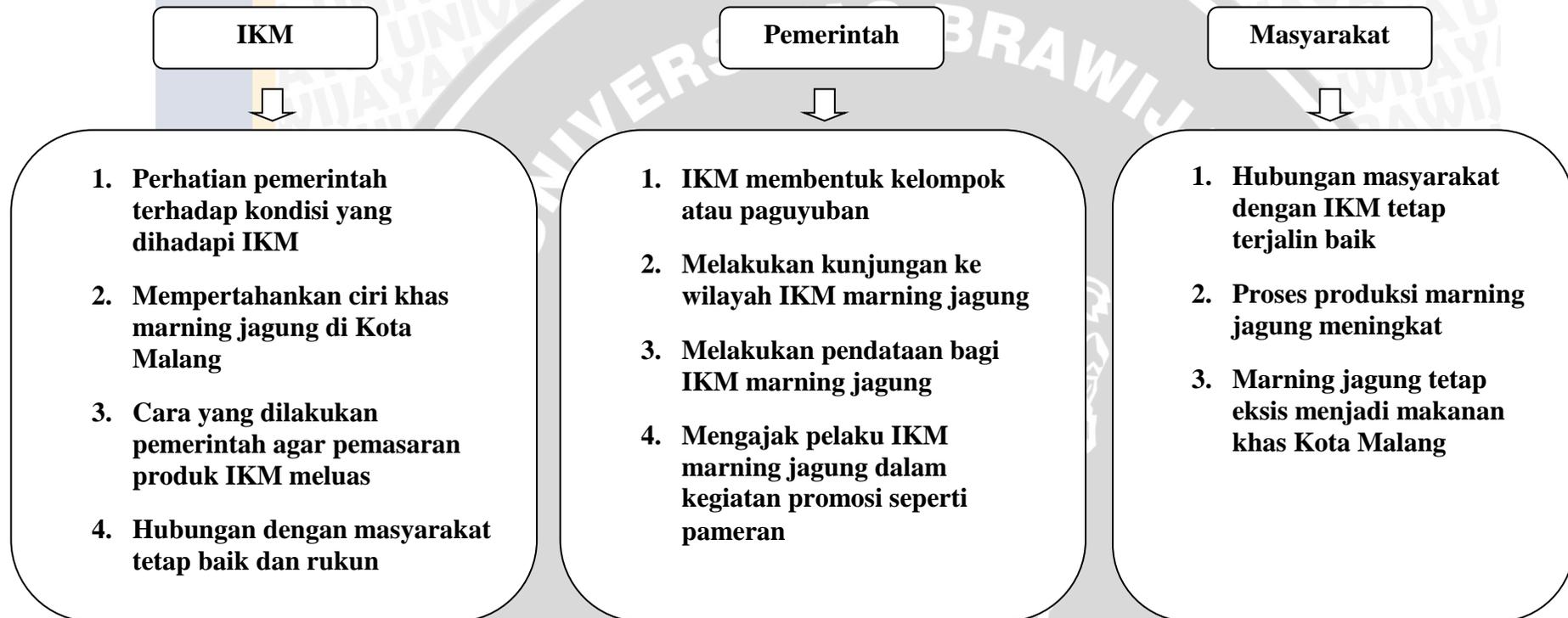
Sari sisi lain, terlihat bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan IKM kurang baik. Artinya, pemerintah hanya langsung berhubungan dengan IKM saja tanpa melihat pentingnya peran masyarakat. Masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui peran pemerintah di dalam pengembangan IKM. Sebaliknya, masyarakat hanya berhubungan langsung dengan IKM, hal ini dapat terjadi karena anggapan bahwa keuntungan hanya didapatkan ketika masyarakat melakukan hubungan dengan IKM saja. Sama seperti halnya IKM dan pemerintah, masyarakat juga memiliki keinginan yang diutarakan untuk kedepannya di dalam pengembangan IKM agar terjadinya hubungan yang mutualistik dari sebelumnya. Pertama, hubungan masyarakat dengan IKM tetap berjalan baik. Masyarakat menginginkan hal ini tidak ditampikkan bahwa masyarakat juga membutuhkan peran dari IKM di dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Masyarakat dan IKM sesuai dengan kenyataannya saling membantu dan berkontribusi satu sama lain tanpa adanya pihak yang dirugikan dari proses kegiatan produksi marning jagung. Baik dalam hal tenaga kerja, pemasaran dari masyarakat maupun dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi marning jagung.

Kedua, masyarakat menginginkan agar proses produksi marning jagung meningkat. Hal ini tentunya berkaitan dengan keadaan masyarakat sekitar yang juga mendapatkan manfaat dari keberadaan IKM marning jagung. Jika produksi

marning jagung meningkat, maka masyarakat yang menjadi tenaga kerja di dalam produksi IKM tersebut akan tetap bekerja, dan masyarakat yang lain juga dapat ikut memasarkan hasil produksi dari marning jagung tersebut, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya menjadikan hubungan yang bergantung pada tingkat kepercayaan. Hal ini terjadi karena hubungan yang terjalin antara IKM dengan masyarakat selama ini sangat mutualistik atau menguntungkan sehingga mampu berkontribusi masing-masing terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, marning jagung tetap eksis menjadi makanan khas Kota Malang. Hal ini diinginkan masyarakat agar marning jagung tidak hilang begitu saja karena kurangnya pengembangan terhadap IKM. Masyarakat menganggap bahwa sejak dahulu kampung mereka terkenal dengan produksi marningnya yang merupakan salah satu makanan khas Kota Malang sehingga ingin marning jagung tetap bertahan. Sesuai dengan kebutuhan dan data yang menerangkan mengenai produksi marning jagung, terlihat bahwa sebenarnya produksi marning jagung di Kelurahan Pandanwangi sangat berpotensi tinggi. Marning jagung bisa menjadi produk unggulan khas Kota Malang selain kripik tempe jika saja pengembangan yang dilakukan terus berlanjut dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari keinginan-keinginan yang telah disampaikan oleh ketiga pihak diatas antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat sekitar dapat disimpulkan dengan sebuah bagan yang disusun oleh penulis mengenai keinginan masing-masing pihak yang telah disebutkan diatas agar tercapainya hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung adalah sebagai berikut:

Keinginan IKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Agar Tercapai Hubungan Mutualistik Dalam Pengembangan IKM Marning Jagung



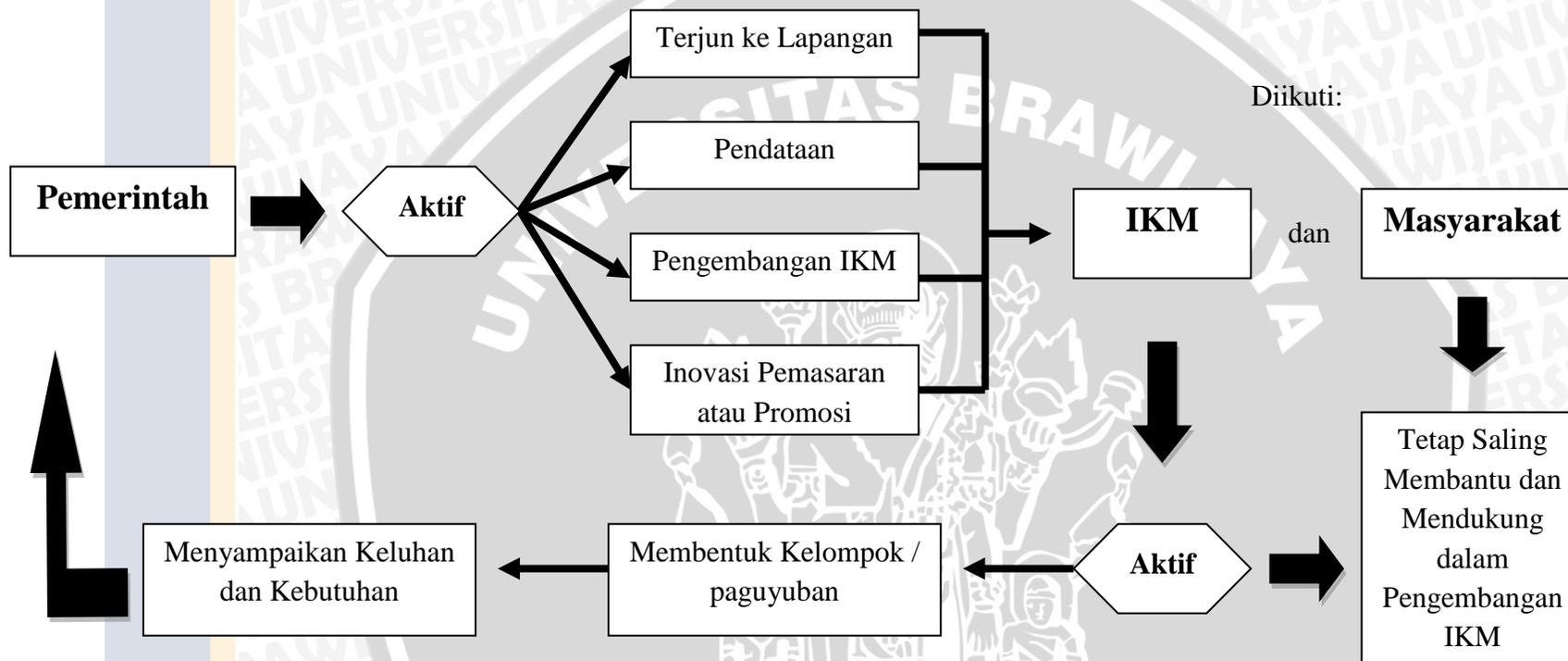
Gambar 5: Keinginan dari IKM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Agar Tercipta Hubungan Mutualistik Dalam Pengembangan IKM Marning Jagung

Sumber: Olahan Penulis, 2016.

Dari penjelasan diatas mengenai keinginan masing-masing pihak baik IKM, pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan IKM kedepannya, dapat disimpulkan bahwa keinginan lebih baik diharapkan dari semua pihak. Oleh karena itu, dari keinginan tersebut dapat ditarik sebuah rumusan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara IKM, pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan IKM. Langkah-langkah tersebut dirumuskan penulis sebagai berikut:

- 1) Tindakan aktif dari pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan dan masyarakat guna mengetahui kondisi yang ada
- 2) Pemerintah melakukan pendataan langsung dan terbaru bagi IKM
- 3) Pemerintah melaksanakan program pengembangan terhadap IKM dan masyarakat diikutkan
- 4) Pemerintah mencari inovasi dalam hal mempromosikan produk IKM sebagai sarana bagi IKM mengembangkan sisi pemasaran dan produksi marning jagung tetap eksis
- 5) IKM marning jagung aktif dalam membentuk kelompok atau paguyuban sebagai wadah penyampaian keluhan dan kekurangan yang dibutuhkan
- 6) Hubungan antara IKM dan masyarakat sekitar tetap rukun dan saling mendukung dalam hal pengembangan IKM dan pembangunan lingkungan
- 7) Adanya sinergi dan koordinasi antar OPD/Dinas terkait dalam pembinaan IKM agar tidak tumpang tindih

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dirumuskan penulis diatas, dapat digambarkan sebuah model langkah sebagai berikut:



Gambar 6: Model langkah-langkah agar tercapai hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM marning jagung
 Sumber: Olahan Penulis, 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis relasi antara industri kecil menengah (IKM), pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan IKM dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan yang terjadi antara IKM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan IKM selama ini adalah:
 - a. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan Pemerintah Kota Malang tidak mutualistik atau tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah kurang aktif dalam pengembangan IKM marning jagung, minimnya kunjungan dan pendataan dari pemerintah, pelaku IKM tidak aktif dalam pembentukan kelompok atau paguyuban dan tumpang tindih kepentingan dan pembinaan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas.
 - b. Hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung dengan masyarakat adalah hubungan mutualistik atau saling menguntungkan. Hal ini disebabkan karena IKM berkontribusi terhadap pembangunan disekitar wilayah produksi, proses produksi marning jagung melibatkan masyarakat sekitar, kerukunan antara pelaku IKM dengan masyarakat sekitar sangat

baik, masyarakat tidak dirugikan dari seluruh kegiatan proses produksi marning jagung.

- c. Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kota Malang dengan masyarakat tidak mutualistik atau tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar IKM marning jagung dan masyarakat tidak mengetahui peran pemerintah didalam pengembangan IKM.

2. Dampak hubungan yang terjadi antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang dan masyarakat dalam pengembangan IKM:

- a. Dampak Positif yang terjadi antara lain adalah adanya kerukunan antara IKM dengan masyarakat, masyarakat berkontribusi dalam memasarkan produk IKM, pembangunan lingkungan sekitar IKM terlaksana dengan baik dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- b. Dampak negatif yang timbul antara lain adalah pemasaran yang semakin sulit bagi IKM, sulitnya penerimaan bantuan bagi IKM di dalam pengembangannya dan berkurangnya jumlah IKM marning jagung

3. Keinginan dari IKM, Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat agar tercapainya sebuah hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan IKM agar tercapainya hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM antara lain adalah perhatian pemerintah terhadap kondisi yang dihadapi IKM, mempertahankan ciri khas marning jagung di

Kota Malang, cara yang dilakukan pemerintah agar pemasaran produk IKM meluas, dan hubungan dengan masyarakat tetap baik dan rukun.

- b. Keinginan pemerintah Kota Malang agar tercapainya hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM adalah IKM membentuk kelompok atau paguyuban, melakukan kunjungan ke wilayah IKM Marning jagung, melakukan pendataan bagi IKM marning jagung, dan mengajak pelaku IKM marning jagung dalam kegiatan promosi seperti pameran.
 - c. Keinginan masyarakat sekitar agar tercapainya hubungan yang mutualistik dalam pengembangan IKM adalah hubungan masyarakat dengan IKM tetap terjalin dengan baik, proses produksi marning jagung meningkat, dan marning jagung tetap eksis menjadi makanan khas Kota Malang.
4. Langkah yang harus dilakukan agar terjadi hubungan yang mutualistik antara IKM marning jagung, Pemerintah Kota Malang dan masyarakat dalam pengembangan IKM adalah sebagai berikut:
- a. Tindakan aktif dari pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan dan masyarakat guna mengetahui kondisi yang ada
 - b. Pemerintah melakukan pendataan langsung dan terbaru bagi IKM
 - c. Pemerintah melaksanakan program pengembangan terhadap IKM dan masyarakat diikutkan
 - d. Pemerintah mencari inovasi dalam hal mempromosikan produk IKM sebagai sarana bagi IKM mengembangkan sisi pemasaran dan produksi marning jagung tetap eksis

- e. IKM marning jagung aktif dalam membentuk kelompok atau paguyuban sebagai wadah penyampaian keluhan dan kekurangan yang dibutuhkan
- f. Hubungan antara IKM dan masyarakat sekitar tetap rukun dan saling mendukung dalam hal pengembangan IKM dan pembangunan lingkungan
- g. Adanya sinergi dan koordinasi antar OPD/Dinas terkait dalam pembinaan IKM agar tidak tumpang tindih

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk memperlancar terciptanya hubungan mutualistik antara IKM, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengembangan IKM saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak baik IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, atau masyarakat harus bisa lebih aktif dalam kegiatan pengembangan IKM. Selain IKM dan masyarakat sekitar yang melaksanakan pemasaran produk IKM, pemerintah juga aktif didalamnya. Salah satu kegiatan pemasaran yang dianjurkan penulis adalah adanya promosi atau pameran yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang khusus untuk produk olahan khas daerah. Pameran dalam rangka pemasaran tersebut harus melibatkan masyarakat luas hingga berbagai daerah agar produk IKM dapat dikenal dan memiliki pasar luas. Sementara itu untuk IKM dan masyarakat yang memasarkan produk marning jagung, harus berinovasi di dalam pemasaran seperti memasarkan produk melalui media sosial yang menurut penulis saat ini lebih mudah dan cepat.

2. Untuk mempermudah IKM mendapatkan bantuan dalam proses produksinya, IKM marning jagung juga harus aktif di dalam membentuk kelompok/paguyuban yang menaungi seluruh pelaku IKM. Dimana kelompok/paguyuban yang dibentuk tersebut dapat menampung keluhan dan kekurangan yang dibutuhkan dalam sebuah proposal, kemudian proposal tersebut diajukan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Tujuan dibuatnya proposal adalah agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat mengetahui keluhan dan kekurangan yang dibutuhkan IKM marning jagung secara garis besar kemudian memberikan dilaksanakan program pemberian bantuan bagi IKM.
3. Demi mempertahankan jumlah IKM dalam memproduksi marning jagung sebagai makanan ringan khas Kota Malang, harus adanya kontribusi dari semua pihak. Selain dalam hal bantuan dan pemasaran, hal lain yang menurut penulis penting adalah pengembangan dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pengembangan yang dilakukan harus diikuti oleh seluruh IKM marning jagung serta masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan tersebut harus memiliki tujuan agar IKM mampu bersaing dalam memproduksi dan memasarkan marning jagung sesuai dengan perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2010-2012*.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahniar, Aty dan Madya, Widyaswara. 2014. *Koordinasi dan Hubungan Kerja dalam Organisasi Perkantoran*. Diakses dari [Http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php ? a= artikel&id= 888](http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=888) pada tanggal 1 November 2014 pukul 23:05
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Kebijakan Kerjasama Antar Daerah*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan.
- Hetifah, Sumarto, Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance “20 Pakarsa Inovatif Dan Partisipasi Indonesia”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Sosial.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Istianto, Bambang. 2011. *Privatisasi Dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasiram, Mohamad. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

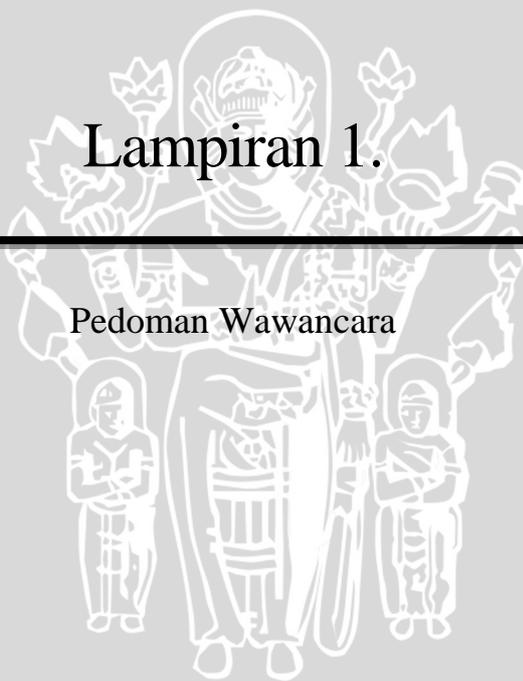
- _____. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roposadakarya.
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghallia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Prima Media.
- _____. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Pradana, Candra Arysta. 2014. *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah*. Skripsi: Malang Universitas Brawijaya.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tindak Untuk Publik*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Ritonga, Abdurrahman. 2001. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Lembaga penerbit: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Saleh, Irsyan Ansyhari. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarif, S. 1991. *Industri dan Tenaga Kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3SE.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI-Press
- Tugiman, Hiro. 1989. *Pengertian Dampak Lingkungan*. Jakarta: CV Liberty.
- Tusakdiyah, Nyimas Halima. 2013. *Struktur Organisasi dan Unsur-Unsur Administrasi*. (Diakses dari [http://www.academia.edu/4298843/Struktur_Organisasi_serta_UnsurUnsur_Administrasi-pada_PT._HM_Sampoerna](http://www.academia.edu/4298843/Struktur_Organisasi_serta_UnsurUnsur_Administrasi-pada_PT._HM_Sampoerna_pada_tanggal_2_Desember_2016_pukul_20.00) pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 20.00)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: Lkis.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 1.

Pedoman Wawancara



Pedoman Wawancara Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

1. Bagaimana pengembangan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM? Khususnya bagi IKM Marning jagung?
2. Bagaimana hubungan selama ini antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM dan masyarakat?
3. Apa saja bentuk hubungan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM dan masyarakat?
4. Bagaimana kondisi hubungan saat ini yang terjalin dengan IKM marning jagung dan masyarakat?
5. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM marning jagung?
6. Seberapa sering Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan dan pendataan terhadap IKM marning jagung?
7. Seperti apa bentuk pengembangan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM?
8. Seberapa penting hubungan dengan IKM dalam kaca mata Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
9. Apa yang menjadi kendala dari hubungan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM manring jagung dan masyarakat?
10. Apa program kedepan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM marning jagung?

11. Apa keinginan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM dan masyarakat agar tercapainya hubungan yang mutualistik?

Pedoman Wawancara Untuk IKM Marning Jagung Kota Malang

1. Sudah berapa lama produksi marning jagung dilaksanakan?
2. Bagaimana dengan pengembangan yang selama ini dilakukan terhadap IKM?
3. Apa saja bantuan yang selama ini diterima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
4. Seberapa sering Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kegiatan terhadap IKM marning jagung?
5. Bagaimana hubungan selama ini antara IKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
6. Apa keinginan IKM terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengembangan IKM?
7. Apa keinginan IKM terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tercapai hubungan yang mutualistik?
8. Bagaimana hubungan yang terjalin selama ini dengan masyarakat sekitar?
9. Bagaimana produksi yang dilakukan IKM terhadap kegiatan masyarakat sekitar?
10. Adakah masalah selama ini antara IKM dengan masyarakat?
11. Apa saja kontribusi IKM kepada masyarakat?
12. Apa saja dukungan yang diberikan oleh masyarakat?

13. Apa keinginan IKM kepada masyarakat agar tercapai hubungan yang mutualistik?

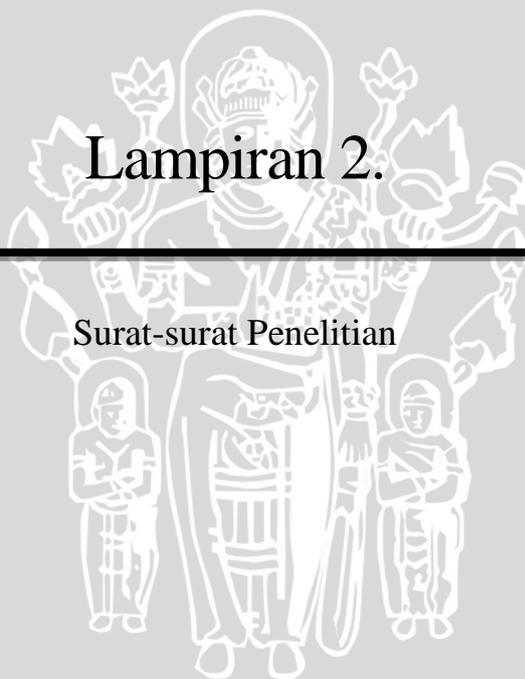
Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Jl. Simpang Teluk Bayur

1. Bagaimana hubungan masyarakat dengan IKM marning jagung selama ini?
2. Apa pendapat masyarakat dengan adanya kegiatan produksi marning jagung?
3. Apa saja keuntungan yang dirasakan dengan adanya IKM marning jagung?
4. Apa kerugian yang dirasakan dengan adanya kegiatan produksi marning jagung?
5. Apa saja dukungan yang masyarakat berikan terhadap IKM marning jagung?
6. Apa keinginan masyarakat kedepannya terhadap hubungan dengan IKM marning jagung?
7. Apakah masyarakat mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan IKM?
8. Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
9. Apa keinginan dari masyarakat terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan IKM marning jagung?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 2.

Surat-surat Penelitian





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 7331/UN.10.3/R/2016

Lampiran : -

Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Malang
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Galih Satrio Pambudi
Alamat : Jalan Arumba No.03 RT 01 RW 04, Kelurahan Tunggulwulung,
Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 125030100111043
Jurusan : Administrasi Publik
Tema : Hubungan Mutualistik Antara Industri Kecil Menengah (IKM),
Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan IKM,
(Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang)
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 04 Oktober 2016
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si
NIP. 19690524 200212 2 002





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ~~1383~~.../UN.10.3/PC/2016

Lampiran : -

Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Pelaku Industri Kecil Menengah Marning Jagung
Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Galih Satrio Pambudi
Alamat : Jalan Arumba No.03 RT 01 RW 04, Kelurahan Tunggulwulung,
Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 125030100111043
Jurusan : Administrasi Publik
Tema : Hubungan Mutualistik Antara Industri Kecil Menengah (IKM),
Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan IKM.
(Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang)
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 04 Oktober 2016
a.n Dekan
Ketua Program Studi Administrasi Publik



helly
Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si
NIP. 19690524 200212 2 002





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/22.10.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Program Studi Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 13831/UN.10.3PG/2016 tanggal 4 Oktober 2016, Perihal: Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini

- a. Nama : GALIH SATRIO PAMBUDI.
b. NIM : 125030100111043.
c. Judul : Hubungan Mutualistik Antara Industri Kecil Menengah (IKM), Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pengembangan IKM. (Studi Pada Sentra IKM Marning Jagung Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas akhir yang berlokasi di :
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan s/d 6 November 2016.

Malang, 5 Oktober 2016

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Drs. A. LY. HORO TRIATMADJI,
Pembina Tk. I
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Program Studi Administrasi
Publik FIA Univ. Brawijaya Malang;
- Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Malang melalui
Rakobanopol Kota Malang



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 3.

Data Sekunder Penelitian

DAFTAR POTENSI
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2015

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: JAWA TIMUR
: MALANG

No	KBLU	JUMLAH PERUSAHAAN	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp.000)	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	NILAI BEBERP (Rp.000)	7
1	2	3	4	5	6		
1	10130-INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	15	75	3034047	1658815000	5614000	
3	10312-INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	7	107	337900	7050000	2120000	
4	10330-INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	1	5	1156220	4500		
5	10391-INDUSTRI TEMPE REBELAI	23	47	3949260	3949260		
6	10392-INDUSTRI TAHU KEDELAI	15	81	1982970	8449460	1568100	
7	10399-INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	6	35	1033360	7296748	150000	
8	10422-INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA	2	16	702000	2160000	720000	
9	10510-INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	1	7	91000	120000	75000	
10	10531-INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	3	18	421050	1620000	414000	
11	10590-INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	1	2	14367	135000	54000	
12	10511-INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN	1	6	596000	2700000	1350000	
13	10631-INDUSTRI PENGOLINGAN PADI DAN PENYOSAHAN BERAS	2	23	530000	1425000	750000	
14	10710-INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	162	1440	22237042	82815759	21776880	
15	10723-INDUSTRI SIROP	3	48	101675	1320720	559500	
16	10732-INDUSTRI MAKANAN DARI CORELAT DAN KEMBARANG GULA	28	917	4268278	25693385	3368010	
17	10733-INDUSTRI MAKANAN DARI CORELAT DAN KEMBARANG GULA	1	1	639	2160		
18	10735-INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	2	91	17842	93235	5000	
19	10740-INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	18	160	1601852	11252052	1715145	
20	10750-INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	11	29	65623	941159	243000	
21	10761-INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH	18	136	3615309	14228350	15813720	
22	10771-INDUSTRI KECAF	6	38	313476	9445300	306175	
23	10772-INDUSTRI Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	17	58	1014512	5042110	1507429	
24	10779-INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	4	45	245427	1748160	231900	
25	10792-INDUSTRI KUE BASAH	88	191	3774393	11888883	18000	
26	10793-INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAF, TEMPE DAN TAHU	4	58	539900	2460000	668200	
27	10794-INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	105	519	59882358	29536015	1476500	
28	10795-INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	23	286	102599111	4593242	1201130	
29	10801-INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	2	34	162000	1396000	6393000	
30	11040-INDUSTRI MINUMAN RINGAN	2	22	425000	240000	269500	
31	11050-INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	11	140	1837904	673710330	1518758	
32	11090-INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	25	63	602039	1985280	45024	
33	12011-INDUSTRI FOKOK KRETEK	35	9056	772917449	849625410	307348323	
34	12019-INDUSTRI FOKOK DAN CERUTU LAINNYA	1	20	3745000	960000		
35	12091-INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	2	172	32360000	6119000	671400	
36	13113-INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	2	20	9192000	312000	165000	
37	13132-INDUSTRI PENEMPURNAAN KAIN	1	8	69958	23205	59904	

No	KBLI	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)			Nilai Produksi (Rp.000)			Nilai BB/BP (Rp.000)
				3	4	5	6	7		
1	2									
80	21022-INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	35	147	2.105.519	5744880	6082000				
81	22112-INDUSTRI VULKAMISIR BAN	5	44	27000	810771	698900				
82	22122-INDUSTRI REMILING KARET	1	50							
83	22199-INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	1	12	147000	900000	261500				
84	22220-INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	18	837	34.115.000	1.554.527,5	2.912.760,0				
85	23121-INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	1	3	600750	675000	13500				
86	23129-INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	1	5	5000	480000					
87	23919-INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	4	70	309350	646550	333600				
88	23922-INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	6	167	887500	3447000	1299000				
89	23923-INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	1	2	21970	104000					
90	23931-INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	46	218	35.562,50	4745700					
91	23932-INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	23	65	380498						
92	23943-INDUSTRI GIPS	1	4	12000	36000	8900				
93	23957-INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PACAI	2	8	90798	166900					
94	23959-INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA	3	66	107500	1200000	520000				
95	23962-INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	1	12	75000	600000	150000				
96	23963-INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	1	12	675000	675000	371250				
97	24202-INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	1	16			4300				
98	24310-INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	1	13	9000	89000	47000				
99	25111-INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	56	281	510000	8947700	15047000				
100	25112-INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	2	13	65000	1104000	200000				
101	25120-INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	1	30	350000	126000	98100				
102	25130-INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	1	19	190504	720000	47900				
103	25192- Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	1	25	1000000	90000					
104	25934-INDUSTRI PERALATAN UMBUN	5	17	10500	120000					
105	25992-INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	5	13	26000	684000					
106	26220-INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	1	16	1.116.550	1200000	846000				
107	26310-INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI	1	9	69382	105000	52800				
108	26511-INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUJAL	2	58	122500	340000	88000				
109	26513-INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	1	5	40000	750000	150000				
110	26520-INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	1	7	70000	300000	100000				
111	26792-INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	1	8			30000				
112	27111-INDUSTRI MOTOR LUSTRIK	2	141	477124	5324000	86800				
113	27510-INDUSTRI PERALATAN LUSTRIK RUMAH TANGGA	9	75	3230651	29973000	628855				
114	27900-INDUSTRI PERALATAN LUSTRIK LAINNYA	1	16	12500	168000	56250				
115	28113-INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN	2	26	141562	1200000	464185				
116	28160-INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH	7	128	13766000	1850980					
117	28199-INDUSTRI PERALATAN LUSTRIK LAINNYA	1	1	18.866	105000					
118	28250-INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	2	8	410500	1720000					
119	SEMI TRAILER	6	48	1473414	235500	318446				
120	29300-INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	44	476	1618200	12125950	1778410				
121	30911-INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	1	3	10000	4000	2000				
122	30912-INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	26	348	17090504	8870400	1521340				

No	KBLI	JUMLAH PERUSAHAAN	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp.000)	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	NILAI BB/BP (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
123	30921-INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	1	4	45000	297.500	
124	30922-INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI BODA TERMASUK BECAK	1	1	3000	14.000	
125	31001-INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	98	1062	35881246	74648850	8226695
126	31002-INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBUI	23	76	1727937	20671845	
127	31004-INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	22	94	459550	882000	442500
128	31009-INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	1	9	115300	172000	64700
129	32112-INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	15	286	142287084	20455000	4085999
130	32309-INDUSTRI ALAT OLAH-RAGA	51	346	2327213	9481110	975847
131	32402-INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	3	128	1370996	708000	200000
132	32509-INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	46	94	121050	250000	106700
133	33119-JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	18	36	1149653	14850200	776810
134	33121-JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	1	13	20000	60000	38620
135	33149-JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	3	17	70000	30233000	57500
136	38211-FENGELOMAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA	1	19	280000	1600000	160000
137	38212-PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	1	5	40500	1440000	
138	42919-KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	1	51	3000000	1875000	799500
139	45201-REPARASI MOBIL	3	20	119900	444000	183800
140	47772-PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	1	4	170000		108000
141	77302-JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN K	1	10	20456	840000	352500
142	95110-JASA REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	11	25	37000	496300	
143	95120-JASA REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	15	22	40265	381250	
144	95220-JASA REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN	1	11			20800
145	10391/10794-INDUSTRI TEMPE KEDELAI/INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	309	793	35736757	100176486	

POTENSI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015

Kota : Malang
 Propinsi : Jawa Timur

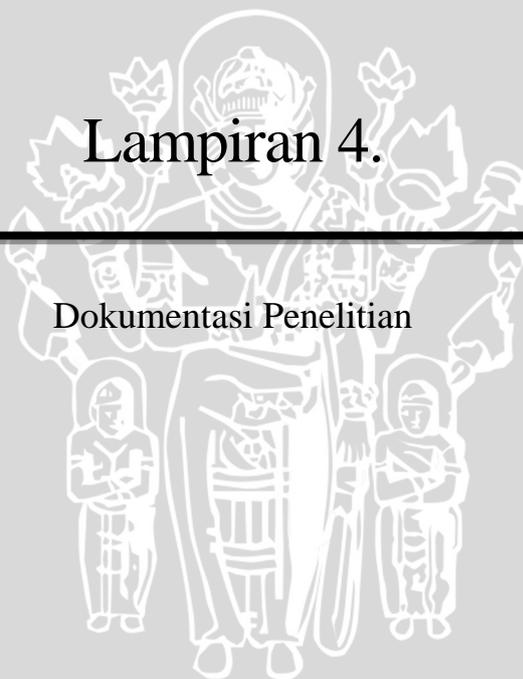
No.	KBLI	Bidang Usaha	Jumlah Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi	Kapasitas Produksi		Nilai Produksi	Nilai BB/BP
							Jumlah	Satuan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	31002	Kerajinan Rotan	1	23	76	1,227,937,000	272,016	buah	20,671,845,000	3,174,186,000
4	10391/10794	Temper/ Keripik, Tempa	1	309	793	35,736,757,000	9,100,820	Kg	100,176,486,000	126,539,555,000
5	10794	Marming Jagung	1	11	52	3,110,067,000	538,980,000	Kg	6,783,660,000	6,894,554,120
6	10399	Krecek	1	4	20	935,195,000	563,721	unit	8,864,248	
7	23932	Gerabah	1	23	65	380,488,000	1,527,600	unit	276,000,000	2,137,500,000
8	23931	Keramik	1	46	218	3,556,250,000	170,000	unit	4,745,700,000	543,000,000
9	31001	Mebel kayu	1	43	294	14,755,448,000	12,842	unit	25,433,100,000	3,306,675,350
10	26324	Sanitair	1	14	90	300,000,000	27,000	buah	4,000,000,000	332,000,000
11	29301	Kompor Sumbu	2	32	500	1,809,500,000	996,000	buah	3,300,000,000	1,476,000,000
12	26413	Kerajinan Gips	1	16	48	24,000,000	120,000	buah	600,000,000	420,000,000
13	14111	Pakaian Jadi	2	24	113	335,000,000	33,000	duzin	1,910,000,000	226,044,000
14	36993	Sikat Ijuk	1	3	5	28,770,000	36,000	biji	60,000,000	162,000,000
15		kue basah		46	124	2,913,568,333	6,646,236	bh	7,975,483,000	
16	36930	raket		30	163	407473000	467000	bh	196451680	7975483000
				624	2,561	66,020,483,333			176,135,589,928	153,186,997,470



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 4.

Dokumentasi Penelitian



DOKUMENTASI



Saat melakukan wawancara dengan pelaku IKM marning jagung



Suasana penjemuran marning jagung



Alat Pemipih jagung



Salah satu produk marning jagung



Jalan Simpang Teluk Bayur



Pembangunan Langgar untuk Masyarakat



Masjid Al-Hikmah di Jl. Simpang Teluk bayur

Curicullum Vitae



Nama : Galih Satrio Pambudi
TTL : Jakarta, 14 Januari 1994
Umur : 23 Tahun
Alamat Asal : Jl. Petamburan VI No. 26A Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Malang : Jl. Arumba No. 03 Tunggulwulung Malang
NIM : 125030100111043
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
No. Hp : 083896742383
Email : galihsatriop@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
Pendidikan Formal

2000-2006	SD Islam Al-Abrar Jakarta
2006-2009	SMP Negeri 40 Jakarta
2009-2012	SMA Negeri 35 jakarta
2012-sampai Sekarang	Universitas Brawijaya